



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elfin Rudianto Sitorus
2. Tempat lahir : Seitenang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/19 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pura Beji No. 21 Banjar Buana Graha
Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta
Utara Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Elfin Rudianto Sitorus ditahan dalam rumah tanahan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., Thesy Octarini Siregar, S.H., Agus Gunawan Putra, S.H., dan I Putu Gede Darmawan, S.H., M.H., sama-sama Advokat yang berkantor pada AWP LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Jalan Badak Agung IV A Nomor 09, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No: 633/Daf/2020, hari Rabu, tanggal 04-03-2020;

Halaman 1 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDS-01/BDG/01//2020, tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp. 1.344.558.713,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), sehingga jumlah denda sebesar Rp. 2.689.117.426,- (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Invoice Progress 100% yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 002/JBS/IN-PRG/GRT-MBG/VI016 tanggal 24 Juni 2016	1 Lembar	Copy
2	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran progress 100% Paket pekerjaan grease trap di Galeria Bali, banyaknya uang Rp 47.850.000,-	1 Lembar	Copy
3	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833433 tanggal 24 Juni 2016	1 Lembar	Copy
4	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 31 Mei 2016 untuk pembayaran down payment 50% Paket pekerjaan grease trap di Galeria Bali, banyaknya uang Rp 47.850.000,-	1 Lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833425 tanggal 31 Mei 2016	1 Lembar	Copy
6	Bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga PT Talkindo Selaksa Anugrah kepada BCA I Made Sudaris tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 46.541.500.	1 Lembar	Copy
7	Bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga PT Talkindo Selaksa Anugrah kepada BCA I Made Sudaris tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 46.541.500.	1 Lembar	Copy
8	Foto pengerjaan Panel, Pompa Grease Trap, dan Instalasi Kabel.	9 Lembar	Hasil Print Foto
9	SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016.	1 set	Copy
10	SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016	1 set	Copy
11	Perjanjian Kerja Kontrak ME Grease Trap Nomor 003/IE/ME/BT-GAL/V/16-PRJ	1 set	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **ENI**:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keterangan Terdaftar nomor S-1555KT/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 19 Maret 2014 PT JAYA BALI SEJAHTERA beserta lampiran pendukung : Asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen saat pendaftaran, Copy KTP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy Kartu NPWP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Asli Formulir Pendaftaran NPWP, Copy SKTU, Copy Legalisir Akta Pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA no 15 tanggal 19 Februari 2014	18 lembar	Asli
2	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-50PKP/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014 PT JAYA BALI SEJAHTERA beserta lampiran pendukung : Asli SKT, Asli BA Perubahan Data WP	35 lembar	Asli

Halaman 3 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	dan/atau PKP nomor BA-44PD/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014, Asli Surat Pemberitahuan Perubahan Data S-46PD/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014, Asli Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan WP nomor LAP-520/WPJ.17/KP.06/2014 tanggal 23 September 2014, Asli Surat Tugas nomor ST-133V/WPJ.17/KP.0603/2014, Asli Screenshoot BPS Permohonan Pengukuhan PKP dari aplikasi e-reg nomor S-2683R/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 18 September 2014, Copy LPAD Permohonan Pengukuhan PKP nomor S-2683R/WPJ.17/KP.0603/2014, Copy Formulir Pengukuhan PKP, Copy Kartu NPWP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy TDP JAYA BALI SEJAHTERA, Copy SIUP Menengah PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1928/22-08/BPPT/SIUP-M/IV/2014, Copy SKT PT JAYA BALI SEJAHTERA, Copy Surat dari KPP Pratama Badung Utara tentang Hak dan Kewajiban WP serta Sanksi bunga dan administrasi, Copy KTP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy Akte Pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA, Copy Surat Keterangan Tempat Usaha No 4466/I/IX/2014, Copy Denah lokasi, Copy Surat Keterangan Rekomendasi No 102/TL/IX/2014		
3	Nota Dinas nomor ND-621/WPJ.17/KP.0604/2017 tanggal 23 November 2017 beserta Daftar Sisa Tagihan Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA	2 lembar	Asli
4	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01020585/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
5	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01020586/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
6	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01021914/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
7	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01026366/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
8	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01031169/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
9	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01034453/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01038832/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
11	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01044880/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
12	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak November 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01048702/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
13	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01001764/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
14	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01005177/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
15	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01010038/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
16	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01014157/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	7 lembar	Asli
17	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000635/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
18	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000636/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
19	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000458/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
20	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000462/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
21	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000461/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
22	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000463/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
23	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000464/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
24	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak November 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000459/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
25	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000460/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
26	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 Normal beserta LPAD Nomor S-01008486/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
27	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004074/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli

Halaman 5 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051779/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015 beserta Lampiran SPT Normal copy 3 lembar	7 lembar	Asli
29	SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004075/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
30	SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-010051989/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	8 lembar	Asli
31	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004076/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
32	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051780/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
33	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004077/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
34	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051781/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
35	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01005179/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
36	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01014303/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	4 lembar	Asli
37	SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01010040/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
38	SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01014302/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
39	SPT Masa PPN Masa Pajak April 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000273/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
40	SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000272/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
41	SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000271/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
42	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01008488/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	4 lembar	Asli
43	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01008487/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	4 lembar	Asli
44	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 Normal beserta LPAD Nomor S-01008506/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
45	Permintaan Sertifikat Elektronik dengan LPAD Nomor PEM:01007676/906/sep2015	6 lembar	Asli

Halaman 6 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi **SYAHRUL MISBAH.**

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Printout profil Wajib Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA	13 lembar	Asli
2	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-1/WPJ.17/KP.0609/2017 tanggal 24 Januari 2017	1 lembar	Asli
3	Laporan Pelaksanaan Kunjungan dan Pengamatan nomor Lap-1/WPJ.17/KP.0609/2017 tanggal 24 Januari 2017	2 lembar	Asli
4	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor BA-01/WPJ.17/KP.0609/2016 tanggal 6 Februari 2017	1 lembar	Asli
5	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-6/WPJ.17/KP.06/2017 tanggal 11 Januari 2017 beserta lampirannya	5 lembar	Asli
6	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2016 nomor S-41281/WPJ.17/KP.06/2017 tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya	3 lembar	Asli
7	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan nomor S-40632/WPJ.17/KP.06/2016 tanggal 27 September 2016 beserta lampirannya	2 lembar	Asli
8	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2015 nomor S-51435/WPJ.17/KP.06/2016 tanggal 10 November 2015	2 lembar	Asli
9	Printout Formulir 1771-V Lampiran - V SPT Tahunan PPh Badan PT JAYA BALI SEJAHTERA Tahun Pajak 2014	1 lembar	Asli
10	Printout Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2015 PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
11	Printout Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
12	Screen Shoot google maps jalan Dalung Permai	2 lembar	Asli

Dikembalikan kepada Saksi **I NYOMAN DANANHADI**

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Juni 2016 nominal Rp 122.615.000,-	1 lembar	Copy
2	Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Juni 2016	1 lembar	Copy

Halaman 7 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nominal Rp 99.995.000,-		
3	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 10 Juni 2016 untuk pembayaran progress ke-10 (84,2642%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015 banyaknya uang Rp 245.850.000,-	1 lembar	Copy
4	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833430 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
5	Invoice yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, ditandatangani tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
6	Risalah Pembayaran No. T10/JBS-GG/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
7	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan no. 010/GG-DC/BAPP- PK/VI/16 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
8	Rekapitulasi Progress Proyek Drupadi Corner Seminyak Bali tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
9	Bukti transfer Bank BCA tanggal 9 Mei 2016 nominal Rp 518.445.570,-	1 lembar	Copy
10	Bukti transfer Bank BCA tanggal 2 Mei 2016 nominal Rp 549.995.000,-	1 lembar	Copy
11	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 12 April 2016 untuk pembayaran termyn ke-9 (5,4627%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 947.232.180,-	1 lembar	Copy
12	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833422 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
13	Risalah Pembayaran No. T9-a/JBS-GG/IV/2016 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
14	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan no. 009-a/GG-DC/BAPP- PK/IV/16 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
15	Rekapitulasi Progress Proyek Drupadi Corner Seminyak Bali tanggal 11 April 2016	1 lembar	Copy
16	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 24 Maret 2016 untuk pembayaran Progress 100% Paket pekerjaan penyambungan listrik baru dengan daya 6.600 VA Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 024/LGL-GG/IX/2015, banyaknya uang Rp 164.360.000,-	1 lembar	Copy
17	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833416 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar	Copy
18	Invoice progress 100% yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-058/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy

Halaman 8 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Risalah Pembayaran No. T1-PLN/JBS-GG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016	1 lembar	Copy
20	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 001/GG-DC/BAPP-PK/III/16 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
21	Progress Pengampuhan daya PLN 6.600 VA tanggal 28 Maret 2016	1 lembar	Copy
22	Bukti transfer Bank BCA tanggal 4 Maret 2016 nominal Rp 1.919.660.483,-	1 lembar	Copy
23	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 2 Maret 2016 untuk pembayaran progress ke-8 (11,3811%) Kondisi progress saat ini 77,3837% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.973.482.740,-	1 lembar	Copy
24	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833408 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
25	Invoice progress ke 8 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-054/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
26	Risalah Pembayaran No. T8/JBS-GG/I/2016 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
27	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 008/GG-DC/BAPP-PK/I/16 tanggal 26 Januari 2016	1 lembar	Copy
28	Rekapitulasi Progress tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
29	Bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Nov 2015 nominal Rp 1.736.669.200,-	1 lembar	Copy
30	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 30 September 2015 untuk pembayaran progress ke-5 (9,89%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.714.926.000,-	1 lembar	Copy
31	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796557 tanggal 30 September 2015	1 lembar	Copy
32	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-032/JBS/IN-PRG/IX/2015 tanggal 30 September 2015	1 lembar	Copy
33	Risalah Pembayaran No. T5/JBS-GG/IX/2015 tanggal 25 September 2015	1 lembar	Copy
34	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 005/GG-DC/BAPP-PK/IX/15 tanggal 25 September 2015	1 lembar	Copy
35	Rekapitulasi Progress tanggal 23 September 2015	1 lembar	Copy
36	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 Oktober 2015 untuk pembayaran DP 30% Penyambungan Listrik	1 lembar	Copy

Halaman 9 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Baru Dengan Daya 6.600 VA Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 24/LGL-GG/IX/2015, banyaknya uang Rp 70.440.000,-		
37	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796558 tanggal 1 Oktober 2015	1 lembar	Copy
38	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-033/JBS/IN-DP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015	1 lembar	Copy
39	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 16 Okt 2015 nominal Rp 863.223.000,-	1 lembar	Copy
40	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 5 Okt 2015 nominal Rp 708.333.000,-	1 lembar	Copy
41	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 September 2015 untuk pembayaran progress ke-4 (6,6%) Kondisi progress saat ini 39,25% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.144.440.000,-	1 lembar	Copy
42	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796556 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
43	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-031/JBS/IN-PRG/IX/2015 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
44	Risalah Pembayaran No. T4/JBS-GG/VIII/2015 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
45	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 004/GG-DC/BAPP-PK/VIII/15 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
46	Rekapitulasi Progress tanggal 27 Agustus 2015	1 lembar	Copy
47	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2015 nominal Rp 317.537.455,-	1 lembar	Copy
48	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Agustus 2015 nominal Rp 200.000.000,-	1 lembar	Copy
49	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 Agust 2015 nominal Rp 499.993.000,-	1 lembar	Copy
50	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 29 Juni 2015 untuk pembayaran progress ke-3 (8,75%) Kondisi progress saat ini 32,65% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.517.250.000,-	1 lembar	Copy
51	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796555 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
52	Invoice progress ke 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-030/JBS/IN-PRG/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
53	Risalah Pembayaran No. T3/JBS-GG/VI/2015	1 lembar	Copy

Halaman 10 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 29 Juni 2015		
54	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 003/GG-DC/BAPP-PK/VI/15 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
55	Rekapitulasi Progress tanggal 27 Juni 2015	1 lembar	Copy
56	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 1 Juli 2015 nominal Rp 1.904.289.564,-	1 lembar	Copy
57	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 26 Mei 2015 untuk pembayaran progress ke-2 (11,29%) Kondisi progress saat ini 23,90% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.957.686.000,-	1 lembar	Copy
58	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796548 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
59	Invoice progress ke 2 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-025/JBS/IN-PRG/V/2015 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
60	Risalah Pembayaran No. T2/JBS-GG/V/2015 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
61	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 002/GG-DC/BAPP-PK/V/15 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
62	Rekapitulasi Progress tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
63	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 22 Mei 2015 nominal Rp 2.126.935.164,-	1 lembar	Copy
64	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran progress ke-1 (12,61%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 2.186.574.000,-	1 lembar	Copy
65	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796546 tanggal 29 April 2015	1 lembar	Copy
66	Invoice progress ke 1 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-019/JBS/IN-PRG/IV/2015 tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
67	Risalah Pembayaran No. T1/JBS-GG/IV/2015 tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
68	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 001/GG-DC/BAPP-PK/IV/15 tanggal 27 April 2015	1 lembar	Copy
69	Rekapitulasi Progress tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
70	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 6 April 2015 nominal Rp 1.984.358.636,-	1 lembar	Copy
71	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran Down Payment Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-	1 lembar	Copy

Halaman 11 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 2.040.000.000,-		
72	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796539 tanggal 16 Maret 2015	1 lembar	Copy
73	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-015/JBS/IN-DP/III/2015 tanggal 16 Maret 2015	1 lembar	Copy
74	Surat Perintah Kerja No. 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015	10 lembar	Copy
75	Surat Perintah Kerja No. 24/LGL-GG/IX/2015 tanggal 15 September 2015	3 lembar	Copy
76	Kwitansi nomor 16-01-0005 tanggal 2 Februari 2016 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
77	Faktur Pajak nomor 010.001-16.05738514 tanggal 28 Januari 2016	1 lembar	Copy
78	Kwitansi nomor 16-01-0004 tanggal 2 Februari 2016 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
79	Faktur Pajak nomor 010.001-16.05738513 tanggal 26 Januari 2016	1 lembar	Copy
80	Kwitansi nomor 15-11-0002 tanggal 10 November 2015 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
81	Faktur Pajak nomor 010.003-15.95841700 tanggal 9 November 2015	1 lembar	Copy
82	Kwitansi nomor 15-11-0001 tanggal 3 Nopember 2015 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
83	Faktur Pajak nomor 010.003-15.95841698 tanggal 2 November 2015	1 lembar	Copy
84	Rincian Bukti Permulaan Pemeriksaan PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
85	Bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Januari 2016 nominal Rp 555.338.766,-	1 lembar	Copy
86	Bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2016 nominal Rp 487.138.655,-	1 lembar	Copy
87	Invoice Progress ke 7 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-045/JBS/IN-PRG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015	1 lembar	Copy
88	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796568 tanggal 23 Desember 2015	1 lembar	Copy
89	Bukti setoran Bank BCA tanggal 7 Desember 2015 nominal Rp 1.865.937.651,-	1 lembar	Copy
90	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-037/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015	1 lembar	Copy
91	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796559 tanggal 2 November 2015	1 lembar	Copy
92	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-038/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015	1 lembar	Copy
93	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796561 tanggal 12 November 2015	1 lembar	Copy
94	Invoice Progress ke 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-	1 lembar	Copy

Halaman 12 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	039/JBS/IN-PRG/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015		
95	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796562 tanggal 13 November 2015	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **HARMANTO DARMALI**

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Bilyet Giro Nomor AAZ 917574 nominal Rp 21.800.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
2	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000328 tanggal 11 April 2016	1 lembar	Asli
3	Journal Voucher nomor BNV 007839 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
4	Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
5	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 21.800.000,-	1 lembar	Asli
6	Kwitansi bermaterai Pembayaran Progress 100% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate 2, di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015 tanggal 8 Maret 2016, Nominal Rp 24.750.000,-	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833413 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
8	Berita Acara Serah Terima No 022/BAST/PCB-JBS/III/16 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
9	Invoice Progress 100% No I-050/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Asli
10	Perjanjian Kerjasama Untuk Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection No 019/BNV-BC/XI/2015	11 lembar	Copy
11	Interoffice Memorandum tanggal 16 Oktober 2015	3 lembar	Copy
12	Transaksi GL periode Desember 2015 PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	1 lembar	Copy
13	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000624 tanggal 12 Juli 2016	1 lembar	Asli
14	Journal Voucher nomor BNV 008036 tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
15	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 3.294.000,-	1 lembar	Asli
16	Kwitansi bermaterai Retensi 5% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 605.000,-	1 lembar	Asli
17	Invoice Retensi 5% No 1-069/JBS/IN-RTS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Asli
18	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833431 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Copy
19	Berita Acara Serah Terima No 021/BAST/PCB-JBS/XII/15 tanggal 12 Desember 2015	1 lembar	Copy

Halaman 13 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Perjanjian Kerjasama Untuk Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing di Bali Collection No 020/BNV-BC/XI/2015	10 lembar	Copy
21	Purchase Request PT Bali Nusadewata Village No 044/PR-BNV/X/2015	3 lembar	Copy
22	Bilyet Giro Nomor ABB 390750 nominal Rp 7.722.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
23	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000293 tanggal 5 April 2016	1 lembar	Asli
24	Journal Voucher nomor BNV 007825 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
25	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 7.722.000,-	1 lembar	Asli
26	Kwitansi bermaterai Pembayaran Progress 100% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 7.865.000,-	1 lembar	Asli
27	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833414 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
28	Invoice Progress 100% No 1-049/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Asli
29	Bilyet Giro Nomor ABB 396154 nominal Rp 3.294.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
30	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000625 tanggal 12 Juli 2016	1 lembar	Asli
31	Journal Voucher nomor BNV 008037 tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
32	Kwitansi bermaterai Retensi 5% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 yang berlokasi di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 2.750.000,-	1 lembar	Asli
33	Invoice Retensi 5% No 1-068/JBS/IN-RTS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Asli
34	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833432 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Copy
35	Berita Acara Serah Terima No 022/BAST/PCB-JBS/III/16 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
36	Bilyet Giro Nomor AAZ 913430 nominal Rp 3.564.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
37	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000073 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Asli
38	Journal Voucher nomor BNV 007689 tanggal 21 Januari 2016	1 lembar	Copy
39	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 3.564.000,-	1 lembar	Asli
40	Kwitansi bermaterai Pembayaran DP 30% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 3.630.000,-	1 lembar	Asli
41	Invoice Down Payment 1-042/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Asli
42	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796565	1 lembar	Copy

Halaman 14 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 1 Desember 2015		
43	Surat No S-286/PPN.NSFP/WPJ.17/KP.0603/2015 tanggal 20 Februari 2015 dari KPP Pratama Badung Utara kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy
44	Bilyet Giro Nomor AAZ 913412 nominal Rp 27.000.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
45	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000028 tanggal 15 Januari 2016	1 lembar	Asli
46	Journal Voucher nomor BNV 007684 tanggal 14 Januari 2016	1 lembar	Copy
47	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 27.000.000,-	1 lembar	Asli
48	Journal Voucher JVD/018/12/2015 tanggal 31 Desember 2015	1 lembar	Copy
49	Kwitansi bermaterai Pembayaran DP 50% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 27.500.000,-	1 lembar	Asli
50	Invoice Down Payment 1-041/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Asli
51	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796564 tanggal 1 Desember 2015	1 lembar	Copy
52	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Januari 2016 Normal beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-01005782/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 29 Februari 2016	3 lembar	Copy
53	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan 1 beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-05012973/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2017 tanggal 30 Oktober 2017	3 lembar	Copy
54	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak April 2016 Normal beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-0105143/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 31 Mei 2016	3 lembar	Copy
55	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Juni 2016 Pembetulan 1 beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-01027580/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 30 September 2016	3 lembar	Copy
56	Bukti transfer Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 20 Januari 2016 nilai Rp 27.000.000,-	1 lembar	Copy
57	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA atas pembayaran DP 50% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection SPK No. 019/BNV-BC/XI/2015 nominal Rp 27.500.000,- dan Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
58	Invoice Down Payment dari PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1-041/JBS/IN-DP/XI/2015	1 lembar	Copy

Halaman 15 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 November 2015		
59	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 01/23/01/2016/BNV tanggal 14 Januari 2016	1 lembar	Copy
60	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 01/23/04/2016/BNV tanggal 04 April 2016	1 lembar	Copy
61	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 21/23/06/2016/BNV tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
62	BILYET GIRO No. AAZ 913430 CIMB Niaga nominal Rp 3.564.000,-	1 lembar	Copy
63	Bukti Pengeluaran Bank PT Bali Nusadewata Village yang dibayarkan kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA no 2016000073 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
64	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA atas pembayaran DP 30% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing di Bali CollectionSPK No. 020/BNV-BC/XI/2015 nominal Rp 3.630.000,- dan Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
65	Invoice Down Payment dari PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1-042/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Copy
66	Surat dari KPP Pratama Badung Utara nomor S-286/PPN.NSFP/WPJ.17/KP.0603/2015 tanggal 20 Februari 2015 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak	1 lembar	Copy
67	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 42/23/12/2015/BNV tanggal 31 Desember 2015	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **SUMARJIANTO**

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Copy kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 26 Februari 2015 untuk pembayaran progress 100% Paket Pekerjaan MEP External Restaurant BBQ dan Art Shop Komplek Area Bebek Bengil The Bay SPK No 017/SPK-TBB/XII/2014, banyaknya uang Rp 32.175.000,-	1 lembar	Copy
2	Copy invoice progress 100% No I-009/JBS/IN-PRG/II/2015 tanggal 26 Februari 2015	1 lembar	Copy
3	Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I No 001/BAST-RD/2015 tanggal 25 Februari 2015	1 lembar	Copy
4	Copy SPK No 017/SPK-TBB/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014	3 lembar	Copy
5	Copy Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796541 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **DJOKO PURNAMA, S.E.**

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
-----	-------------------	--------	------------

Halaman 16 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			n
1	Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Material Dan peralatan Pekerjaan Elektronika no. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015 tanggal 7 Desember 2015	11 lembar	Copy
2	Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika no. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015 tanggal 7 Desember 2015	11 lembar	Copy
3	Sertifikat pembayaran no 02/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/II/16	1 lembar	Copy
4	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 19 Februari 2016 untuk pembayaran progress 1 (13,6382%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 124.816.000,-	1 lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833409 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
6	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 060/JBS/IN-PRG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016	1 lembar	Copy
7	Summary progress termyn ke 1 tertanggal 15 Februari 2016	12 lembar	Copy
8	Cek Bank BPD Bali no P343654 nilai Rp 155.168.982,-	1 lembar	Copy
9	Sertifikat pembayaran no 02/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
10	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 19 Februari 2016 untuk pembayaran progress 1 (13,6382%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 31.204.000,-	1 lembar	Copy
11	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833410 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
12	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 061/JBS/IN-PRG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016	1 lembar	Copy
13	Summary progress termyn ke 1 tertanggal 15 Februari 2016	13 lembar	Copy
14	Cek Bank BPD Bali no P344004 nilai Rp 73.920.591,-	1 lembar	Copy
15	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 Maret 2016 untuk pembayaran progress 2 (20,1352%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi	1 lembar	Copy

Halaman 17 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 14.865.000,-		
16	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-047/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
17	Summary progress termyn ke II tertanggal 3 Maret 2016	12 lembar	Copy
18	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833411 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
19	Sertifikat pembayaran no 03/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
20	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 Maret 2016 untuk pembayaran progress 2 (20,1352%) Pengadaan Material Dan peralatan Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 59.461.000,-	1 lembar	Copy
21	Invoice progress ke 2 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-048/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
22	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833412 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
23	Sertifikat pembayaran no 03/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
24	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 April 2016 untuk pembayaran progress 3 (30,5334%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 26.171.000,-	1 lembar	Copy
25	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833419 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
26	Sertifikat pembayaran no 04/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/IV/16	1 lembar	Copy
27	Summary progress termyn ke 3 tertanggal 31 Maret 2016	12 lembar	Copy
28	Cek Bank BPD Bali no P344550 Rp 130.138.245,-	1 lembar	Copy
29	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy
30	Sertifikat pembayaran no 04/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/IV/16	1 lembar	Copy
31	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 April 2016 untuk pembayaran progress 3 (30,5334%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No.	1 lembar	Copy

Halaman 18 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 104.681.000,-		
32	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833421 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
33	Invoice progress 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-065/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
34	Summary progress sampai dengan 2 April 2016 tertanggal 31 Maret 2016	1 lembar	Copy
35	Invoice progress 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 4 April 2016	12 lembar	Copy
36	Cek Bank BPD Bali no P346633 Rp 44.362.700,-	1 lembar	Copy
37	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tertanggal 20 Mei 2016	1 lembar	Copy
38	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran progress ke 4 (34,4325%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 8.921.000,-	1 lembar	Copy
39	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833423 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
40	Sertifikat pembayaran no 05/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/V/16	1 lembar	Copy
41	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-067/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
42	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran progress ke 4 (34,4325%) Paket pekerjaan Pengadaan Material Dan peralatan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 35.685.000,-	1 lembar	Copy
43	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833424 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
44	Sertifikat pembayaran no 05/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/V/16	1 lembar	Copy
45	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
46	Summary progress sampai dengan tanggal 30 April 2016 tertanggal 30 April 2016	12 lembar	Copy
47	Cek Bank BPD Bali no P345339 Rp 109.117.000,-	1 lembar	Copy
48	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 6 Juni 2016 untuk pembayaran progress ke 5 (47,3951%) paket	1 lembar	Copy

Halaman 19 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 109.117.000,-		
49	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tertanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
50	Sertifikat pembayaran no 06-R/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VI/16	1 lembar	Copy
51	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833427 tanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
52	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-069/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
53	Summary progress sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 tertanggal 3 Juni 2016	12 lembar	Copy
54	Cek Bank BPD Bali no P345340 Rp 371.426.000,-	1 lembar	Copy
55	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 13 Juni 2016 untuk pembayaran progress 6 (86,9394%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 371.426.000,-	1 lembar	Copy
56	Invoice progress ke 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-070/JBS/IN-PRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
57	Sertifikat pembayaran no 07/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VI/16	1 lembar	Copy
58	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833429 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
59	Summary progress sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 tertanggal 10 Juni 2016	12 lembar	Copy
60	Daftar Main Unit siap kirim ke Yan Project tertanggal 11 Juni 2016	7 lembar	Copy
61	Cek Bank BPD Bali no P459295 Rp 134.297.072,-	1 lembar	Copy
62	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 15 Agustus 2016	1 lembar	Copy
63	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran progress 7 (89,4858%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 23.305.000,-	1 lembar	Copy
64	Copy Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833434 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
65	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VIII/16	1 lembar	Copy
66	Invoice progress ke 7 yang dikeluarkan oleh PT	1 lembar	Copy

Halaman 20 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-079/JBS/IN-PRG/VII/2016 tanggal 9 Agustus 2016		
67	Summary progress sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 tertanggal 8 Agustus 2016	12 lembar	Copy
68	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran progress 5 (84,3031%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 114.104.000,-	1 lembar	Copy
69	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833435 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
70	Sertifikat pembayaran no 06/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/VIII/16	1 lembar	Copy
71	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-080/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
72	Summary progress sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 tertanggal 9 Agustus 2016	12 lembar	Copy
73	Cek Bank BPD Bali no P459300 Rp 63.394.000,-	1 lembar	Copy
74	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 2 September 2016	1 lembar	Copy
75	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/IX/16	1 lembar	Copy
76	Copy Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833436 tanggal 1 September 2016	1 lembar	Copy
77	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 September 2016 untuk pembayaran progress ke 8 (96,4126%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 63.394.000,-	1 lembar	Copy
78	Invoice progress ke 8 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-082/JBS/IN-PRG/VIII/2016 tanggal 1 September 2016	1 lembar	Copy
79	Summary progress sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 tertanggal 29 Agustus 2016	12 lembar	Copy
80	Cek Bank BPD Bali no P460470 Rp 55.599.527,-	1 lembar	Copy
81	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 21 Oktober 2016	1 lembar	Copy
82	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/X/16	1 lembar	Copy
83	Invoice progress 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-088/JBS/IN-PRG/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
84	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833438 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
85	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI	1 lembar	Copy

Halaman 21 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJAHTERA tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran progress 6 (98,9901%) paket pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 33.604.000,-		
86	Summary progress sampai dengan tanggal 30 September 2016 tertanggal 29 Agustus 2016	12 lembar	Copy
87	Sertifikat pembayaran no 09/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/X/16	1 lembar	Copy
88	Invoice progress ke 9 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-089/JBS/IN-PRG/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
89	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833439 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
90	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran progress ke 9 (98,9751%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 22.912.000,-	1 lembar	Copy
91	Summary progress sampai dengan tanggal 30 September 2016 tertanggal 5 Oktober 2016	12 lembar	Copy
92	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran down payment Paket Pekerjaan Pengadaan ELEKTRONIKA Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 171.600.000,-	1 lembar	Copy
93	Cek Bank BPD Bali no P192159 Rp 171.600.000,-	1 lembar	Copy
94	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796566 tanggal 17 Desember 2015	1 lembar	Copy
95	Invoice down payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 046/JBS/IN-DP/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015	1 lembar	Copy
96	Sertifikat pembayaran no 01/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/XII/15	1 lembar	Copy
97	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796567 tanggal 17 Desember 2015	1 lembar	Copy
98	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran down payment Paket Pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi ELEKTRONIKA Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 42.900.000,- beserta cek Bank BPD Bali no P194071 Rp 41.730.000,-	1 lembar	Copy

Halaman 22 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	Invoice down payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 045/JBS/IN-DP/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015	1 lembar	Copy
100	Sertifikat pembayaran no 01/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/XII/15	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi Ir. LATIF JAILANI

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740374 tanggal 1 Oktober 2014	1 lembar	Copy
2	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740375 tanggal 15 Oktober 2014	1 lembar	Copy
3	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740378 tanggal 21 November 2014	1 lembar	Copy
4	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740379 tanggal 21 November 2014	1 lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740381 tanggal 23 Desember 2014	1 lembar	Copy
6	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740382 tanggal 30 Desember 2014	1 lembar	Copy
7	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740383 tanggal 30 Desember 2014	1 lembar	Copy
8	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796538 tanggal 24 Februari 2015	1 lembar	Copy
9	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796540 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
10	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796543 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
11	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796544 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
12	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 102.135.540,-	1 lembar	Copy
13	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796549 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
14	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 973.719,-	1 lembar	Copy
15	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796550 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
16	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 1.240.785,-	1 lembar	Copy
17	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796551 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
18	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 72.614,-	1 lembar	Copy
19	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796552 tanggal 16 Juni 2015	1 lembar	Copy
20	Invoice Progress 100% Nomor 1-011/JBS/IN-	1 lembar	Copy

Halaman 23 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRG/III/2015 tanggal 23 Maret 2015		
21	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 001/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
22	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 002/BAST-JBS/II/2015	1 lembar	Copy
23	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 003/BAST-JBS/II/2015	5 lembar	Copy
24	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 004/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
25	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 005/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
26	Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK-GUDANG GARAM KUPANG/VIII/14 senilai Rp 1.298.000.000,-	3 lembar	Copy
27	Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK-GUDANG GARAM MEP LT.2/X/14 senilai Rp 377.575.000,-	9 lembar	Copy
28	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 596.730.332,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 12 Mei 2015 nominal Rp 100.000.000,-	1 lembar	Copy
29	Bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 24 April 2015 nominal Rp 100.000.000,-	1 lembar	Copy
30	Bukti transfer ke ELFIN RUDIANTO SITORUS tanggal 31 Maret 2015 nominal Rp 146.730.332,-	1 lembar	Copy
31	Bukti transfer ke ELFIN RUDIANTO SITORUS tanggal 10 April 2015 nominal Rp 250.000.000,-	1 lembar	Copy
32	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 23.574.913,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 23.574.913,-	1 lembar	Copy
33	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 18.500.656,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 18.500.656,-	1 lembar	Copy
34	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 1.379.674,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 1.379.674,-	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **RINA**.

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	SPK No. 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 November 2014	2 lembar	Copy
2	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796542 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Asli

Halaman 24 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 15 Mei 2015 Nominal Rp 130.403.519,-	1 lembar	Asli
4	Kwitansi bermaterai Progress ke-1 tanggal 2 Maret 2015 Nominal Rp 147.880.279,-	1 lembar	Asli
5	Invoice Progress 1 Nominal Rp 147.880.279,-	1 lembar	Asli
6	Final Summary	1 lembar	Asli
7	Laporan Progress Periode Januari 2015	9 lembar	Asli
8	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796545 tanggal 23 April 2015	1 lembar	Asli
9	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 183.050.215,-	1 lembar	Asli
10	Kwitansi bermaterai Termin II tanggal 23 April 2015 Nominal Rp 207.582.718,-	1 lembar	Asli
11	Invoice Progress 2 Nominal Rp 207.582.718,-	1 lembar	Asli
12	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 2	1 lembar	Asli
13	Final Summary Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
14	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
15	Variation Order Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
16	Laporan Progress Periode Februari 2015	58 lembar	Copy
17	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
18	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796547 tanggal 20 Mei 2015	1 lembar	Asli
19	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 165.638.235,-	1 lembar	Asli
20	Kwitansi bermaterai Progress ke-3 tanggal 20 Mei 2015 Nominal Rp 187.837.174,-	1 lembar	Asli
21	Invoice Progress 3 Nominal Rp 187.837.174,-	1 lembar	Asli
22	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 3	1 lembar	Asli
23	Final Summary Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
24	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
25	Variation Order Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
26	Laporan Progress Periode Maret 2015	48 lembar	Copy
27	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
28	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796553 tanggal 25 Juni 2015	1 lembar	Asli
29	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 22 September 2015 Nominal Rp 149.011.054,-	1 lembar	Asli
30	Kwitansi bermaterai Progress ke-4 tanggal 25 Juni 2015 Nominal Rp 168.981.607,-	1 lembar	Asli
31	Invoice Progress 4 Nominal Rp 168.981.607,-	1 lembar	Asli
32	BAP Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan	1 lembar	Asli
33	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 4	1 lembar	Asli

Halaman 25 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Final Summary Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
35	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
36	Variation Order Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
37	Laporan Progress Periode April 2015	47 lembar	Copy
38	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
39	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796554 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Asli
40	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 22 September 2015 Nominal Rp 107.286.705,-	1 lembar	Asli
41	Kwitansi bermaterai Progress ke-5 tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 121.665.336,-	1 lembar	Asli
42	Invoice Progress 5 Nominal Rp 121.665.336,-	1 lembar	Asli
43	BAP Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan	1 lembar	Asli
44	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 5	1 lembar	Asli
45	Final Summary Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
46	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
47	Variation Order Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
48	Laporan Progress Periode Mei 2015	46 lembar	Copy
49	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
50	Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-5939/PP/WPJ.17/2016 tanggal 11 Oktober 2016	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **GUNARDI**.

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Pengalaman Kerja dari PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor : 08/SPK-JBS/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 a.n. LESTINA INDAH RAMASI SITORUS	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **LESTINA INDAH RAMASI SITORUS**.

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara a.n. Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS	1 set	Asli
2	Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara a.n. Terdakwa I MADE SUDARIS	1 set	Asli

Dikembalikan kepada Saksi **ARIEF BUDIMAN, S.E., M.M.**

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
-----	-------------------	--------	------------

Halaman 26 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



			n
1	1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No, 1085 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgabaya Desa Labuhan Lombok yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak ELFIN RUDIANTO SITORUS.	1 set	Asli
2	1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No, 1603 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgabaya Desa Labuhan Lombok yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak ELFIN RUDIANTO SITORUS.	1 set	Asli

Diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian pada pendapatan negara (PPN terutang) akibat dari perbuatan Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dan I MADE SUDARIS.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian negara tidak terpenuhi karena Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudari sebagai pengurus telah menyerahkan dua buah Sertifikat Hak Milik No.1085 dan No.1603 kepada penyidik pada Kantor Wilayah DJP Bali sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP-015.DIK/WPJ.17/BD.0700/JBS/2019, tanggal 26 Agustus 2019, disertai dengan Berita Acara Penyitaan, tanggal 26 Agustus 2019, dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak terutang PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa dengan telah dilakukannya penerimaan oleh penyidik Kantor Wilayah DJP Bali atas kedua Sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana tersebut diatas, meskipun tidak dilakukan pembayaran pajak terutang secara tunai dalam bentuk uang, namun penerimaan tersebut yang berupa barang yang memiliki nilai uang, maka haruslah dipandang dan dinilai PT. JAYA BALI SEJAHTERA telah melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran pajak terutang berikut denda yang dipersyaratkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan alasan hal penyerahan sertifikat bukanlah merupakan alasan hilangnya unsur dapat merugikan pendapatan negara, karena sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara setelah perkara disidik bukanlah hal yg dapat menghapus tindak pidana apalagi dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU RI No. 16 Tahun 2009 yang menentukan bahwa pengembalian kerugian negara setelah perkara disidik bukanlah hal yg dapat menghapus tindak pidana, oleh karena tindak pidana di bidang perpajakan berbeda dengan tindak pidana korupsi;
- Terkait dengan siapa yang dapat menjual aset hanya pemilik atas nama sertifikat, merupakan pemahaman yang sangat sempit, oleh karena pengalihan hak milik dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mekanisme lelang atau dapat pula dilakukan dengan mekanisme lelang oleh instansi terkait, lebih-lebih telah dilakukan penyerahan oleh para terdakwa;
- Bahwa upaya untuk melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran pajak terutang oleh PT. Jaya Bali Sejahtera telah dilakukan semaksimal mungkin dengan menjual bidang tanah yg telah diserahkan tersebut, namun terkendala dengan singkatnya waktu serta nilai pajak terutang yang baru terdakwa ketahui berdasarkan penyampaian dari penyidik Kantor Wilayah DJP Bali dalam tahap akhir penyidikan atau menjelang akan dilakukan pelimpahan perkara ke JPU;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor NO. REG. PERK. : PDS – 01/BDG/01/2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur bersama-sama dengan Saksi. I MADE SUDARIS selaku Komisaris Utama (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masing-masing selaku Wakil Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.03.9-906.000, pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 dan bulan Maret sampai dengan bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor PT. JAYA BALI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Dalung Gang Tirta Bayu No. 9 Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan**

Halaman 28 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS bersama-sama dengan Saksi I MADE SUDARIS pada tanggal 19 Pebruari 2014 mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Konstruksi Bangunan Elektrikal dengan nama PT. JAYA BALI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Dalung Gang Tirta Bayu No. 9 Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 19 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris IDA MONICA E. SIDJABAT, SH di Denpasar Bali dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 1. I MADE SUDARIS sebagai Komisaris Utama;
 2. HARTOYO sebagai Komisaris;
 3. ELPIN RUDIANTO SITORUS sebagai Direktur;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, perusahaan PT. JAYA BALI SEJAHTERA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dengan NPWP 66.689.043.9-906.000 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 September 2014 dan oleh karena itu Pengurus PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. JAYA BALI SEJAHTERA ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara;
- Bahwa didalam pelaksanaan usaha atau kegiatan PT. JAYA BALI SEJAHTERA, Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dan Saksi I MADE SUNDARIS melakukan kerjasama proyek dengan pihak/perusahaan lain dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja yaitu sebagai berikut :
 1. Kerjasama dengan PT GRAHA GEMILANG, berdasarkan 2 (dua) perjanjian kerja yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Kerja nomor 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/15 tanggal 09 Maret 2015 dengan PT GRAHA GEMILANG untuk Proyek Pembangunan Gedung Drupadi Corner Seminyak-Bali untuk paket pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya, yang ditandatangani oleh HARMANTO DARMALI selaku Direktur PT GRAHA GEMILANG dan I

Halaman 29 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUDARIS yang bertindak selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA.

- b. Surat Perintah Kerja nomor 24/LGL-GG/IX/2015 tanggal 15 September 2015 untuk pekerjaan tambahan PT. JAYA BALI SEJAHTERA sebagai pelaksana proyek penyambungan listrik baru dengan daya 6.600 VA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 234.800.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN, yang ditandatangani oleh HARMANTO DARMAI selaku Direktur PT GRAHA GEMILANG dan ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA.
2. Kerjasama dengan PT BALI SUNRISE BEACH, berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 017/SPK-TBB/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, atas pekerjaan MEP External di Restoran BBQ dan Art Shop Kawasan The Bay Bali, dengan nilai pekerjaan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak termasuk PPN tetapi termasuk PPh Final 4% (empat persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, yang ditandatangani oleh INDRA IP selaku General Manager PT BALI SUNRISE BEACH dan ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA.
3. Kerjasama dengan PT BALI NUSADEWATA VILLAGE, berdasarkan 2 (dua) kontrak kerjasama yaitu :
 - a. Kontrak Kerjasama nomor 019/BNV-BC/XI/2015 untuk pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu pelaksanaan 30 Nopember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015, yang ditandatangani oleh RATNA INDIRA selaku Presiden Direktur PT BALI NUSADEWATA VILLAGE beserta BAMBANG TRI WIDODO selaku Kuasa Direksi dan ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
 - b. Kontrak Kerjasama nomor 020/ BNV-BC/XI/2015 untuk pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi *System Standing*, dengan nilai kontrak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) waktu pelaksanaan 30 Nopember 2015 sampai dengan 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh RATNA INDIRA selaku Presiden Direktur PT BALI NUSADEWATA VILLAGE beserta BAMBANG TRI WIDODO selaku Kuasa Direksi dan ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
4. Kerjasama dengan PT AMERTHA, berdasarkan 2 (dua) perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu :

Halaman 30 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Pengadaan Material dan Peralatan Pekerjaan Elektronika nomor : 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YMH/2015 tanggal 7 Desember 2015, pada proyek pembangunan gedung Yans House Hotel, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali. Nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), yang ditandatangani oleh I KADEK AGUS SUDIRA, SSt.Par. selaku Direktur PT AMERTHA dan I MADE SUDARIS yang bertindak selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
- b. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi Pekerjaan Elektronika nomor : 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YMH/2015 tanggal 7 Desember 2015, pada proyek pembangunan gedung Yans House Hotel, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali. Nilai Paket pekerjaan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditandatangani I KADEK AGUS SUDIRA, SSt.Par. selaku Direktur PT AMERTHA dan I MADE SUDARIS yang bertindak selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
5. Kerjasama dengan PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH, berdasarkan Perjanjian Kerja Kontraktor ME GREASE TRAP nomor : 003/IE/ME/BT-GAL/V/16-PRJ dengan nilai sebesar Rp 95.700.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN, yang ditandatangani oleh ROBERT SUTEJA selaku Direktur PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH dan I MADE SUDARIS yang bertindak selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
6. Kerjasama dengan PT BINA BANGUN PERKASA, berdasarkan 2 (dua) perjanjian kerja yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK-GUDANG GARAM KUPANG/VIII/14 senilai Rp 1.298.000.000,-, yang ditandatangani oleh KURNIAWAN SUTANTO selaku *Project Manager* PT BINA BANGUN PERKASA dan ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
 - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK-GUDANG GARAM MEP LT.2/X/14 senilai Rp 377.575.000,-, yang ditandatangani oleh KURNIAWAN SUTANTO selaku *Project Manager* PT BINA BANGUN



PERKASA dan ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA
BALI SEJAHTERA

7. Kerjasama dengan PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA, berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, atas pekerjaan pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan MEP ACALA Villa (Angsoka) di GWK Ungasan Bali, dengan nilai pekerjaan Rp. 1.890.985.618,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) nilai PPN 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 189.098.561,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. 2.080.084.179,- (dua milyar delapan puluh juta delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh SENO ANDHIKAWANTO selaku Operational Direktur dan JOSEPH SANUSI TJONG selaku Direktur PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA serta I MADE SUDARIS yang bertindak selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA;

- Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS bersama dengan Saksi I MADE SUDARIS selaku Pengurus PT. JAYA BALI SEJAHTERA dengan lawan-lawan transaksi yaitu PT. GRAHA GEMILANG, PT. BALI SUNRICE BEACH, PT. BALI NUSA DEWATA VILLAGE, PT. AMERTHAPT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH, PT. BINA BANGUN PERKASA dan PT. GARUDA ADHIMATRA dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 masing-masing telah menerima pembayaran total pekerjaan termasuk nilai PPN dari setiap lawan transaksi, oleh karena PT. JAYA BALI SEJAHTERA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka setiap transaksi yang dilakukan wajib ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PKP).
- Adapun faktur pajak dan invoice yang diterbitkan oleh PT. JAYA BALI SEJAHTERA untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016A adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan TranSaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796538 24 Februari 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	542.482.120	54.248.212
2	0100011513796540 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	21.431.739	2.143.174
3	0100011513796543	PT. BINA BANGUN	16.818.778	1.681.878

Halaman 32 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02 April 2015	PERKASA		
4	0100011513796544	PT. BINA BANGUN	1.254.249	125.425
	02 April 2015	PERKASA		
5	0100011513796549	PT. BINA BANGUN	92.850.491	9.285.049
	17 Juni 2015	PERKASA		
6	0100011513796550	PT. BINA BANGUN	885.199	88.520
	17 Juni 2015	PERKASA		
7	0100011513796551	PT. BINA BANGUN	1.127.986	112.799
	17 Juni 2015	PERKASA		
8	0100011513796552	PT. BINA BANGUN	66.013	6.601
	16 Juni 2015	PERKASA		
9	0100011513796539	PT. GRAHA	1.854.545.45	185.454.546
	16 Maret 2015	GEMILANG	5	
10	0100011513796546	PT. GRAHA	1.987.794.54	198.779.455
	29 April 2015	GEMILANG	5	
11	0100011513796548	PT. GRAHA	1.779.714.54	177.971.455
	26 Mei 2015	GEMILANG	5	
12	0100011513796555	PT. GRAHA	1.379.318.18	137.931.818
	29 Juni 2015	GEMILANG	2	
13	0110011513796556	PT. GRAHA	1.040.400.00	104.040.000
	01 September 2015	GEMILANG	0	
14	0110011513796557	PT. GRAHA	1.559.023.63	155.902.363
	30 September 2015	GEMILANG	6	
15	0110011513796558	PT. GRAHA	64.036.364	6.403.636
	01 Oktober 2015	GEMILANG		
16	0100011513796559	PT. GRAHA	30.000.000	3.000.000
	02 November 2015	GEMILANG		
17	010001151379656	PT. GRAHA	30.000.000	3.000.000
	1	GEMILANG		
	12 November 2015			
18	0100011513796556	PT. GRAHA	1.683.871.63	168.387.163
	2 13 November 2015	GEMILANG	6	
19	0110011513796568	PT. GRAHA	974.287.309	97.428.730
	23 Desember 2015	GEMILANG		
20	0100011513796564	PT. BALI NUSA	25.000.000	2.500.000
	1 Desember 2015	DEWATA VILLAGE		
21	0100011513796565	PT. BALI NUSA	3.300.000	330.000
	1 Desember 2015	DEWATA VILLAGE		
22	0100011513796569	PT. BALI NUSA	10.450.000	1.045.000
	15 Desember 2015	DEWATA VILLAGE		
23	0100011513796567	PT. AMERTHA	39.000.000	3.900.000
	17 Desember 2015			
24	0110011513796566	PT. AMERTHA	156.000.000	15.600.000
	17 Desember 2015			
25	0100011513796541	PT. BALI SUNRISE	29.250.000	2.925.000
	2 April 2015	BEACH		
26	0100011513796542	PT. GARUDA	134.436.617	13.443.662

Halaman 33 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	02 April 2015	ADHIMATRA INDONESIA		
27	0100011513796545 23 April 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	188.711.562	18.871.156
28	0100011513796547 20 Mei 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	170.761.067	17.076.107
29	0100011513796 25 Juni 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	153.619.643	15.361.964
30	0100011513796554 29 Juni 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	110.604.851	11.060.485

Tahun 2016

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan TranSaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100311602833408 02 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	1.794.075.218	179,407,521
2	0100311602833416 31 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	149.418.182	14,941,818
3	0100311602833422 12 April 2016	PT GRAHA GEMILANG	861.120.164	86,112,016
4	0100311602833430 10 Juni 2016	PT GRAHA GEMILANG	223.500.000	22,350,000
5	0100311602833413 08 Maret 2016	PT BALI NUSADEWAT A VILLAGE	22.500.000	2,250,000
6	0100311602833414 08 Maret 2016	PT BALI NUSADEWAT A VILLAGE	7.150.000	715,000
7	0100311602833431 15 Juni 2016	PT BALI NUSADEWAT A VILLAGE	550.000	55,000
8	0100311602833432 15 Juni 2016	PT BALI NUSADEWAT A VILLAGE	2.500.000	250,000
9	0100311602833425 31 Mei 2016	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	43.500.000	4,350,000
10	0100311602833433 24 Juni 2016	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	43.500.000	4,350,000

Halaman 34 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



11	0100311602833409 02 Maret 2016	PT AMERTHA	113.469.091	11,346,909
12	0100311602833410 02 Maret 2016	PT AMERTHA	28.367.456	2,836,745
13	0100311602833411 04 Maret 2016	PT AMERTHA	13.513.636	1,351,364
14	0100311602833412 04 Maret 2016	PT AMERTHA	54.055.773	5,405,577
15	0100311602833419 04 April 2016	PT AMERTHA	23.791.919	2,379,192
16	0100311602833421 04 April 2016	PT AMERTHA	95.164.677	9,516,468
17	0100311602833423 16 Mei 2016	PT AMERTHA	8.110.509	811,051
18	0100311602833424 16 Mei 2016	PT AMERTHA	32.441.127	3,244,113
19	0100311602833427 06 Juni 2016	PT AMERTHA	99.197.716	9,919,772
20	0100311602833429 13 Juni 2016	PT AMERTHA	337.660.353	33,766,035
21	0100311602833434 09 Agustus 2016	PT AMERTHA	21.186.364	2,118,636
22	0100311602833435 09 Agustus 2016	PT AMERTHA	103.730.909	10,373,091
23	0100311602833436 01 September 2016	PT AMERTHA	57.631.014	5,763,101
24	0100311602833438 03 Oktober 2016	PT AMERTHA	30.549.091	3,054,909
25	0100311602833439 03 Oktober 2016	PT AMERTHA	20.829.091	2,082,909

- Bahwa setelah Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS maupun Saksi I MADE SUDARIS menerima pembayaran PPN dari setiap lawan transaksi tersebut, seharusnya sebagai wakil Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000, wajib melaporkan atau menyampaikan secara lengkap dan benar seluruh penerimaan PPN yang telah diterimanya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, akan tetapi Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dan Saksi I MADE SUDARIS selaku Pengurus PT. JAYA BALI SEJAHTERA, tidak melaporkan atau menyampaikan serta menyetorkan seluruh Nilai PPN yang telah diterima dari lawan transaksi, akan tetapi terdakwa atas persetujuan Saks I MADE SUDARIS hanya membuat, menandatangani dan menyampaikan SPT Masa PPN Tahun 2015 dan Tahun 2016 ke KPP Pratama Badung Utara dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No.	Masa	Normal/	BPS	Nilai	Tanggal
-----	------	---------	-----	-------	---------

Halaman 35 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembetulan		Pelaporan (Rp)	Lapor
1	Januari	Normal	S-01005179/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	11/02/2015
2	Januari	Pembetulan Ke-1	S-01014303/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	(1.218.220)	15/04/2015
3	Februari	Normal	S-01010040/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	13/03/2015
4	Maret	Normal	S-01014302/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	15/04/2015
5	April	Normal	S-01000273/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
6	Mei	Normal	S-01000272/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
7	Juni	Normal	S-01000271/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
8	Nopember	Normal	S-01008488/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	11.262.035	01/03/2016
9	Desember	Normal	S-01008487/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	100.314.03 0	01/03/2016

Tahun 2016 :

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-01008506/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	(84.569.636)	01/03/2016

- Bahwa dari laporan SPT Masa PPN yang dilaporkan dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 dihubungkan dengan seluruh transaksi yang terjadi di Tahun 2015 dan 2016, ternyata Terdakwa selaku wakil Penguasaha Kena Pajak PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN untuk Bulan September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dan bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016 serta tidak menyetorkan Nilai PPN nya, yang semestinya dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No.	Nama Lawan Transaksi	Tanggal FP	Nilai DPP	Nilai PPN
1	PT GRAHA GEMILANG	1-Sep-15	1,040,400,00 0	104,040,000
2	PT GRAHA GEMILANG	30-Sep-15	1,559,023,63 6	155,902,363
			2,599,423,63	259,942,363

Halaman 36 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT GRAHA GEMILANG	01 Oktober 2015	6	
			64,036,364	6,403,636
			64,036,364	6,403,636

Tahun 2016

No.	Nama Lawan Transaksi	Tanggal FP	Nilai DPP	Nilai PPN
1	PT GRAHA GEMILANG	02 Maret 2016	1,794,075,218	179,407,521
2	PT GRAHA GEMILANG	31 Maret 2016	149,418,182	14,941,818
3	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	08 Maret 2016	22,500,000	2,250,000
4	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	08 Maret 2016	7,150,000	715,000
5	PT AMERTHA	02 Maret 2016	113,469,091	11,346,909
6	PT AMERTHA	02 Maret 2016	28,367,456	2,836,745
7	PT AMERTHA	04 Maret 2016	13,513,636	1,351,364
8	PT AMERTHA	04 Maret 2016	54,055,773	5,405,577
			2,182,549,356	218,254,934
		Kompensasi		(84,569,636)
		KN		133,685,298
9	PT GRAHA GEMILANG	12-Apr-16	861,120,164	86,112,016
10	PT AMERTHA	4-Apr-16	23,791,919	2,379,192
11	PT AMERTHA	4-Apr-16	95,164,677	9,516,468
			980,076,760	98,007,676
12	PT AMERTHA	16 Mei 2016	8,110,509	811,051
13	PT AMERTHA	16 Mei 2016	32,441,127	3,244,113
14	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	31 Mei 2016	43,500,000	4,350,000
			84,051,636	8,405,164
15	PT GRAHA GEMILANG	10 Juni 2016	223,500,000	22,350,000
16	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	15 Juni 2016	550,000	55,000
17	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	15 Juni 2016	2,500,000	250,000
18	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	24 Juni 2016	43,500,000	4,350,000

Halaman 37 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	PT AMERTHA	06 Juni 2016	99,197,716	9,919,772
20	PT AMERTHA	13 Juni 2016	337,660,353	33,766,035
			706,908,069	70,690,807
21	PT AMERTHA	09 Agustus 2016	21,186,364	2,118,636
22	PT AMERTHA	09 Agustus 2016	103,730,909	10,373,091
			124,917,273	12,491,727
23	PT AMERTHA	1-Sep-16	57,631,014	5,763,101
			57,631,014	5,763,101
22	PT AMERTHA	03 Oktober 2016	30,549,091	3,054,909
24	PT AMERTHA	03 Oktober 2016	20,829,091	2,082,909
			51,378,182	5,137,818

- Bahwa selain tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk Bulan September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dan bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016 tersebut, Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dan Saksi I MADE SUDARIS selaku wakil Penguasa Kena Pajak PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 telah melaporkan surat pemberitahuan PPN Masa untuk bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap yaitu dengan melaporkan SPT Masa PPN "Nihil" serta tidak menyetorkan Nilai PPN nya yang semestinya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Lawan Transaksi	Tanggal FP	Nilai DPP	Nilai PPN
1	PT BINA BANGUN PERKASA	24 Februari 2015	542,482,120	54,248,212
		Kompensasi KN	542,482,120	54,248,212
				(1,218,220)
				53,029,992
2	PT GRAHA GEMILANG	16 Maret 2015	1,854,545,45	185,454,54
			5	6
			1,854,545,45	185,454,54
			5	6
3	PT BINA BANGUN	2-Apr-15	21,431,739	2,143,174

Halaman 38 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PERKASA PT BINA BANGUN	2-Apr-15	16,818,778	1,681,878
5	PERKASA PT BINA BANGUN	2-Apr-15	1,254,249	125,425
6	PERKASA PT GRAHA	29-Apr-15	1,987,794,54	198,779,45
7	GEMILANG PT BALI SUNRISE	2-Apr-15	5	5
8	BEACH PT GARUDA	2-Apr-15	29,250,000	2,925,000
9	ADHIMATRA INDONESIA PT GARUDA	23-Apr-15	134,436,617	13,443,662
10	ADHIMATRA INDONESIA	26 Mei 2015	188,711,562	18,871,156
11	PT GRAHA GEMILANG PT GARUDA	20 Mei 2015	2,379,697,49	237,969,75
12	ADHIMATRA INDONESIA		0	0
13	PT BINA BANGUN	17 Juni 2015	1,779,714,54	177,971,45
14	PERKASA PT BINA BANGUN	17 Juni 2015	5	5
15	PERKASA PT BINA BANGUN	17 Juni 2015	170,761,067	17,076,107
16	PERKASA PT BINA BANGUN	16 Juni 2015	1,950,475,61	195,047,56
17	PERKASA PT GRAHA	29 Juni 2015	2	2
18	GEMILANG PT GARUDA	29 Juni 2015	92,850,491	9,285,049
19	ADHIMATRA INDONESIA PT GARUDA	25 Juni 2015	885,199	88,520
20	ADHIMATRA INDONESIA		1,127,986	112,799
21			1,379,318,18	137,931,81
22			2	8
23			110,604,851	11,060,485
24			153,619,643	15,361,964
25			1,738,472,36	173,847,23

Halaman 39 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5	6
--	--	--	---	---

- Bahwa dari seluruh nilai PPN Tahun 2015 dan Tahun 2016 atas nama PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000, **yang diterima langsung oleh Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dari masing-masing lawan transaksi dan tidak disetorkan ke KPP Pratama Badung Utara adalah sebesar Rp. 1.344.558.713,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).**
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan oleh Terdakwa dan Saksi ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Pengurus dan/atau wakil Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 yaitu **tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan PPN yang dipungut PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 dalam kurun waktu Masa Pajak/Tahun Pajak Februari 2015 s.d. Juni 2015, September 2015 dan Oktober 2015, Maret 2016 s.d. Juni 2016, serta Agustus 2016 s.d. Oktober 2016**, pihak KPP Pratama Badung Utara telah melakukan konseling atau kunjungan serta beberapa kali telah menyampiakan surat untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 dan Tahun 2016, akan tetapi sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi I MADE SUDARIS tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dan Saksi I MADE SUNDARIS selaku wakil Pengusaha Kena Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 yang **tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dan sekaligus tidak menyetorkan Nilai PPN Masa dalam kurun waktu Masa Pajak/bulan Februari 2015 s.d. Juni 2015, September 2015 dan Oktober 2015, Maret 2016 s.d. Juni 2016, serta Agustus 2016 s.d. Oktober 2016** telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang seluruhnya sebesar **Rp. 1.445.876.676,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).**

Perbuatan Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

Halaman 40 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Nyoman Dananhadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai Account Representative;
- Bahwa yang menjadi wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan;
- Bahwa seluruh badan dikenakan kewajiban untuk mendaftar kecuali badan yang dikecualikan oleh undang-undang, jadi termasuk PT, CV, Yayasan dan sebagainya;
- Bahwa saksi mengetahui PT Jaya Bali Sejahtera sebagai PT yang saksi awasi;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sudah terdaftar sebagai wajib pajak , terdaftar pada tanggal 19 Maret 2014 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 666890439906000;
- Bahwa dasar pendirian PT Jaya Bali Sejahtera didasarkan pada Akta Pendirian Nomor 15 oleh Notaris Denpasar tanggal akta 19 Februari 2014;
- Bahwa Pengurus PT Jaya Bali Sejahtera menurut akta menurut Akta Pendirian dan data pada Dirjen Pajak adalah Elvin Rudianto Sitorus sebagai Direktur, Hartoyo sebagai Komisaris dan I Made Sudaris sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa Undang-Undang KUP penanggung jawab dari wajib pajak badan adalah pengurus;
- Bahwa Kewajiban perpajakan PT Jaya Bali Sejahtera secara umum adalah PPH Pasal 21, PPH Pasal 23, PPH Pasal 25, PPH Pasal 15, PPH Pasal 26, PPH Pasal 4 ayat (2), PPH 19, dan karena yang bersangkutan telah dikenakan Pengusaha Kena Pajak ada kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjuala barang mewah;
- Bahwa Bidang usaha PT Jaya Bali Sejahtera sesuai data dalam sistem adalah konstruksi bangunan elektrikal;
- Bahwa berdasarkan data PT Jaya Bali Sejahtera sudah melakukan kegiatan usaha dibuktikan dengan faktur pajak yang pernah dibuat;

Halaman 41 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak PT Jaya Bali Sejahtera ada yang dilaporkan yaitu masa November dan Desember 2015 serta ada yang tidak dilaporkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui faktur pajak PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera bertransaksi dengan perusahaan diantaranya adalah PT Amerta, Garuda Adi Mitra Indonesia, Bali Sunrise Beach, Graha Gemilang, Bina Bangun Perkasa, Bali Nusa Dewata Village, Kalapindo Laksa Anugrah;
- Bahwa pada tahun 2015 PT Jaya Bali Sejahtera sudah melaporkan PPN yaitu SPT PPN masa Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2015 serta SPT PPN masa Oktober dan Desember 2015, Untuk tahun 2016 yang dilaporkan hanya masa Januari 2016;
- Bahwa yang dilaporkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, November dan Desember 2017, kemudian pada tahun 2016 hanya bulan Januari;
- Bahwa karena definisinya faktur pajak PPN sudah dipungut oleh PT Jaya Bali Sejahtera selaku wajib pajak, tetapi pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa Berdasarkan data saksi selain bulan Januari 2017 ada faktur pajak yaitu di bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober tetapi yang dilaporkan hanya bulan Januari saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari data bahwa ada faktur pajak yang belum dilaporkan, yang wajib dilaporkan tetapi belum dilaporkan, yaitu di masa September dan Oktober Tahun 2015;
- Bahwa Yang dilaporkan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli adalah SPT Nihil;
- Bahwa Ada yang wajib disetor oleh PT Jaya Bali Sejahtera untuk satu tahun masa Februari sampai dengan Juni 2015, September dan Oktober 2015 nilai yang belum dilapor mencapai Rp.1.112.913.305,-;
- Bahwa tahun 2016 berapa nilai yang wajib disetor PT Jaya Bali Sejahtera, Nilai total merahan pada tahun 2016 yaitu Rp.4.187.512.290;
- Bahwa Nihil artinya pada masa yang bersangkutan tidak ada pajak yang kurang dibayar;
- Bahwa dri data ada yang harus dibayar oleh PT Jaya Bali Sejahtera, tetapi dilaporkan Nihil adalah tidak boleh;
- Bahwa Untuk angka 11 juta dalam BAP itu selisih antara pajak yang sudah dipungut dengan pajak yang sudah dibayar;
- Bahwa PPN adalah pajak yang dipungut dari lawan transaksi;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera terdaftar di kantor pajak pratama Badung Utara;

Halaman 42 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai data kedudukan PT Jaya Bali Sejahtera yaitu di Perumahan Dalung Permai bloo nn no 50 kecamatan kuta utara badung bali;
- Bahwa pada tahun 2015 PPN yang telah dipungut PT Jaya Bali Sejahtera dari PT Bina Bangun Perkasa sebesar 54 juta merupakan salah satu faktor pajak yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke negara;
- Bahwa keterangan di BAP sesuai dengan keterangan sekarang;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera belum melaprkan SPT masa September dan Oktober 2015 kemudian masa Maret sampai Juni 2016, Agustus dan Oktober tahun 2016, dan wajib pajak melaporkan SPT yang tidak benar untuk masa Februari sampai Juni 2015;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera pada tahun 2016 tidak melapor SPT dari Maret sampai Juni dan Agustus sampai Oktober 2016;
- Bahwa jumlah PPN yang tidak disetorkan tahun 2015 dan 2016 bisa saksi hitung tetapi tidak membawa alat hitung;
- Bahwa Jadi setelah wajib pajak menerbitkan faktur dan memungut ppn dari contohnya dari Garuda Adi Marta seharusnya wajib pajak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke negara;
- Bahwa Faktur pajak bukan bukti pemungutan PPN, seharusnya PT Jaya Bali Sejahtera wajib menyetorkan PPN ke negara;
- Bahwa Kerugian negara saksi tidak memiliki wewenang untuk menghitungnya;
- Bahwa seluruhnya merupakan kerugian negara, tapi saksi tidak bisa menghitung karena ada pokok dan sanksi jadi ada orang yang lebih berwenang untuk itu;
- Bahwa pihak Kantor Pajak Pratama Badung Utara sudah melakukan pendekatan atau himbauan kepada PT Jaya Bali Sejahtera untuk menyetorkan PPN yang sudah dipungut;
- Bahwa Bentuk pendekatan dari Kantor Pajak kepada PT Jaya Bali Sejahtera yaitu mengirimkan surat, kunjungan dan konseling;
- Bahwa kantor pajak telah melakukan himbauan kepada PT Jaya Bali Sejahtera untuk surat sebanyak 2 kali, kunjungan 1 kali dan konseling 1 kali;
- Bahwa saat melakukan kunjungan, Saksi menemui bagaian Arsitek bernama Riki Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan Riki Sitorus, apakah ia mewakili PT atau tidak;
- Bahwa Saat itu hanya penyampaian surat yang berisi PT Jaya Bali Sejahtera harus melakukan kewajibannya;

Halaman 43 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunjungan dilaksanakan pada 24 Januari 2017 kemudian ada respon yang diberikan oleh pak Hartoyo sebagai karyawan dan tercatat sebagai komisaris PT Jaya Bali Sejahtera kemudian kami buat berita acara konseling sebagai respon atas surat yang diberikan, niat untuk membayarkan ada sesuai dengan Berita Acara yaitu wajib pajak akan melakukan pembetulan SPT masa PPN sebelum tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT Jaya Bali Sejahtera tidak pernah dilakukan pembayaran pajak terhutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudaris, hanya bertemu dengan karyawan;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera terdaftar sebagai wajib pajak Sejak 19 Maret 2014;
- Bahwa Saksi harus melihat sistem karena yang saksi siapkan hanya tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa Saksi menggunakan tiga aplikasi yang pertama bernama Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak sebagai awal analisis berkitan dengan SPT yang pernah dilaporkan oleh Wajib Pajak, kemudian aplikasi Konfirmasi Pajak Pengeluaran dan Pajak Pemasukan, disana terlihat yang sudah dilaporkan atau yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan yang sudah ataupun yang belum oleh lawan transaksi kemudian Aplikasi E-Faktur adalah aplikasi yang menampilkan faktur yang pernah dibuat oleh wajib pajak;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali mendaftar sebagai wajib pajak tidak langsung mendaftar PKP, pengukuhan PKP 23 September 2014;
- Bahwa berdasarkan histori pelaporan PT Jaya Bali Sejahtera pernah melapor online;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah langsung dibayarkan pajak PPN sebesar 10% Dari pihak lawan transaksi setelah mendapatkan faktur dan mendapatkan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek data antara data tertulis dengan perusahaan lawan transaksi PT Jaya Bali Sejahtera dan data berdasarkan sistem;
- Bahwa saksi berusaha menemukan Terdakwa karena seperti yang tercatat pertama kali alamat PT Jaya Bali Sejahtera di perumahan dalung permai blok nn No.50 tetapi diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di Jalan Tirta Bayu Dalung No.9;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yang bertemu adalah AR sebelumnya;

Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidak melaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akan mengkonfirmasi ke klien;
- Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera keseluruhan belum dihitung;
- Bahwa Terkait self assesment dalam prosedur kami menghimbau dan mengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukan bukan self assesment, wajib pajak memungut pajak orang lain kemudian menyetor dan melaporkan pungutan;
- Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihat transaksi dengan pihak-pihak lawan dan disana juga terlihat mana PPN yang sudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawan transaksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan transaksi;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti bahwa pihak lawan transaksi telah membayar pajak PPN;
- Bahwa melaporkan dan membayar SPT yang telah lewat bisa secara sistem;
- Bahwa ada denda berjalan karena telah lewat batas waktu;
- Bahwa Tidak pernah sama sekali melakukan pembetulan SPT maupun pembayarannya setelah konseling;
- Bahwa akibat hukum dari pihak lawan apabila Terdakwa tidak membayar Diatur dalam UU KUP sanksinya pidana ancama sampai dengan 6 tahun;
- Bahwa Faktur pajak artinya bukti pemungutan PPN kepada lawan transaksi, bukan bukti pembayaran ke negara;
- Bahwa Faktur pajak dibuat dua rangkap yaitu oleh lawan dan penerbit;
- Bahwa tidak dimungkinkan terkait faktur pajak PPN yang belum dibayarkan oleh Pihak lawan transaksi tetapi dimintakan wajib pajak;
- Bahwa Tidak pernah ada seperti Contoh PT Adi Matra menyatakan bahwa dari bukti faktur pajak bahwa ia sudah dipotong PPN, saat sakai meminta keterangan PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa Tidak ada data yang diberikan PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa Tidak ada akibat hukum yang disampaikan pada waktu proses konseling;
- Bahwa dalam proses konseling bisa disampaikan akibat hukum;
- Bahwa menjadi kewenangan saksi menyampaikan akibat hukum kepada terdakwa termasuk resiko pidana, saksi tidak menyampaikan karena ada amnesti pajak, wajib pajak dihimbau untuk melunasi pokoknya dan mengikuti

Halaman 45 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program amnesti pajak dan ada itikad untuk melakukan pembetulan sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;

- Bahwa konseling yang saksi lakukan kepada PT Jaya Bali Sejahtera hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak sempat menyampaikan resiko pidana;
- Bahwa saksi masih sebagai pengawas, namun perkembangan tidak otomatis mengetahui, saksi mengetahui secara umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyerahkan dua buah sertifikat asli;
- Bahwa Dalam kasus ini tidak langsung ada kerugian dari lawan transaksi karena lawan transaksi telah menggunakan faktur pajak yang diperoleh oleh penerbit sebagai kredit pajak, kerugian tetap ada pada negara;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kewajiban perpanajak kepada PT Jaya Bali Sejahtera pada saat konseling karena ada kebijakan pemerintah tentang amnesti pajak maka tidak ada kewajiban saksi untuk menyampaikan akibat hukum;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga diketahui perbuatan Terdakwa Dari Kepala Kantor Perpajakan Pratama Badung Utara;
- Bahwa Dasar pelaporan dari data faktur pajak yang sudah dikreditkan oleh lawan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan, terlihat dari sistem;
- Bahwa seluruh perusahaan seperti itu asal sudah tercatat;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung kerugian negara ada ahli yang berwenang;
- Bahwa Dari direktorat jendral pajak tidak bisa menilai suatu perusahaan sehat atau tidak, perusahaan masih bisa melakukan pembayaran pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Masalah pelaporan pajak Terdakwa tidak mengetahui karena ada staf khusus yang mengurus;
- Masalah konseling tidak benar, Terdakwa secara pribadi tidak pernah mendapat pelaporan amnesti baik langsung secara tidak langsung dari pihak pajak;
- Proses pelaporan SPT nihil Terdakwa tidak paham;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menanggapi sebagai berikut:

- Konseling terhadap pak Hartoyo bukan Terdakwa;

2. **Saksi I Cening Sumantri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

Halaman 46 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi secara umum mencari data, mengolah data dan menyajikan data;
 - Bahwa Saksi tahu PT Jaya Bali Sejahtera adalah wajib pajak dari sistem;
 - Bahwa saksi tahu kewajiban perpajakan dari PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa Pelaporan PPN dari PT Jaya Bali Sejahtera saksi tidak tahu, tetapi jumlah pembayarannya bisa saksi liat di aplikasi;
 - Bahwa Pada tahun 2015 menurut Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak, PT Jaya Bali Sejahtera menyetor senilai Rp.114.545.321,- secara keseluruhan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember selama satu tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Jaya Bali Sejahtera pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni melaporkan SPT yang jumlahnya nihil karena bukan kewenangan saksi;
 - Bahwa di aplikasi hanya pembayaran, terlihat hanya gelondongan, kode jenis pembayarannya;
 - Bahwa untuk PPN tahun 2015 ada pembayaran senilai Rp.111.578.065;
 - Bahwa Pada tahun 2016 PT Jaya Bali Sejahtera tidak ada menyetorkan PPN, hanya ada setoran Pasal 21;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelaporan SPT;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;
3. **Saksi Syahrul Misbah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi di kantor pajak sebagai kepala seksi pelayanan;
 - Bahwa secara keseluruhan tugas saksi adalah mengadministrasikan laporan-laporan yang dilaporkan oleh wajib pajak dan mencetak produk hukum yang dihasilkan seksi terkait;
 - Bahwa saksi tahu PT Jaya Bali Sejahtera didalam sistim informasi memiliki NPWP 666890439906000 terdaftar tanggal 19 Maret 2014; pada tanggal 23 September 2014 mengajukan sebagai PKP;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera memiliki Direktur bernama Elfin Rudianto Sitorus, komisaris Utama bernama I Made Sudaris;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera pada tahun 2015 melapor dibulan januari , dibulan yang sama ada pembetulan kesatu dari tadinya nihil menjadi lebih bayar sebesar Rp.1.218.280,- kemudian bulan Februari melapor nihil, kemudian Maret, Mei dan Juni Nihil;

Halaman 47 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya lapor di bulan Januari yang menyatakan lebih bayar Rp.84.569.636,- untuk bulan selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sebagai PKB setiap transaksi terutang PPN, setiap transaksi ada kewajiban membayar PPN;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah PPN yang telah diterima PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa saksi melihat hanya status SPT saja apakah nihil, lebih bayar atau kurang bayar;
- Bahwa yang menandatangani SPT adalah direktur yaitu Elfin Rudianto Sitorus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

4. **Saksi Sumarjianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan kantor secara perusahaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Accounting Supervisor PT BALI Nusadewata Village;
- Bahwa nilai kontrak kami dengan PT JBS adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kontrak tersebut sudah selesai;
- Bahwa nilai kontrak tersebut hanya untuk pekerjaan;
- Bahwa ada pajak PPN sebesar 10% dari nilai transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membayar pajak PPN sebesar 10% dari nilai transaksi;
- Bahwa Ada bukti transfer sebagai bukti telah dibayarnya PPN tersebut;
- Bahwa di sistem perusahaan kami menerima invoice setelah itu kami periksa apakah sesuai atau tidak kemudian kami melakukan pembayaran;
- Bahwa invoice itu sebagai kwitansi;
- Bahwa saksi pernah melihat faktur pajak pada transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi membayar dengan cara transfer;
- Bahwa Saksi membayar kontrak tersebut ke rekening Elfin Rudianto Sitorus;
- Bahwa Transaksi tersebut tidak dibayarkan ke rekening PT Jaya Bali Sejahtera karena sesuai invoice ke rekening Elfin Rudianto Sitorus;
- Bahwa saksi mendapat faktur pajak dari PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa faktur pajak dari PT Jaya Bali Sejahtera digunakan sebagai dokumen;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Elfin Rudianto Sitorus;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pajak yang telah dipungut oleh PT JBS telah disetorkan kepada negara;
- Bahwa Saksi membayar secara transfer DPP dan PPN sesuai dengan invoice;

Halaman 48 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti pembayaran;
- Bahwa ada kewajiban terdakwa untuk menyetor ke negara tetapi sudah disetor atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah menyetorkan pajak yang telah dipungut kepada negara;
- Bahwa jabatan saksi adalah Accounting Supervisor;
- Bahwa Kontrak perusahaan saksi dengan PT Jaya Bali Sejahtera adalah mengenai pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection dan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing;
- Bahwa kerjasama perusahaan saksi dengan PT Jaya Bali Sejahtera Pembuatan ruang tunggu Gate A2 di Bali Collection;
- Bahwa pembayaran sesuai dengan kontrak yaitu ada DP dan pelunasan, setiap pembayaran ada faktur pajak yang dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. **Saksi Ir. Latif Jailani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Financial Controller PT Amertha;
- Bahwa nilai kontrak perusahaan kami dengan PT JBS adalah sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kontrak tersebut sudah selesai;
- Bahwa ada pajak yang sudah dibayar oleh Perusahaan saksi yaitu PPN sebesar 10%;
- Bahwa nilai kontrak sudah termasuk PPN;
- Bahwa ada tanda terima berupa faktur pajak;
- Bahwa perusahaan saksi membayar dengan cek;
- Bahwa Made Sudaris yang menerima cek;
- Bahwa yang menandatangani kontrak yaitu I Made Sudaris dari pihak PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa faktur pajak dari PT JBS digunakan bukti sudah bayar pajak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudaris;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pajak yang telah dipungut oleh PT JBS telah disetorkan kepada negara;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Financial Controller;

Halaman 49 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Material dan Peralatan Pekerjaan Elektronika pada Proyek Pembangunan YAN'S HOUSE HOTEL berupa pemasangan CCTV, TV, telepon dan sebagainya;
 - Bahwa Nilai kontrak perusahaan saksi dengan PT JBS adalah senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ingat, pembayaran sudah banyak kali dilakukan;
 - Bahwa dalam pembayaran kontrak tersebut sudah termasuk PPN;
 - Bahwa setiap kali melakukan pembayaran saksi menerima faktur pajak;
 - Bahwa Penandatanganan kontrak pada tahun 2014;
 - Bahwa Pengerjaan proyek dimulai tahun 2015;
 - Bahwa ada disampaikan bahwa harga barang-barang naik namun tetap pada nilai kontrak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
6. **Saksi Djoko Purnama, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Financial Accounting Manager pada PT Bali Sunrise Beach;
 - Bahwa perusahaan saksi memiliki kontrak dengan PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa nilai kontrak perusahaan saksi dengan PT JBS adalah sebesar RP.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa nilai kontrak tersebut sudah selesai;
 - Bahwa nilai kontrak tersebut sudah termasuk pajak PPh final 4%;
 - Bahwa Cara saksi melakukan pembayaran yaitu transfer ke rekening BCA Elfin Rudianto Sitorus sesuai dengan invoice;
 - Bahwa Tidak pernah transfer ke rekening I Made Sudaris;
 - Bahwa Karena PT Sunrise Bali Beach sudah termasuk dalam perusahaan kena pajak yang diwajibkan untuk melaporkan PPN, Faktur pajak dari PT JBS digunakan sebagai kredit masukan;
 - Bahwa Yang menandatangani kontrak adalah Elfin Rudianto Sitorus;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa pajak yang telah dipungut oleh PT JBS telah disetorkan kepada negara;
 - Bahwa jabatan saksi adalah Financial Accounting Manager;
 - Bahwa Kontrak tentang kelistrikan berupa mechanical electrical;
 - Bahwa nilai kontrak perusahaan saksi dengan PT JBS adalah RP.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak perusahaan saksi dengan PT JBS tentang pengerjaan kelistrikan di suatu bangunan yang dikerjakan oleh perusahaan saksi;
- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan termin dan progres pekerjaan berdasarkan invoice yang terdiri dari DPP dan PPN, setiap tagihan ada faktur pajak;
- Bahwa setiap invoice ada faktur pajak jadi kewajiban kami untuk membayar pajak sudah kami lakukan dan ada kwitansi pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. **Saksi Harmanto Darmali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi sebagai pemberi tugas untuk pekerjaan pembangunan Ruko Drupadi Corner;
- Bahwa ada kontrak antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kontrak tersebut ada pajak;
- Bahwa Setiap termin tagihan ada pajak PPN sebesar 10% yang dipungut;
- Bahwa Pajak diterima oleh Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa kami ada faktur pajak dan invoice;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara bertahap/termin melalui transfer bank;
- Bahwa saksi transfer ke nomor rekening sesuai dengan tagihan;
- Bahwa Nilai kontrak awal adalah Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa membuat kontrak sekitar tahun 2015;
- Bahwa jabatan Made Sudaris sebagai direktur;
- Bahwa dalam kontrak sudah biasa setiap transaksi dikenakan PPN;
- Bahwa Pembayaran pertama DP pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kalau tidak salah belasan kali seingat saksi sekitar 15 kali;
- Bahwa Saksi mengirim pembayaran kontrak sesuai dengan tagihan yang diterima saksi;
- Bahwa detail angka dan tanggal sesuai dengan BAP;
- Bahwa setiap tagihan nilai proyek sudah ditambah dengan PPN 10%;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak yang telah saksi bayar sudah atau belum disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 51 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara saksi dengan Terdakwa adalah kerjasama pembangunan ruko;
- Bahwa Lokasi pembangunan ruko di Jalan Drupadi Seminyak Bali;
- Bahwa kerjasama dari perancangan struktur hingga selesai;
- Bahwa ruko yang dibangun sekitar 18 unit;
- Bahwa Selain kontrak ada SPK;
- Bahwa saksi tidak ingat persis tanggal kontrak ditandatangani sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa kerjasama saksi dengan PT Jaya Bali Sejahtera melalui tender;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera membeli sebuah ruko tetapi itu adalah sesuatu yang terpisah;
- Bahwa Harga ruko yang dibeli PT Bali Jaya Sejahtera sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa Pembelian ruko dikenakan PPN sama sebesar 10%;
- Bahwa Pembayaran yang kami lakukan sesuai dengan termin pembayaran tapi sebagai pembeli PT JBS ada kewajiban untuk mengangsur jadi itu sifatnya terpisah;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali sekitar belasan kali, pembayaran dari PT JBS untuk satu unit ruko;
- Bahwa Kami menerbitkan faktur pajak untuk pembelian ruko oleh PT JBS karena kami memungut PPN;
- Bahwa setiap angsuran diterbitkan faktur pajak;
- Bahwa proyek kerjasama PT Graha Gemilang dengang PT Jaya Bali Sejahtera sudah selesai 100% tetapi didalam perjalanan ada pekerjaan yang kami kerjakan sendiri jadi ada pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang mempengaruhi nilai kontrak awal;
- Bahwa Saksi mempunyai catatan posisi terakhir nilai pekerjaan tambah kurang yang terakhir dan sesuai nilai yang kami bayarkan;
- Bahwa nilai pekerjaan tambah kurang tidak sama dengan nilai kontrak awal, intinya sesuai dengan nilai tagihan-tagihan yang ditotal;
- Bahwa tidak sama nilai kontrak nilai Rp.20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan total 15 kali pembayaran termin;
- Bahwa pekerjaan dikurangi dan ada yang ditambah hal itu biasa dalam proyek;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total pembayaran termin;
- Bahwa pembelian ruko sudah dilunasi oleh PT Jaya Bali Sejahtera namun dalam perjalanan dijual kembali kepada pihak lain;

Halaman 52 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 8. **Saksi Rina**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bina Bangun Perkasa;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur Keuangan PT Bina Bangun Perkasa yang salah satu tugasnya melakukan pembayaran;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT Jaya Bali Sejahtera karena kami telah bekerja sama dalam proyek di Kupang;
 - Bahwa PT Bina Bangun Perkasa hanya 1 (satu) kali bekerja sama dengan PT Jaya Bali Sejahtera hanya pada proyek di Kupang;
 - Bahwa Dua perjanjian itu untuk satu proyek;
 - Bahwa yang menandatangani dari pihak PT Bina Bangun Perkasa adalah project manager;
 - Bahwa Direktur Utama PT Jaya Bali Sejahtera adalah Elfin Rudianto Sitorus;
 - Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT Bina Bangun Perkasa dengan PT Jaya Bali Sejahtera adalah proyek elektrik dan konstruksi;
 - Bahwa PT Bina Bangun Perkasa pernah melakukan pembayaran kepada PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa sebelum PT Bina Bangun Sejahtera melakukan pembayaran PT Jaya Bali Sejahtera terlebih dahulu mengirimkan faktur pajak dan invoice;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera mengirimkan faktur pajak atau Invoice kepada PT Bina Bangun Perkasa lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa nilai kontrak antara PT Bina Bangun Sejahtera dengan PT Jaya Bali Sejahtera kurang dari Rp.2.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bahwa nilai kontrak seluruhnya sudah dibayar;
 - Bahwa kontrak sudah selesai seuruhnya;
 - Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer;
 - Bahwa pembayaran ditransfer ke rekening Elfin Rudianto Sitorus;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa kali transfer sekitar 5 kali sesuai dengan BAP;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran sesuai dengan invoice;
 - Bahwa nilai kontrak yang sudah saksi bayar termasuk juga PPN;
 - Bahwa nilai PPN sebesar 10% dari nilai transaksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat karena pembayaran dilakukan berdasarkan invoice;
 - Bahwa pembayaran dilakukan sekitar tahun 2015;
 - Bahwa faktur pajak dikeluarkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa dikontrak sudah tercantum berapa nilai PPN yang harus dibayarkan karena sudah sesuai saksi bayar sesuai invoice yang dikirimkan;

Halaman 53 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rekening perusahaan atau pribadi tempat melakukan pembayaran sesuai invoice;
 - Bahwa kontrak tersebut bukan untuk kepentingan perusahaan saksi;
 - Bahwa kontrak tersebut sebenarnya hanya satu pekerjaan namun ditambah diluar kontrak awal jadi kami membuat perjanjian baru dan pembayaran sesuai invoice;
 - Bahwa setiap invoice disertakan faktur pajak;
 - Bahwa yang membuat SPK adalah PR saksi yang berada di Kupang;
 - Bahwa ada jeda waktu kurang lebih tiga bulan setelah penandatanganan kontrak untuk mempersiapkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu PPN yang telah saksi bayar sudah disetorkan kepada negara atau belum;
 - Bahwa saksi tahu setiap transaksi ada PPN;
 - Bahwa perusahaan saksi yang wajib untuk melakukan pembayaran PPN;
 - Bahwa saksi membayarkan PPN kepada PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah disetorkan tapi dengan sistim pajak yang sekarang sudah bisa dilihat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
9. **Saksi I Made Sudaris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan Saksi di PT Jaya Bali Sejahtera adalah sebagai Komisaris Utama;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor untuk mekanikal elektrikal dan konstruksi;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera berdiri sejak tahun 2014;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sudah terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sudah memiliki Noomor Pokok Wajib Pajak;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera rutin menyampaikan SPT masa PPN ke Kantor Pajak sebelum perusahaan mengalami kerugian;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera setelah mengalami kerugian fokus untuk mengerjakan proyek agar selesai;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah melakukan kerjasama dengan PT Graha Gemilang, PT Bali Sun Rise Beach, PT Bali Nusa Dewata Village, PT Amerta, PT Alkindo Selaksa Anugerah, PT Bina Bangun Perkasa, PT Garuda Adi Matra Indonesia;

Halaman 54 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah menerima pembayaran PPN dari perusahaan-perusahaan lawan transaksi kecuali dari PT Garuda Adi Matra Indonesia belum diterima dan PT Anugerah Gemilang hanya 80%;
- Bahwa perusahaan-perusahaan lawan transaksi PT JAYA BALI SEJAHTERA kecuali PT Garuda Adi Matra Indonesia tersebut telah melakukan pembayaran PPN;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tetapi Saksi tidak tahu berapa totalnya karena ada yang disetorkan dan ada yang belum disetorkan;
- Bahwa saksi pernah menerima langsung PPN dari perusahaan-perusahaan lawan transaksi PT Jaya Bali Sejahtera, salah satunya dari PT Amerta;
- Bahwa Jumlah PPN yang saksi terima dari PT Amerta sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menyetorkan PPN tersebut ke Kantor Pajak karena sudah di subkan kepada supplier lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik pajak adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Jayadi;
- Bahwa Lalu Jayadi dari PT Amerta;
- Bahwa Saksi telah menerima PPN termasuk pembayaran dari PT Amerta;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera mengikat kontrak dengan PT Amerta pada tahun 2014;
- Bahwa Pengerjaan untuk proyek PT Amerta adalah akhir 2015;
- Bahwa ada selisih harga yang cukup tinggi kontrak dengan harga pembelian barang-barang;
- Bahwa proyek dengan PT Amerta sudah selesai;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sekarang sudah vakum sejak tahun 2017;
- Bahwa Selain kewajiban pajak ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh PT Jaya Bali Sejahtera seperti hutang supplier dan hutang bank;
- Bahwa Jumlah hutang PT Jaya Bali Sejahtera sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk keterangan yang menyatakan saksi dengan sengaja tidak membayar pajak adalah tidak benar, saksi tidak ada niatan untuk tidak membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak membayar pajak karena perusahaan collapse;
- Bahwa Saksi beritikad baik dengan menyerahkan dua aset tanah kepada Kantor Pajak;

Halaman 55 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dibuatkan berita acara serah terima penyerahan dua sertifikat tanah kepada Kantor Pajak;
 - Bahwa dua aset tanah tersebut jika per are nilainya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka nilai total keseluruhan aset tersebut adalah sekitar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
10. **Saksi Eni**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan akunting pada PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH yang bertugas menginput data akuntansi seperti data kas dan bank, serta membuat laporan keuangan.
 - Bahwa PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH bergerak dalam bidang industri makanan yaitu *bakery* atau roti dengan merk BREADTALK
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. JAYA BALI SEJAHTERA sebagai mitra kerja dari PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH tetapi yang menunjuk adalah pihak MALL BALI GALERIA. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Direktur PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH yaitu ROBERT SUTEJA
 - Bahwa PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH bermitra dengan PT. JAYA BALI SEJAHTERA dalam hal pekerjaan *Grease Trap* TOKO BREADTALK MALL BALI GALERIA BALI
 - Bahwa pekerjaan untuk kepentingan PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH yang melakukan penunjukan *vendor* adalah pihak dari MALL BALI GALERIA Karena itu adalah permintaan dari MALL BALI GALERIA yang telah mempersiapkan *vendor* untuk mengerjakan pekerjaan itu
 - Bahwa kontrak atau perjanjian kerja antara PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH dengan PT JAYA BALI SEJAHTERA berdasarkan Perjanjian Kerja Kontraktor ME GREASE TRAP nomor : 003/IE/ME/BT-GAL/V/16-PRJ dengan nilai sebesar Rp 95.700.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN
 - Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh ROBERT SUTEJA sebagai Direktur PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH dan I MADE SUDARIS sebagai pihak yang mewakili PT JAYA BALI SEJAHTERA
 - Bahwa pembayaran kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA telah dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada saat pemberian Uang Muka sebesar 50% dan pada saat progres telah mencapai 100%. Atas pembayaran itu PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH melakukan pemotongan PPh final 4% (empat persen)

Halaman 56 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai bersih yang dibayarkan kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA setelah dikurangi PPh FINAL adalah sebesar Rp 93.083.000 dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp 46.541.500,-
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH melalui pemindahbukuan dari rekening CIMB NIAGA no rekening 800073075600 atas nama PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH ke rekening BCA DENPASAR nomor 1420271375 atas nama I MADE SUDARIS sebesar : Rp 46.541.500,- pada tanggal 13 Juni 2016 dan sebesar Rp 46.541.500,- pada tanggal 15 Agustus 2016
- Bahwa terhadap transaksi dengan pembuatan *Grease Trap* dengan PT JAYA BALI SEJAHTERA telah dipungut PPN sebesar Rp 8.700.000 pada tahun 2016 bersamaan dengan pembayaran yang kami lakukan dengan bukti pemungutan PPN berupa FAKTUR PAJAK yang diberikan PT JAYA BALI SEJAHTERA sebagai berikut :

No. FakturPajak	Tgl. FakturPajak	DPP	PPN
010.031-16.02833425	31 Mei 2016	43.500.000	4.350.000
010.031-16.02833433	24 Juni 2016	43.500.000	4.350.000
Jumlah		87.000.000	8.700.000

- Bahwa untuk Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833425 telah dilaporkan pada SPT MASA PPN PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH masa pajak MEI 2016 sedangkan Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833433 dilaporkan pada SPT MASA PPN PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH masa pajak JULI 2016;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui nomor rekening PT. JAYA BALI SEJAHTERA yang digunakan untuk bertransaksi dengan PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH adalah Rekening Bank BCA Denpasar 142-027-1375 an. I MADE SUDARIS;
 - Bahwa pekerjaan *Grease Trap* TOKO BREADTALK MALL BALI GALERIA sudah selesai dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada bulan Juni 2016;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
11. **Saksi Gunardi**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan *Tax Department Head* di PT. ALAM SUTERA REALTY sebagai induk perusahaan dari PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA, tugas Saksi mengurus semua urusan pajak, *tax compliance* dan *tax administration*. Wewenang Saksi adalah melakukan *approve* , memeriksa dan memastikan

Halaman 57 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak dan semua kewajiban perpajakan grup PT. ALAM SUTERA REALTY

- Bahwa PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA bergerak dalam bidang pariwisata, berupa taman budaya atau *culture park* dan mengembangkan kegiatan pariwisata, kawasan wisata yang kami miliki dan kami kelola adalah GARUDA WISNU KENCANA (GWK) di Bali serta VILLA ACALA di Ungasan Bali
- Bahwa PT. JAYA BALI SEJAHTERA sebagai pelaksana pembangunan salah satu VILLA ACALA milik PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA
- Bahwa PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA berhubungan dengan PT. JAYA BALI SEJAHTERA hanya hubungan pekerjaan yaitu menjadi pelaksana dari pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan MEP ACALA Villa (Type Angsoka) di Ungasan Bali
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan MEP adalah pekerjaan untuk membangun suatu bangunan termasuk instalasi listrik
- Bahwa lokasi proyek pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan MEP Villa Acala yang dikerjakan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah di daerah Ungasan Bali dekat dengan kompleks GARUDA WISNU KENCANA (GWK) Bali
- Bahwa proses kerjasama antara PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA dengan PT. JAYA BALI SEJAHTERA dilakukan dengan proses tender
- Bahwa sebagai pengikatan kerjasama dengan PT. JAYA BALI SEJAHTERA adalah Surat Perintah Kerja nomor : 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, atas pekerjaan pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan MEP ACALA Villa (Angsoka) di GWK Ungasan Bali, dengan nilai pekerjaan Rp. 1.890.985.618,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) nilai PPN 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 189.098.561,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. 2.080.084.179,- (dua milyar delapan puluh juta delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Waktu pelaksanaan pekerjaan 8 (Delapan) bulan sesuai SPK dari penunjukan tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Surat Perintah Kerja nomor : 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 adalah dari pihak PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA adalah SENO ANDHIKAWANTO selaku Operational Direktur dan JOSEPH SANUSI TJONG selaku Direktur. Dari pihak PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah I MADE SUDARIS selaku DIREKTUR

Halaman 58 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan MEP ACALA Villa (Angsoka) di GWK Ungasan Bali berdasarkan SPK Surat Perintah Kerja nomor : 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 tidak terselesaikan hanya sampai termin ke 5 (kelima) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, tetapi sudah ditinggalkan oleh PT. JAYA BALI SEJAHTERA, saat ini pekerjaan yang ditinggalkan oleh PT. JAYA BALI SEJAHTERA dilanjutkan oleh pihak lain sehingga pembayarannya pun tidak sesuai yang ada dalam kontrak
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa PT JAYA BALI SEJAHTERA meninggalkan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama karena tugas Saksi hanya di bagian keuangan saja mengenai pembayaran-pembayaran
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA kepada PT. JAYA BALI SEJAHTERA terhadap pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 adalah sebagai berikut :

Tanggal	JumlahRp	Keterangan
15 Mei 2015	130.373.519,-	pembayaran berupa bukti pengiriman uang Formulir Multiguna CIMB Niaga Syariah dari rekening PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA nomor rekening 190-01-00365-00-8 no ceque 2451681 ke Rekening PT. JAYA BALI SEJAHTERA rekening BCA 6115211114.
29 Juni 2015	183.050.215,-	pembayaran berupa bukti pengiriman uang Formulir Multiguna CIMB Niaga Syariah dari rekening PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA nomor rekening 190-01-00365-00-8 no ceque 2451553 ke Rekening PT. JAYA BALI SEJAHTERA rekening BCA 6115211114.
29 Juni 2015	165.638.235,-	pembayaran berupa bukti pengiriman uang Formulir Multiguna CIMB Niaga dari rekening PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA nomor rekening 190-01-00365-00-8 no ceque 2451640 ke Rekening PT. JAYA BALI SEJAHTERA rekening BCA 6115211114.
22 September 2015	149.011.054,-	pembayaran berupa bukti pengiriman uang Formulir Multiguna CIMB Niaga dari

Halaman 59 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rekening PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA nomor rekening 190-01-00365-00-8 no ceque 2451738 ke Rekening PT. JAYA BALI SEJAHTERA rekening BCA 6115211114.
22 September 2015	107.286.705,-	pembayaran berupa bukti pengiriman uang Formulir Multiguna CIMB Niaga dari rekening PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA nomor rekening 190-01-00365-00-8 no ceque 2509861 ke Rekening PT. JAYA BALI SEJAHTERA rekening BCA 6115211114.
Jumlah	735.359.728,-	

- Bahwa sebelum PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA melakukan pembayaran, PT JAYA BALI SEJAHTERA terlebih dahulu mengirimkan FAKTUR PAJAK dan INVOICE dalam rangka penagihan termin FAKTUR PAJAK dan INVOICE yang kami terima dari PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah sebagai berikut :

No.	Invoice	Tgl.	DPP	PPN
Faktur Pajak		Faktur Pajak		
010.001.15.13796542	1-012/JBS/IN-PRG/III/2015	02 April 2015	134.436.617,-	13.443.662,-
010.001.15.13796545	1-013/JBS/IN-PRG/IV/2015	23 April 2015	188.711.562,-	18.871.156,-
010.001.15.13796547	1-015JBS/IN-PRG/V/2015	20 Mei 2015	170.761.067,-	17.076.107,-
010.001.15.13796553	1-017/JBS/IN-PRG/VI/2015	25 Juni 2015	153.619.643,-	15.361.964,-
010.001.15.13796554	1-018/JBS/IN-PRG/VI/2015	29 Juni 2015	110.604.851,-	11.060.485,-
Jumlah			758.133.740,-	75.813.374,-

- Bahwa seluruh Faktur Pajak dari PT JAYA BALI SEJAHTERA ditandatangani oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS dengan jabatan yang tertera di FAKTUR PAJAK adalah sebagai DIREKTUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap pembayaran ke PT. JAYA BALI SEJAHTERA melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 3% (tiga persen) dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) yang tercantum dalam Faktur Pajak. Kami belum melakukan pembayaran PPN kepada PT. JAYA BALI SEJAHTERA karena kami tidak menerima konfirmasi dari pihak PT. JAYA BALI SEJAHTERA bahwa mereka telah melaporkan dan menyetorkan kewajiban PPN tersebut
 - Bahwa konfirmasi yang dimaksud adalah adanya bukti setor dari pihak kontraktor bahwa pajaknya telah disetor terlebih dahulu agar kami tahu bahwa pajak tersebut benar-benar telah disetorkan ke Negara
 - Bahwa PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA sudah mengkreditkan PPN yang seharusnya dipungut oleh PT. JAYA BALI SEJAHTERA. Atas PPN yang tercantum dalam setiap faktur PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA sudah kreditkan meskipun PPN belum disetorkan tetapi PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA sudah mengikuti program *Tax Amnesty* dan sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : KET-5939/PP/WPJ.17/2016 tanggal 11 Oktober 2016
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menjabat sebagai DIREKTUR PT JAYA BALI SEJAHTERA. Tapi informasi dari bagian teknik yang sering mengurus pekerjaan itu adalah ELFIN RUDIANTO SITORUS, meskipun yang menandatangani SPK adalah I MADE SUDARIS selaku Direktur dan seluruh Faktur Pajak dari PT JAYA BALI SEJAHTERA ditandatangani oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur PT JAYA BALI SEJAHTERA
 - Bahwa tidak ada transaksi usaha antara PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA dengan PT JAYA BALI SEJAHTERA selain yang telah disebutkan di atas untuk tahun 2015 s.d. 2016
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang mengaku bernama I MADE SUDARIS dan ELFIN RUDIANTO SITORUS;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
12. **Saksi Lestina Indah Ramasi Sitorus**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini adalah karyawan bagian Operator Cam pada PT BCY Indonesia Karawang, dahulu merupakan STAF ADMIN pada PT JAYA BALI SEJAHTERA dalam kurun waktu 05 Februari 2014 sampai dengan 15 Juli 2016 sesuai dengan Surat Pengalaman Kerja nomor 08/SPK-JBS/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SUDARIS selaku DIREKTUR PT JAYA BALI SEJAHTERA

Halaman 61 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS
- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan yang beralamat di Jalan Raya Dalung nomor 9 Badung, Bali
- Bahwa berdasarkan buku profil perusahaan yang pernah Saksi lihat DIREKTUR UTAMA dijabat oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS sedangkan I MADE SUDARIS menjabat sebagai DIREKTUR juga tapi Saksi lupa direktur apa
- Pemilik PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah ELFIN RUDIANTO SITORUS dan I MADE SUDARIS
- Bahwa saksi tidak tahu modal yang disetor oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS dan I MADE SUDARIS
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai STAF ADMIN pada PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Suplier, pembayaran kepada Tenaga Kerja Harian, Transaksi untuk kliring ke Bank, membuat penawaran harga, membuat FAKTUR PAJAK, bersama HARTOYO membuat dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak. Untuk mengisi SPT tidak Saksi lakukan sendiri namun dibantu dengan orang yang mengaku bernama KENYO, setelah SPT diisi dan Saksi mintakan tandatangan kemudian Saksi laporkan ke kantor pajak
- Bahwa dalam pekerjaan di PT JAYA BALI SEJAHTERA, Saksi bertanggung jawab kepada atasannya yaitu HARTOYO
- Bahwa dasar Saksi Dasar membuat FAKTUR PAJAK dan INVOICE adalah setelah adanya laporan progress dari proyek
- Bahwa saksi menerangkan proses pembuatan SPT Masa PPN PT JAYA BALI SEJAHTERA, sebagai berikut : awalnya ada Konsultan yaitu ibu KENYO untuk mengerjakan SPT PPN, SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh. Namun setelah dia keluar tidak lagi di PT JAYA BALI SEJAHTERA, Saksi yang diberi tugas untuk membuat SPT-SPT tersebut. Namun karena Saksi tidak mengerti pajak maka Saksi tetap meminta tolong ibu KENYO untuk membuatkan SPT.
- Bahwa proses pembuatan SPT PPN diawali dari pembuatan INVOICE dan FAKTUR PAJAK yang ditandatangani oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS untuk kemudian dikirim kepada rekanan dalam rangka penagihan pembayaran. Pembayaran dari rekanan itu masuk ke salah satu rekening Bank atas nama PT JAYA BALI SEJAHTERA atau rekening atas nama ELFIN RUDIANTO SITORUS atau rekening atas nama I MADE SUDARIS sesuai kesepakatan dengan rekanan.

Halaman 62 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari dokumen FAKTUR PAJAK dan INVOICE serta pembayaran yang masuk, ELFIN RUDIANTO SITORUS dan I MADE SUDARIS tahu bahwa harus ada PAJAK YANG DIBAYAR.
- Kemudian ibu KENYO membuat SPT PPN berdasarkan FAKTUR PAJAK dan INVOICE yang Saksi berikan.
- Jika ELFIN RUDIANTO SITORUS atau I MADE SUDARIS menyuruh untuk melaporkan NIHIL maka Saksi sampaikan ke ibu KENYO untuk membuat SPT NIHIL tanpa adanya pembayaran.
- Setelah SPT dicetak dan ditandatangani oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS maka selanjutnya saya melaporkan SPT PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara
- Bahwa maksud ELFIN RUDIANTO SITORUS DAN I MADE SUDARIS menyuruh untuk melaporkan NIHIL yaitu ada yang seharusnya dibayar pajaknya namun oleh ELFIN RUDIANTO SITORUS dan I MADE SUDARIS tidak dibayar sehingga SPT PPNnya diminta untuk dibuat NIHIL saja tanpa ada pembayaran
- Bahwa Saksi dan HARTOYO selalu meminta uang untuk pembayaran PPN namun kadangkala ELFIN RUDIANTO SITORUS dan/atau I MADE SUDARIS tidak memberikan hanya menyampaikan “iya nanti”
- Bahwa ada SPT MASA PPN MASA PAJAK Januari sd Desember 2015 dan Januari sd Desember 2016 yang seharusnya ada pembayaran pajaknya namun dilaporkan NIHIL tanpa adanya pembayaran. Yang memerintahkan untuk merekayasa laporan SPT PPN itu adalah ELFIN RUDIANTO SITORUS DAN I MADE SUDARIS
- Bahwa Jika I MADE SUDARIS meminta untuk merekayasa SPT MASA PPN dari yang seharusnya ada pembayaran namun dibuat menjadi tidak ada pembayaran, ELFIN RUDIANTO SITORUS mengetahui dan menyetujuinya juga, demikian pula sebaliknya
- Bahwa atas pelaporan SPT Masa PPN PT JAYA BALI SEJAHTERA Masa Pajak : FEBRUARI 2015 tanggal lapor 13 Maret 2015 dengan nilai NIHIL, MARET 2015 tanggal lapor 15 April 2015 dengan nilai NIHIL, APRIL 2015 tanggal lapor 06 Januari 2016 dengan nilai NIHIL, MEI 2015 tanggal lapor 06 Januari 2016 dengan nilai NIHIL, dan JUNI 2015 tanggal lapor 06 Januari 2016 dengan nilai NIHIL, Saksi menerangkan bahwa pelaporan atau penyampaian SPT MASA PPN tersebut merupakan SPT MASA PPN yg diisi TIDAK BENAR
- Bahwa saksi tidak ingat nilai PPN yang seharusnya dibayar dari SPT MASA PPN yang dilaporkan dengan isi yang tidak benar tersebut

Halaman 63 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Masa Pajak SEPTEMBER s.d. OKTOBER 2015, MARET s.d. JUNI 2016, dan AGUSTUS s.d. OKTOBER 2016 PT JAYA BALI SEJAHTERA tidak melaporkan SPT Masa PPN karena tidak ada uang untuk membayar pajaknya
- Bahwa saksi tidak ingat rekening mana saja yang digunakan PT JAYA BALI SEJAHTERA dalam melakukan transaksi pada tahun 2015 dan 2016. Yang diingat oleh Saksi bahwa rekening yang digunakan adalah rekening atas nama PT JAYA BALI SEJAHTERA, rekening atas nama I MADE SUDARIS dan ELFIN RUDIANTO SITORUS. Transaksi-transaksi itu adalah transaksi untuk menerima penghasilan proyek maupun untuk pengeluaran-pengeluaran perusahaan seperti membayar supplier dan / atau gaji
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saatnya PT JAYA BALI SEJAHTERA menggunakan rekening atas nama PT JAYA BALI SEJAHTERA, rekening atas nama I MADE SUDARIS dan ELFIN RUDIANTO SITORUS
- Bahwa uang yang masuk ke rekening I MADE SUDARIS atau ELFIN RUDIANTO SITORUS tidak dimasukan ke dalam rekening perusahaan yaitu rekening atas nama PT JAYA BALI SEJAHTERA. Uang tersebut ada di rekening masing-masing. Untuk keperluan pembayaran supplier dan gaji pegawai harian uangnya diberikan secara tunai kepada Saksi dan HARTOYO untuk selanjutnya Saksi bayarkan kepada supplier dan untuk gaji pegawai harian
- Bahwa saksi pernah mendengar dari HARTOYO bahwa ELFIN RUDIANTO SITORUS mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- per bulan
- Bahwa bahwa untuk urusan keuangan dipegang langsung oleh HARTOYO, I MADE SUDARIS dan ELFIN RUDIANTO SITORUS. Saksi pernah melihat ada laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca pada laptop milik HARTOYO tapi tidak tahu isi detailnya
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat adanya Surat Himbauan dari KPP Pratama Badung Utara mengenai kewajiban melaporkan dan menyetor pajak
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kondisi keuangan perusahaan saat bekerja di PT JAYA BALI SEJAHTERA sampai dengan bulan Juli 2016 namun Saksi melihat bahwa perusahaan masih berjalan normal mengerjakan proyek-proyek dan tidak ada pembayaran-pembayaran kepada supplier yang terhambat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

13. **Saksi Hartoyo**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 64 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini adalah karyawan PT PAN BROTHERS di Boyolali, dahulu merupakan Staf Administrasi di PT JAYA BALI SEJAHTERA dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016;
- Bahwa saat menjadi Staf Administrasi PT JAYA BALI SEJAHTERA, Saksi bertugas dan berwenang mencatat uang masuk dan uang keluar perusahaan dengan media pencatatan menggunakan laptop milik perusahaan, dan mengajukan opname pembelian material untuk proyek;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS sebagai atasan di PT JAYA BALI SEJAHTERA dan sekaligus sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengenali akta tersebut adalah Akta nomor 15 dari notaris IDA MONICA E. SIDJABAT, SH atas Pendirian Perseroan Terbatas PT JAYA BALI SEJAHTERA, saksi mengenal akta tersebut dan pernah membacanya, tapi saya tidak ikut menghadap ke hadapan Notaris. saksi hanya mengetahui dari pak ELFIN RUDIANTO SITORUS akta tersebut telah jadi tanpa tahu proses pembuatannya;
- Bahwa saya mengenal nama-nama dalam akta tersebut yaitu Tuan ELFIN RUDIANTO SITORUS dan Tuan I MADE SUDARIS adalah sebagai pimpinan saya di PT JAYA BALI SEJAHTERA sedangkan Tuan HARTOYO adalah Saya sendiri;
- Bahwa dewan komisaris terdiri dari Tuan I MADE SUDARIS sebagai Komisaris Utama dan Tuan HARTOYO yaitu Saya sendiri sebagai Komisaris PT JAYA BALI SEJAHTERA. Dewan Direksi terdiri dari ELFIN RUDIANTO SITORUS sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA melakukan pencatatan atau pembukuan dalam bentuk rekapan misal proyek A pengeluarannya apa saja, proyek B pengeluarannya apa saja. Yang melakukan pencatatan adalah Saksi dengan dibantu oleh ibu LESTINA SITORUS
- Bahwa Secara resmi yang bertugas melakukan penyimpanan atas catatan dan pembukuan tersebut tidak ada. Saksi bersama sama dengan ibu LESTINA SITORUS hanya mencatat pembukuan di dalam laptop perusahaan merk ACER typenya tidak ingat dan sebagian di dalam komputer PC yang dipegang oleh ibu LESTI. Saksi dan LESTI jarang mencetak pencatatan pembukuan tersebut. Saksi hanya terbatas melaksanakan perintah pak ELFIN RUDIANTO SITORUS untuk mencatat uang masuk dan keluar saja, tidak pernah membuat laporan keuangan perusahaan baik bulanan maupun tahunan, karena tidak pernah diperintah untuk membuatnya

Halaman 65 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah pak ELFIN RUDianto SITORUS karena menurut akte Direktur dari PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah pak ELFIN RUDianto SITORUS
- Bahwa awalnya kami bertanya mengenai masalah perpajakan kepada ibu KENYO HARTANTO, setahu Saya beliau tinggal di daerah jalan Marlboro. Sempat kami hire dengan gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan untuk konsultasi bagian akunting untuk pembuatan SPT. Di akhir tahun 2014 ibu KENYO HARTANTO sudah tidak lagi bekerja sebagai konsultan PT JAYA BALI SEJAHTERA dan sejak saat itu saya yang melaporkan SPT ke Kantor Pajak hasil dari rekapan yang dibuat oleh ibu LESTINA SITORUS
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kewajiban perpajakan PT JAYA BALI SEJAHTERA yang harus dilaksanakan untuk tahun pajak 2015 dan 2016. Yang Saksi tahu setiap proyek yang dikerjakan, PT JAYA BALI SEJAHTERA telah memungut PPN
- Bahwa Saksi tahu setiap proyek yang dikerjakan, PT JAYA BALI SEJAHTERA telah memungut PPN dari invoice dan Faktur Pajak yang di siapkan oleh Saksi dan LESTI SITORUS dimana di dalam invoice tersebut jumlah yang ditagihkan sudah termasuk nilai PPN. Dan saat customer membayar mereka akan konfirmasi jumlah yang ditransfer ke Saksi sebagai administrasi dan LESTI SITORUS sebagai administrasi. Kadang customer juga menghubungi Pak ELFIN RUDianto SITORUS maupun Pak I MADE SUDARIS untuk konfirmasi pembayaran
- Bahwa di awal pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA pembayaran dari customer menggunakan rekening atas nama PT JAYA BALI SEJAHTERA yang ada di BCA, setelah kejadian cek kosong sehingga di blacklist oleh pihak Bank di pertengahan tahun 2015, maka pembayaran dari customer dilakukan melalui rekening pribadi atas nama Pak ELFIN RUDianto SITORUS maupun atas nama pak I MADE SUDARIS. Jika ada pembayaran melalui Bilyet Giro saya sama Bu LESTI SITORUS yang ke bank untuk menindaklanjutinya sedangkan nama dalam Bilyet Giro tersebut adalah Pak ELFIN RUDianto SITORUS atau Pak I MADE SUDARIS
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rentang waktu tahun 2015 s.d. 2016 PT JAYA BALI SEJAHTERA telah menerbitkan faktur pajak namun belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya dalam BAP ini disebut PPN) di Masa Pajak yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 66 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai PPN
1	0100011513796538 20 Februari 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	54,248,212
2	0100011513796540 02 April 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	2,143,174
3	0100011513796543 02 April 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	1,681,878
4	0100011513796544 02 April 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	125,425
5	0100011513796549 17 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	9,285,049
6	0100011513796550 17 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	88,520
7	0100011513796551 17 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	112,799
8	0100011513796552 16 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	6,601
9	0100011513796539 16 Maret 2015	PT GRAHA GEMILANG	185,454,546
10	0100011513796546 29 April 2015	PT GRAHA GEMILANG	198,779,455
11	0100011513796548 26 Mei 2015	PT GRAHA GEMILANG	177,971,455
12	0100011513796555 29 Juni 2015	PT GRAHA GEMILANG	137,931,818
13	0100311602833408 02 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	179,407,521
14	0100311602833416 31 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	14,941,818
15	0100311602833422 12 April 2016	PT GRAHA GEMILANG	86,112,016
16	0100311602833430 10 Juni 2016	PT GRAHA GEMILANG	22,350,000
17	0110011513796556 01 September 2015	PT GRAHA GEMILANG	104,040,000
18	0110011513796557 30 September 2015	PT GRAHA GEMILANG	155,902,363
19	0110011513796558 01 Oktober 2015	PT GRAHA GEMILANG	6,403,636
20	0100011513796541 26 Februari 2015	PT BALI SUNRISE BEACH	2,925,000
21	0100011513796542 02 April 2015	PT GARUDA ADHIMATRA	13,443,662
		INDONESIA	
22	0100011513796545 23 April 2015	PT GARUDA ADHIMATRA	18,871,156
		INDONESIA	
23	0100011513796547 20 Mei 2015	INDONESIA	17,076,107
24	0100011513796553	PT GARUDA ADHIMATRA	15,361,964

Halaman 67 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INDONESIA	
	25 Juni 2015		
25	0100011513796554	PT GARUDA ADHIMATRA	
	29 Juni 2015	INDONESIA	11,060,485
26	0100311602833413	PT BALI NUSADEWATA	
	08 April 2016	VILLAGE	2,250,000
27	0100311602833414	PT BALI NUSADEWATA	
	08 April 2016	VILLAGE	715,000
28	0100311602833431	PT BALI NUSADEWATA	
	15 Juni 2016	VILLAGE	55,000
29	0100311602833432	PT BALI NUSADEWATA	
	15 Juni 2016	VILLAGE	250,000
30	0100311602833425	PT TALKINDO SELAKSA	
	31 Mei 2016	ANUGRAH	4,350,000
31	0100311602833433	PT TALKINDO SELAKSA	
	24 Juni 2016	ANUGRAH	4,350,000
32	0100311602833409	PT AMERTHA	11,346,909
	02 Maret 2016		
33	0100311602833410	PT AMERTHA	2,836,745
	02 Maret 2016		
34	0100311602833411	PT AMERTHA	1,351,364
	04 Maret 2016		
35	0100311602833412	PT AMERTHA	5,405,577
	04 Maret 2016		
36	0100311602833419	PT AMERTHA	2,379,192
	04 Maret 2016		
37	0100311602833421	PT AMERTHA	9,516,468
	04 Maret 2016		
38	0100311602833423	PT AMERTHA	811,051
	16 Mei 2016		
39	0100311602833424	PT AMERTHA	3,244,113
	16 Mei 2016		
40	0100311602833427	PT AMERTHA	9,919,772
	06 Juni 2016		
41	0100311602833429	PT AMERTHA	33,766,035
	13 Juni 2016		
42	0100311602833434	PT AMERTHA	2,118,636
	09 Agustus 2016		
43	0100311602833435	PT AMERTHA	10,373,091
	09 Agustus 2016		
44	0100311602833436	PT AMERTHA	5,763,101
	01 September 2016		
44	0100311602833438	PT AMERTHA	3,054,909
	03 Oktober 2016		
45	0100311602833439	PT AMERTHA	2,082,909

Halaman 68 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2016

Saya tahu bahwa semua Faktur Pajak diatas belum dilaporkan ke kantor pajak maupun disetorkan ke kas negara dan atas hal ini sudah saya sampaikan kepada pak ELFIN RUDIANTO SITORUS maupun Pak I MADE SUDARIS bahwa semua faktur pajak tersebut belum dibayar ke kas Negara dan dilaporkan ke kantor pajak, tanggapan keduanya nanti akan dilaporkan dan dibayar apa saja yang belum dibayar

- Bahwa Faktur Pajak atas penyerahan yang dilakukan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA dibuat oleh ibu LESTINA SITORUS atas perintah pak ELFIN RUDIANTO SITORUS dan kadang untuk proyek yang dikerjakan pak I MADE SUDARIS yang memerintahkan pak I MADE SUDARIS
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa PPN yang telah dipungut oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA untuk tahun 2015 dan 2016
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penyerahan yang dipungut PPN tetapi belum disetorkan, dan uangnya berada dimana dan siapa yang bertanggung jawab
- Bahwa yang membuat catatan pembukuan dan menyimpan termasuk laporan harian adalah Saksi dan bu LESTINA SITORUS. Sepengetahuan Saksi, seluruh catatan pembukuan tersebut disimpan di kantor di Jl. Tirta Dewata. Pada saat kantor tersebut diambil alih, semua dokumen perusahaan ada di kantor tersebut. Saat ini saksi tidak tahu dokumen ada dimana
- Bahwa Saksi tidak tahu berada di mana seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun pemenuhan kewajiban perpajakan PT JAYA BALI SEJAHTERA untuk tahun pajak 2015 s.d. 2016 dan siapa kah yang menguasainya. Sepengetahuan Saksi, seluruh catatan pembukuan tersebut disimpan di kantor di Jl. Tirta Dewata. Pada saat kantor tersebut diambil alih, semua dokumen perusahaan ada di kantor tersebut. Saat ini Saksi tidak tahu dokumen ada dimana. Saksi juga tidak tahu pasti siapa dan kenapa kantor PT JAYA BALI SEJAHTERA diambil alih orang lain
- Bahwa Terhadap PT JAYA BALI SEJAHTERA pernah beberapa kali dilakukan himbauan, kunjungan dan atau konseling ,kewajiban perpajakan PT JAYA BALI SEJAHTERA dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Saksi selalu melaporkan kepada pak ELFIN RUDIANTO SITORUS setiap kali ada surat himbauan, teguran atau kunjungan dari kantor pajak dan kadang Saksi juga melaporkan kepada pak I MADE SUDARIS tanggapan beliau Saksi disuruh menyampaikan hal ini ke Pak ELFIN RUDIANTO SITORUS. Tanggapan dari

Halaman 69 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak ELFIN RUDIANTO SITORUS bahwa Saksi yang ditunjuk oleh pak ELFIN RUDIANTO SITORUS untuk mewakili PT JAYA BALI SEJAHTERA datang ke KPP Pratama Badung Utara, dan pernah juga bersama dengan ibu LESTI. Pak RUDI selalu mengatakan akan membayar dan menunaikan seluruh kewajiban pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA

- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA pernah menerima surat himbauan untuk menyampaikan dan/atau membetulkan SPT dari KPP Pratama Badung Utara yaitu surat himbauan untuk menyetorkan pajak yang sudah dipungut. Ada juga himbauan untuk menyampaikan SPT yang belum disampaikan. Yang menerima surat tersebut adalah kadang *office boy* dan disampaikan ke Saksi sendiri. Surat tersebut Saksi sampaikan ke pak RUDI dan kadang Saksi juga melaporkan kepada pak I MADE SUDARUS tanggapan beliau Saksi disuruh menyampaikan hal ini ke Pak ELFIN RUDIANTO SITORUS. Tanggapan pak ELFIN RUDIANTO SITORUS adalah mengatakan nanti akan dibayar. Sebagian pajak yang dipungut dibayarkan tetapi ada juga yang belum dibayarkan. Pernah juga menerima surat panggilan dari KPP Pratama Badung Utara untuk datang ke KPP. Pada saat itu yang datang ke KPP adalah Saksi atas perintah pak ELFIN RUDIANTO SITORUS. Yang di bahas di KPP pada saat itu adalah masalah pembayaran pajak yang sudah dipungut dari lawan transaksi dan yang belum disetorkan ke kas Negara. Saksi datang ke KPP biasanya sendiri, pernah juga didampingi oleh ibu LESTI
- Bahwa Setahu saya kalau atas nama PT JAYA BALI SEJAHTERA tidak ada pembelian aktiva tetap, tetapi kalau atas nama pribadi Pak ELFIN RUDIANTO SITORUS ada, yaitu di sekitar daerah Mendoyo kabupaten Jembrana, dan tanah di Lombok Timur, kemudian ada membeli rumah di daerah Sibang Kabupaten Badung Bali. Kalau atas nama Pak I MADE SUDARIS saya tidak tahu namun saya hanya tahu beliau melakukan renovasi rumahnya saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Ahli Arief Budiman, S.E., M.M.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli merupakan Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) MadyaSidoarjo yang memiliki Sertifikat sebagai seorang Ahli di Direktorat Jenderal Pajak
- Bahwa Ahli ditunjuk dan ditugasi sebagai Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara dalam perkara ini berdasarkan **Surat Tugas dari Kepala**

Halaman 70 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II nomor ST-4910/WPJ.24/2019 tanggal 22

Mei 2019 menjawab permintaan Kepala Kantor Wilayah DJP Bali melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Nomor ND-386/WPJ.17/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permintaan Bantuan Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara;

- Kewajiban Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN
 2. mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.
 3. Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN.
- Bahwa berdasarkan pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor Barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN, FAKTUR PAJAK adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kena Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

Halaman 71 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha faktur Pajak adalah bukti pemungutan PPN yang wajib disetor. Namun demikian untuk menghitung nilai yang harus disetor menggunakan mekanisme penghitungan PPN dalam SPT Masa PPN Mekanisme penghitungan PPN dengan cara memperhitungkan PPN yang telah dipungut dengan kredit pajak yang diperoleh
- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. -
- Bahwa kemudian pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- Bahwa Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) dijelaskan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali
- Bahwa apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan termasuk sanksi pidana sebagai berikut:
- Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan

Halaman 72 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

- Apabila Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan termasuk sanksi pidana sebagai berikut :
- Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
- Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan termasuk sanksi pidana sebagai berikut:
- Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar;
- Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan

1. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.

Halaman 73 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BARANG KENA PAJAK/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BARANG KENA PAJAK/JKP selama satu masa pajak.
3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BARANG KENA PAJAK/JKP.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan yaitu pajak yang telah dibayar sendiri dan kompensasi masa sebelumnya.

Selisih antara Pajak Keluaran dengan **Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan**, apabila Pajak Keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi

- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2015 s.d. Oktober 2015, Masa Pajak Maret 2016 s.d. Juni 2016, dan Masa Pajak Agustus 2016 s.d. Oktober 2016
- Bahwa Terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu jasa konstruksi pada Masa Pajak September 2015 s.d. Oktober 2015, Masa Pajak Maret 2016 s.d. Juni 2016, dan Masa Pajak Agustus 2016 s.d. Oktober 2016
- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 s.d. Juni 2015 tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/JKP
- Bahwa Terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu jasa konstruksi pada Masa Pajak Februari 2015 s.d. Juni 2015
- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA telah menerbitkan FAKTUR PAJAK sebagai bukti pemungutan pajak dan telah menerima pembayaran beserta PPN dari lawan transaksi namun tidak melaporkannya pada SPT MASA PPN dan tidak ada setoran ke kas negara maka sudah jelas bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA telah memungut PPN namun tidak menyetorkan ke kas negara
- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Penyidik, kerugian pada pendapatan negara karena **tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar** dan/atau tidak lengkap dan/atau **tidak menyetorkan PPN yang dipungut** PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 kurun waktu Masa Pajak/Tahun Pajak **Februari 2015 s.d. Juni 2015, September 2015 dan Oktober 2015, Maret 2016 s.d. Juni 2016, serta Agustus 2016 s.d. Oktober 2016** adalah Rp.

Halaman 74 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.445.876.676,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Masa Pajak Februari 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	542.482.120
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	54.248.212
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	1.218.220
PPN Kurang (Lebih) Bayar	53.029.992
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	53.029.992

Masa Pajak Maret 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.854.545.455
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	185.454.546
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	185.454.546
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	185.454.546

Masa Pajak April 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	2.379.697.490
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	237.969.750
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	237.969.750
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	237.969.750

Masa Pajak Mei 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.950.475.612
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	195.047.562
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0

Halaman 75 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang (Lebih) Bayar	195.047.562
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	195.047.562

Masa Pajak Juni 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.738.472.365
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	173.847.236
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	173.847.236
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	173.847.236

Masa Pajak September 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	2.599.423.636
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	259.942.363
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	259.942.363
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	259.942.363

Masa Pajak Oktober 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	64.036.364
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	6.403.636
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	6.403.636
Dikompensasikan	
Kerugian pada pendapatan negara	6.403.636

Masa Pajak Maret 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
--------	-----------------------

Halaman 76 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	2.182.549.356
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	218.254.934
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	84.569.636
PPN Kurang (Lebih) Bayar	133.685.298
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	133.685.298

Masa Pajak April 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	980.076.760
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	98.007.676
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	98.007.676
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	98.007.676

Masa Pajak Mei 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	84.051.636
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	8.405.164
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	8.405.164
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	8.405.164

Masa Pajak Juni 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	706.908.069
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	70.690.807
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	70.690.807
Dikompensasikan	0

Halaman 77 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian pada pendapatan negara	70.690.807
---------------------------------	------------

Masa Pajak Agustus 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	124.917.273
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	12.491.727
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	12.491.727
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	12.491.727

Masa Pajak September 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	57.631.014
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	5.763.101
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	5.763.101
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	5.763.101

Masa Pajak Oktober 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	51.378.182
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	5.137.818
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	5.137.818
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	5.137.818

- Bahwa perhitungan kerugian negara untuk kasus pidana perpajakan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (c), (d) dan (i) sebenarnya merupakan tindak pidana korporasi yang artinya kerugian negara sebenarnya adalah pajak terutang yang ditimbulkan oleh wajib pajak dalam hal ini adalah suatu perusahaan namun dalam UU KUP tidak menganut tindak pidana korporasi melainkan ORANG

Halaman 78 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang menjalankan perusahaan berbuat dan bertindak atas nama perusahaan sehingga nilai kerugian yang harus dikenakan untuk Terdakwa adalah sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perusahaan
- Bahwa dengan demikian Kerugian Negara yang ditimbulkan Terdakwa adalah sebesar **Rp. 1.445.876.676,-** (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa selain dari penghitungan kerugian pada pendapatan negara **masih dibutuhkan penghitungan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar** karena besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar menjadi dasar bagi diterapkannya pengenaan denda dan juga dalam rangka penghitungan denda apabila terjadi penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu PT Jaya Bali Sejahtera karena Terdakwa adalah salah satu pengurus;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT Jaya Bali Sejahtera adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera didirikan pada tahun 2014;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor untuk teknik electrical;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sudah terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera sudah memiliki Nommor Pokok Wajib Pajak;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera rutin melaporkan SPT masa PPN ke Kantor Pajak namun sebelum perusahaan mengalami masalah keuangan;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah melakukan kerjasama dengan PT Graha Gemilang, PT Bali Sun Rise Beach, PT Bali Nusa Dewata Village, PT Amerta, PT Alkindo Selaksa Anugerah, PT Bina Bangun Perkasa, PT Garuda Adi Matra Indonesia;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah menerima pembayaran PPN dari perusahaan-perusahaan lawan transaksi kecuali dari PT Garuda Adi Matra Indonesia;
- Bahwa Pembayaran PPN dari perusahaan-perusahaan lawan transaksi PT Jaya Bali Sejahtera sebagian telah disetorkan kepada Kantor Pajak ketika perusahaan masih belum mengalami kerugian;

Halaman 79 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada PPN yang diterima oleh PT Jaya Bali Sejahtera tetapi tidak disetorkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa Saksi kurang tahu jumlah PPN yang telah diterima PT Jaya Bali Sejahtera tetapi tidak disetorkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik pajak adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengerti Apakah Terdakwa pernah melaporkan SPT masa PPN nihil serta tidak menyampaikan nilai PPN yang tidak semestinya yang dilakukan oleh PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak bisa jelaskan total dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berapa jumlah PPN yang Terdakwa terima dan tidak disetorkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Made Sudaris;
- Bahwa Jabatan I Made Sudaris di PT Jaya Bali Sejahtera adalah sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa I Made Sudaris pernah menerima PPN dari lawan transaksi dari PT Amerta;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah PPN yang diterima oleh I Made Sudaris;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan dua buah aset kepada Kantor Pajak;
- Bahwa Letak aset tersebut di Lombok timur;
- Bahwa kedua aset tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Sertifikat untuk kedua aset tersebut atas nama Elfin Rudianto Sitorus;
- Bahwa tujuan penyerahan dua sertifikat kepada Kantor Pajak, karena kami sudah tidak mampu lagi untuk membayar pajak dan sebagai bentuk itikad baik kami menyerahkan dua sertifikat kepada Kantor Pajak sebagai alat pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tahu ada permasalahan pajak di PT Jaya Bali Sejahtera ketika bagian keuangan mengatakan ada pajak yang harus dibayar;
- Bahwa Karyawan Terdakwa tahu bahwa PT Jaya Bali Sejahtera ada masalah pajak dari informasi dari kantor pajak;
- Bahwa Terdakwa rasa belum ada orang pajak yang mendatangi kantor PT Jaya Bali Sejahtera untuk melakukan kunjungan atau himbauan;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak mengetahui jumlah total pajak yang belum dibayarkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah total pajak yang belum disetorkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera setelah pemeriksaan oleh Kantor Pajak sebelum dibawa oleh kekejaksaan;

Halaman 80 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya untuk melakukan upaya penjualan terhadap dua sertifikat tanah karena Terdakwa ingin sekali menyelesaikan tunggakan perpajakan namun beberapa kali usaha tersebut gagal karena waktu itu ada bencana gempa;
- Bahwa pada saat itu tawaran harga dari pembeli sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are;
- Bahwa Total keseluruhan luas tanah sekitar 3 hektar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik pajak adalah benar;
- Bahwa ada perubahan dalam keterangan dalam BAP, Ada, untuk keterangan yang menyatakan Terdakwa dengan sengaja tidak membayar pajak adalah tidak benar, Terdakwa tidak ada niatan untuk tidak membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak membayar pajak karena perusahaan collapse;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik dengan menyerahkan dua aset tanah kepada Kantor Pajak;
- Bahwa sudah dibuatkan berita acara serah terima penyerahan dua sertifikat tanah kepada Kantor Pajak;
- Bahwa Dua aset tanah tersebut jika per are nilainya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka nilai total keseluruhan aset tersebut adalah sekitar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

- **Saksi Yuliani Kurniawati Hematang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa Saksi tahu PT Jaya Bali Sejahtera dari suami saksi ketika bekerja sama dengan Elfin Rudianto Sitorus;
 - Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera berdiri sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tahu pengurus PT Jaya Bali Sejahtera yaitu Elfin Rudianto Sitorus, I Made Sudaris dan Hartoyo;
 - Bahwa Elfin Rudianto Sitorus sebagai Direktur Utama pada PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa I Made Sudaris adalah Komisaris Utama PT Jaya Bali Sejahtera;
 - Bahwa saksi tahu PT Jaya Bali Sejahtera ada masalah dalam membayar pajak ketika suami saksi I Made Sudaris dipanggil sebagai saksi;
 - Bahwa Ketika saksi mengetahui PT Jaya Bali Sejahtera ada masalah pajak, saksi menanyakan kepada Elfin Rudianto Sitorus bagaimana upaya untuk

Halaman 81 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kasus ini dan Elfin Rudianto menyatakan akan segera menyelesaikan masalah perpajakan PT Jaya Bali Sejahtera dengan menjual aset yang berada di Lombok, pada saat itu I Made Sudaris sedang berada di lapangan untuk menyelesaikan proyek yang sedang berjalan untuk diselesaikan dan ada proyek yang menyisakan hutang bagi saksi, I Made Sudaris dan Elfin Rudianto;

- Bahwa Kami ada keinginan untuk membayar hutang pajak dengan cara berusaha menjual aset yang berada di Lombok tetapi belum berhasil namun kedua aset sudah di serahkan ke Kantor Pajak, dengan ditahannya Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudaris membuat terhambatnya penjualan aset tersebut;
- Bahwa Elfin Rudianto dan I Made Sudaris telah menyerahkan dua aset tanah tersebut kepada Kantor Pajak sebagai itikad baik kami karena kami tidak memiliki uang sambil tetap berusaha menjual;
- Bahwa dua aset tersebut diserahkan ke Kantor Kanwil Pajak;
- Bahwa Saksi ikut sebagai saksi yang menyaksikan penyerahan aset tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara penyerahan dua aset sertifikat kepada Kanwil Pajak;
- Bahwa Luas dua aset tanah tersebut adalah kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa Taksiran harga tanah tersebut adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are dengan total kurang lebihh Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Tujuan penyerahan kedua aset tersebut adalah untuk pembayaran hutang pajak PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa Nilai kewajiban pajak yang terhutang dari PT Jaya Bali Sejahtera kurang lebih Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar penyerahan kedua sertifikat tersebut untuk pembayaran hutang pajak Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudaris sebagai pengurus PT Jaya Bali Sejahtera;
- Bahwa betul kedua aset sertifikat berada di Lombok Timur;
- Bahwa benar kedua aset tersebut yang telah diserahkan bersertifikat SHM No.1603 dan SHM No.1085;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pembayaran pajak, tetapi suami saksi I Made Sudaris menceritakan bahwa setelah tahun 2017 PT Jaya Bali Sejahtera ada tunggakan pajak dan dijelaskan 3 proyek salah perhitungan dan mengalami kebangkrutan, kami berusaha untuk menyelesaikan ada beberapa aset pribadi yang harus dijual;

Halaman 82 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari **ENI**, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Invoice Progress 100% yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 002/JBS/IN-PRG/GRT-MBG/VI016 tanggal 24 Juni 2016	1 Lembar	Copy
2	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran progress 100% Paket pekerjaan grease trap di Galeria Bali, banyaknya uang Rp 47.850.000,-	1 Lembar	Copy
3	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833433 tanggal 24 Juni 2016	1 Lembar	Copy
4	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 31 Mei 2016 untuk pembayaran down payment 50% Paket pekerjaan grease trap di Galeria Bali, banyaknya uang Rp 47.850.000,-	1 Lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833425 tanggal 31 Mei 2016	1 Lembar	Copy
6	Bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga PT Talkindo Selaksa Anugrah kepada BCA I Made Sudaris tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 46.541.500.	1 Lembar	Copy
7	Bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga PT Talkindo Selaksa Anugrah kepada BCA I Made Sudaris tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 46.541.500.	1 Lembar	Copy
8	Foto pengerjaan Panel, Pompa Grease Trap, dan Instalasi Kabel.	9 Lembar	Hasil Print Foto
9	SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016.	1 set	Copy
10	SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016	1 set	Copy
11	Perjanjian Kerja Kontrak ME Grease Trap Nomor 003/IE/ME/BT-GAL/V/16-PRJ	1 set	Copy

Disita dari **SYAHRUL MISBAH**, Aparatur Sipil Negara, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keterangan Terdaftar nomor S-1555KT/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 19 Maret 2014 PT JAYA BALI SEJAHTERA	18 lembar	Asli

Halaman 83 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	beserta lampiran pendukung : Asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen saat pendaftaran, Copy KTP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy Kartu NPWP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Asli Formulir Pendaftaran NPWP, Copy SKTU, Copy Legalisir Akta Pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA no 15 tanggal 19 Februari 2014		
2	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-50PKP/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014 PT JAYA BALI SEJAHTERA beserta lampiran pendukung : Asli SKT, Asli BA Perubahan Data WP dan/atau PKP nomor BA-44PD/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014, Asli Surat Pemberitahuan Perubahan Data S-46PD/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014, Asli Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan WP nomor LAP-520/WPJ.17/KP.06/2014 tanggal 23 September 2014, Asli Surat Tugas nomor ST-133V/WPJ.17/KP.0603/2014, Asli Screenshot BPS Permohonan Pengukuhan PKP dari aplikasi e-reg nomor S-2683R/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 18 September 2014, Copy LPAD Permohonan Pengukuhan PKP nomor S-2683R/WPJ.17/KP.0603/2014, Copy Formulir Pengukuhan PKP, Copy Kartu NPWP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy TDP JAYA BALI SEJAHTERA, Copy SIUP Menengah PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1928/22-08/BPPT/SIUP-M/IV/2014, Copy SKT PT JAYA BALI SEJAHTERA, Copy Surat dari KPP Pratama Badung Utara tentang Hak dan Kewajiban WP serta Sanksi bunga dan administrasi, Copy KTP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy Akte Pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA, Copy Surat Keterangan Tempat Usaha No 4466/I/IX/2014, Copy Denah lokasi, Copy Surat Keterangan Rekomendasi No	35 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102/TL/IX/2014		
3	Nota Dinas nomor ND-621/WPJ.17/KP.0604/2017 tanggal 23 November 2017 beserta Daftar Sisa Tagihan Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA	2 lembar	Asli
4	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01020585/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
5	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01020586/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
6	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01021914/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
7	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01026366/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
8	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01031169/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
9	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01034453/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
10	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01038832/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
11	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01044880/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
12	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak November 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01048702/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
13	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01001764/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
14	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01005177/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
15	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01010038/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
16	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01014157/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	7 lembar	Asli
17	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2015	6 lembar	Asli

Halaman 85 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Normal beserta LPAD Nomor S-01000635/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015		
18	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000636/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
19	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000458/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
20	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000462/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
21	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000461/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
22	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000463/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
23	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000464/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
24	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak November 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000459/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
25	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000460/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
26	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 Normal beserta LPAD Nomor S-01008486/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
27	SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004074/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
28	SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051779/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015 beserta Lampiran SPT Normal copy 3 lembar	7 lembar	Asli
29	SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004075/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
30	SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-010051989/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	8 lembar	Asli
31	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-	3 lembar	Asli

Halaman 86 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01004076/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015		
32	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051780/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
33	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004077/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
34	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051781/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
35	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01005179/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
36	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01014303/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	4 lembar	Asli
37	SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01010040/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
38	SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01014302/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
39	SPT Masa PPN Masa Pajak April 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000273/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
40	SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000272/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
41	SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000271/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
42	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01008488/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	4 lembar	Asli
43	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01008487/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	4 lembar	Asli
44	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 Normal beserta LPAD Nomor S-01008506/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
45	Permintaan Sertifikat Elektronik dengan LPAD Nomor PEM:01007676\906\sep\2015	6 lembar	Asli

Disita dari **I NYOMAN DANANHADI**, Aparatur Sipil Negara, , dengan barang bukti berupa :

Halaman 87 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Printout profil Wajib Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA	13 lembar	Asli
2	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-1/WPJ.17/KP.0609/2017 tanggal 24 Januari 2017	1 lembar	Asli
3	Laporan Pelaksanaan Kunjungan dan Pengamatan nomor Lap-1/WPJ.17/KP.0609/2017 tanggal 24 Januari 2017	2 lembar	Asli
4	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor BA-01/WPJ.17/KP.0609/2016 tanggal 6 Februari 2017	1 lembar	Asli
5	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-6/WPJ.17/KP.06/2017 tanggal 11 Januari 2017 beserta lampirannya	5 lembar	Asli
6	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2016 nomor S-41281/WPJ.17/KP.06/2017 tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya	3 lembar	Asli
7	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan nomor S-40632/WPJ.17/KP.06/2016 tanggal 27 September 2016 beserta lampirannya	2 lembar	Asli
8	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2015 nomor S-51435/WPJ.17/KP.06/2016 tanggal 10 November 2015	2 lembar	Asli
9	Printout Formulir 1771-V Lampiran - V SPT Tahunan PPh Badan PT JAYA BALI SEJAHTERA Tahun Pajak 2014	1 lembar	Asli
10	Printout Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2015 PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
11	Printout Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
12	Screen Shoot google maps jalan Dalung Permai	2 lembar	Asli

Disita dari **HARMANTO DARMALI**, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

Halaman 88 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Juni 2016 nominal Rp 122.615.000,-	1 lembar	Copy
2	Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Juni 2016 nominal Rp 99.995.000,-	1 lembar	Copy
3	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 10 Juni 2016 untuk pembayaran progress ke-10 (84,2642%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015 banyaknya uang Rp 245.850.000,-	1 lembar	Copy
4	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833430 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
5	Invoice yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, ditandatangani tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
6	Risalah Pembayaran No. T10/JBS-GG/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
7	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan no. 010/GG-DC/BAPP- PK/VI/16 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
8	Rekapitulasi Progress Proyek Drupadi Corner Seminyak Bali tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
9	Bukti transfer Bank BCA tanggal 9 Mei 2016 nominal Rp 518.445.570,-	1 lembar	Copy
10	Bukti transfer Bank BCA tanggal 2 Mei 2016 nominal Rp 549.995.000,-	1 lembar	Copy
11	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 12 April 2016 untuk pembayaran termyn ke-9 (5,4627%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 947.232.180,-	1 lembar	Copy
12	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833422 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
13	Risalah Pembayaran No. T9-a/JBS-GG/IV/2016 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
14	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan no. 009-a/GG-DC/BAPP-	1 lembar	Copy

Halaman 89 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PK/IV/16 tanggal 12 April 2016		
15	Rekapitulasi Progress Proyek Drupadi Corner Seminyak Bali tanggal 11 April 2016	1 lembar	Copy
16	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 24 Maret 2016 untuk pembayaran Progress 100% Paket pekerjaan penyambungan listrik baru dengan daya 6.600 VA Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 024/LGL-GG/IX/2015, banyaknya uang Rp 164.360.000,-	1 lembar	Copy
17	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833416 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar	Copy
18	Invoice progress 100% yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-058/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
19	Risalah Pembayaran No. T1-PLN/JBS-GG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016	1 lembar	Copy
20	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 001/GG-DC/BAPP-PK/III/16 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
21	Progress Pengampurahan daya PLN 6.600 VA tanggal 28 Maret 2016	1 lembar	Copy
22	Bukti transfer Bank BCA tanggal 4 Maret 2016 nominal Rp 1.919.660.483,-	1 lembar	Copy
23	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 2 Maret 2016 untuk pembayaran progress ke-8 (11,3811%) Kondisi progress saat ini 77,3837% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.973.482.740,-	1 lembar	Copy
24	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833408 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
25	Invoice progress ke 8 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-054/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
26	Risalah Pembayaran No. T8/JBS-GG/I/2016 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
27	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan	1 lembar	Copy

Halaman 90 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pekerjaan No 008/GG-DC/BAPP-PK/I/16 tanggal 26 Januari 2016		
28	Rekapitulasi Progress tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
29	Bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Nov 2015 nominal Rp 1.736.669.200,-	1 lembar	Copy
30	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 30 September 2015 untuk pembayaran progress ke-5 (9,89%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.714.926.000,-	1 lembar	Copy
31	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796557 tanggal 30 September 2015	1 lembar	Copy
32	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-032/JBS/IN-PRG/IX/2015 tanggal 30 September 2015	1 lembar	Copy
33	Risalah Pembayaran No. T5/JBS-GG/IX/2015 tanggal 25 September 2015	1 lembar	Copy
34	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 005/GG-DC/BAPP-PK/IX/15 tanggal 25 September 2015	1 lembar	Copy
35	Rekapitulasi Progress tanggal 23 September 2015	1 lembar	Copy
36	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 Oktober 2015 untuk pembayaran DP 30% Penyambungan Listrik Baru Dengan Daya 6.600 VA Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 24/LGL-GG/IX/2015, banyaknya uang Rp 70.440.000,-	1 lembar	Copy
37	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796558 tanggal 1 Oktober 2015	1 lembar	Copy
38	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-033/JBS/IN-DP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015	1 lembar	Copy
39	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 16 Okt 2015 nominal Rp 863.223.000,-	1 lembar	Copy
40	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 5 Okt 2015 nominal Rp 708.333.000,-	1 lembar	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 September 2015 untuk pembayaran progress ke-4 (6,6%) Kondisi progress saat ini 39,25% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.144.440.000,-	1 lembar	Copy
42	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796556 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
43	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-031/JBS/IN-PRG/IX/2015 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
44	Risalah Pembayaran No. T4/JBS-GG/VIII/2015 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
45	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 004/GG-DC/BAPP-PK/VIII/15 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
46	Rekapitulasi Progress tanggal 27 Agustus 2015	1 lembar	Copy
47	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2015 nominal Rp 317.537.455,-	1 lembar	Copy
48	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Agustus 2015 nominal Rp 200.000.000,-	1 lembar	Copy
49	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 Agust 2015 nominal Rp 499.993.000,-	1 lembar	Copy
50	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 29 Juni 2015 untuk pembayaran progress ke-3 (8,75%) Kondisi progress saat ini 32,65% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.517.250.000,-	1 lembar	Copy
51	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796555 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
52	Invoice progress ke 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-030/JBS/IN-PRG/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
53	Risalah Pembayaran No. T3/JBS-GG/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
54	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan	1 lembar	Copy

Halaman 92 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Nomor 003/GG-DC/BAPP-PK/VI/15 tanggal 29 Juni 2015		
55	Rekapitulasi Progress tanggal 27 Juni 2015	1 lembar	Copy
56	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 1 Juli 2015 nominal Rp 1.904.289.564,-	1 lembar	Copy
57	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 26 Mei 2015 untuk pembayaran progress ke-2 (11,29%) Kondisi progress saat ini 23,90% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.957.686.000,-	1 lembar	Copy
58	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796548 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
59	Invoice progress ke 2 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-025/JBS/IN-PRG/V/2015 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
60	Risalah Pembayaran No. T2/JBS-GG/V/2015 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
61	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 002/GG-DC/BAPP-PK/VI/15 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
62	Rekapitulasi Progress tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
63	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 22 Mei 2015 nominal Rp 2.126.935.164,-	1 lembar	Copy
64	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran progress ke-1 (12,61%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 2.186.574.000,-	1 lembar	Copy
65	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796546 tanggal 29 April 2015	1 lembar	Copy
66	Invoice progress ke 1 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-019/JBS/IN-PRG/IV/2015 tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
67	Risalah Pembayaran No. T1/JBS-GG/IV/2015 tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
68	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 001/GG-DC/BAPP-PK/IV/15	1 lembar	Copy

Halaman 93 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 27 April 2015		
69	Rekapitulasi Progress tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
70	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 6 April 2015 nominal Rp 1.984.358.636,-	1 lembar	Copy
71	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran Down Payment Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 2.040.000.000,-	1 lembar	Copy
72	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796539 tanggal 16 Maret 2015	1 lembar	Copy
73	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-015/JBS/IN-DP/III/2015 tanggal 16 Maret 2015	1 lembar	Copy
74	Surat Perintah Kerja No. 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015	10 lembar	Copy
75	Surat Perintah Kerja No. 24/LGL-GG/IX/2015 tanggal 15 September 2015	3 lembar	Copy
76	Kwitansi nomor 16-01-0005 tanggal 2 Februari 2016 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
77	Faktur Pajak nomor 010.001-16.05738514 tanggal 28 Januari 2016	1 lembar	Copy
78	Kwitansi nomor 16-01-0004 tanggal 2 Februari 2016 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
79	Faktur Pajak nomor 010.001-16.05738513 tanggal 26 Januari 2016	1 lembar	Copy
80	Kwitansi nomor 15-11-0002 tanggal 10 November 2015 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
81	Faktur Pajak nomor 010.003-15.95841700 tanggal 9 November 2015	1 lembar	Copy
82	Kwitansi nomor 15-11-0001 tanggal 3 Nopember 2015 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
83	Faktur Pajak nomor 010.003-15.95841698 tanggal 2 November 2015	1 lembar	Copy
84	Rincian Bukti Permulaan Pemeriksaan PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
85	Bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Januari 2016 nominal Rp 555.338.766,-	1 lembar	Copy
86	Bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2016 nominal Rp 487.138.655,-	1 lembar	Copy
87	Invoice Progress ke 7 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-	1 lembar	Copy

Halaman 94 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	045/JBS/IN-PRG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015		
88	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796568 tanggal 23 Desember 2015	1 lembar	Copy
89	Bukti setoran Bank BCA tanggal 7 Desember 2015 nominal Rp 1.865.937.651,-	1 lembar	Copy
90	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-037/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015	1 lembar	Copy
91	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796559 tanggal 2 November 2015	1 lembar	Copy
92	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-038/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015	1 lembar	Copy
93	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796561 tanggal 12 November 2015	1 lembar	Copy
94	Invoice Progress ke 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-039/JBS/IN-PRG/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015	1 lembar	Copy
95	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796562 tanggal 13 November 2015	1 lembar	Copy

Disita dari **SUMARJIANTO**, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Bilyet Giro Nomor AAZ 917574 nominal Rp 21.800.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
2	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000328 tanggal 11 April 2016	1 lembar	Asli
3	Journal Voucher nomor BNV 007839 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
4	Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
5	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 21.800.000,-	1 lembar	Asli
6	Kwitansi bermaterai Pembayaran Progress 100% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate 2, di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015 tanggal 8 Maret 2016, Nominal Rp 24.750.000,-	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833413 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Berita Acara Serah Terima No 022/BAST/PCB-JBS/III/16 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
9	Invoice Progress 100% No I-050/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Asli
10	Perjanjian Kerjasama Untuk Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection No 019/BNV-BC/XI/2015	11 lembar	Copy
11	Interoffice Memorandum tanggal 16 Oktober 2015	3 lembar	Copy
12	Transaksi GL periode Desember 2015 PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	1 lembar	Copy
13	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000624 tanggal 12 Juli 2016	1 lembar	Asli
14	Journal Voucher nomor BNV 008036 tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
15	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 3.294.000,-	1 lembar	Asli
16	Kwitansi bermaterai Retensi 5% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 605.000,-	1 lembar	Asli
17	Invoice Retensi 5% No 1-069/JBS/IN-RTS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Asli
18	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833431 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Copy
19	Berita Acara Serah Terima No 021/BAST/PCB-JBS/XII/15 tanggal 12 Desember 2015	1 lembar	Copy
20	Perjanjian Kerjasama Untuk Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing di Bali Collection No 020/BNV-BC/XI/2015	10 lembar	Copy
21	Purchase Request PT Bali Nusadewata Village No 044/PR-BNV/X/2015	3 lembar	Copy
22	Bilyet Giro Nomor ABB 390750 nominal Rp 7.722.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
23	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000293 tanggal 5 April 2016	1 lembar	Asli
24	Journal Voucher nomor BNV 007825 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
25	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 7.722.000,-	1 lembar	Asli
26	Kwitansi bermaterai Pembayaran Progress 100% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang	1 lembar	Asli

Halaman 96 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 7.865.000,-		
27	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833414 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
28	Invoice Progress 100% No 1-049/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Asli
29	Bilyet Giro Nomor ABB 396154 nominal Rp 3.294.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
30	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000625 tanggal 12 Juli 2016	1 lembar	Asli
31	Journal Voucher nomor BNV 008037 tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
32	Kwitansi bermaterai Retensi 5% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 yang berlokasi di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 2.750.000,-	1 lembar	Asli
33	Invoice Retensi 5% No 1-068/JBS/IN-RTS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Asli
34	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833432 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Copy
35	Berita Acara Serah Terima No 022/BAST/PCB-JBS/III/16 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
36	Bilyet Giro Nomor AAZ 913430 nominal Rp 3.564.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
37	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000073 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Asli
38	Journal Voucher nomor BNV 007689 tanggal 21 Januari 2016	1 lembar	Copy
39	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 3.564.000,-	1 lembar	Asli
40	Kwitansi bermaterai Pembayaran DP 30% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 3.630.000,-	1 lembar	Asli
41	Invoice Down Payment 1-042/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Asli
42	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796565 tanggal 1 Desember 2015	1 lembar	Copy
43	Surat No S-286/PPN.NSFP/WPJ.17/KP.0603/2015 tanggal 20 Februari 2015 dari KPP Pratama Badung Utara kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy
44	Bilyet Giro Nomor AAZ 913412 nominal Rp	1 lembar	Copy

Halaman 97 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27.000.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus		
45	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000028 tanggal 15 Januari 2016	1 lembar	Asli
46	Journal Voucher nomor BNV 007684 tanggal 14 Januari 2016	1 lembar	Copy
47	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 27.000.000,-	1 lembar	Asli
48	Journal Voucher JVD/018/12/2015 tanggal 31 Desember 2015	1 lembar	Copy
49	Kwitansi bermaterai Pembayaran DP 50% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 27.500.000,-	1 lembar	Asli
50	Invoice Down Payment 1-041/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Asli
51	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796564 tanggal 1 Desember 2015	1 lembar	Copy
52	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Januari 2016 Normal beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-01005782/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 29 Februari 2016	3 lembar	Copy
53	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan 1 beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-05012973/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2017 tanggal 30 Oktober 2017	3 lembar	Copy
54	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak April 2016 Normal beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-0105143/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 31 Mei 2016	3 lembar	Copy
55	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Juni 2016 Pembetulan 1 beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-01027580/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 30 September 2016	3 lembar	Copy
56	Bukti transfer Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 20 Januari 2016 nilai Rp 27.000.000,-	1 lembar	Copy
57	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA atas pembayaran DP 50% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection SPK No. 019/BNV-BC/XI/2015 nominal Rp 27.500.000,- dan	1 lembar	Copy

Halaman 98 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000		
58	Invoice Down Payment dari PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1-041/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Copy
59	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 01/23/01/2016/BNV tanggal 14 Januari 2016	1 lembar	Copy
60	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 01/23/04/2016/BNV tanggal 04 April 2016	1 lembar	Copy
61	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 21/23/06/2016/BNV tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
62	BILYET GIRO No. AAZ 913430 CIMB Niaga nominal Rp 3.564.000,-	1 lembar	Copy
63	Bukti Pengeluaran Bank PT Bali Nusadewata Village yang dibayarkan kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA no 2016000073 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
64	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA atas pembayaran DP 30% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing di Bali CollectionSPK No. 020/BNV-BC/XI/2015 nominal Rp 3.630.000,- dan Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
65	Invoice Down Payment dari PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1-042/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Copy
66	Surat dari KPP Pratama Badung Utara nomor S-286/PPN.NSFP/WPJ.17/KP.0603/2015 tanggal 20 Februari 2015 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak	1 lembar	Copy
67	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 42/23/12/2015/BNV tanggal 31 Desember 2015	1 lembar	Copy

Disita dari DJOKO PURNAMA, S.E., Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Copy kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 26 Februari 2015 untuk pembayaran progress 100% Paket Pekerjaan MEP External Restaurant BBQ dan Art Shop Komplek Area Bebek Bengil The Bay SPK No	1 lembar	Copy

Halaman 99 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	017/SPK-TBB/XII/2014, banyaknya uang Rp 32.175.000,-		
2	Copy invoice progress 100% No I-009/JBS/IN-PRG/II/2015 tanggal 26 Februari 2015	1 lembar	Copy
3	Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I No 001/BAST-RD/2015 tanggal 25 Februari 2015	1 lembar	Copy
4	Copy SPK No 017/SPK-TBB/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014	3 lembar	Copy
5	Copy Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796541 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy

Disita dari Ir. LATIF JAILANI, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Material Dan peralatan Pekerjaan Elektronika no. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015 tanggal 7 Desember 2015	11 lembar	Copy
2	Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika no. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015 tanggal 7 Desember 2015	11 lembar	Copy
3	Sertifikat pembayaran no 02/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/II/16	1 lembar	Copy
4	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 19 Februari 2016 untuk pembayaran progress 1 (13,6382%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 124.816.000,-	1 lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833409 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
6	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 060/JBS/IN-PRG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016	1 lembar	Copy
7	Summary progress termyn ke 1 tertanggal 15 Februari 2016	12 lembar	Copy
8	Cek Bank BPD Bali no P343654 nilai Rp	1 lembar	Copy

Halaman 100 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	155.168.982,-		
9	Sertifikat pembayaran no 02/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/II/16	1 lembar	Copy
10	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 19 Februari 2016 untuk pembayaran progress 1 (13,6382%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 31.204.000,-	1 lembar	Copy
11	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833410 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
12	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 061/JBS/IN-PRG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016	1 lembar	Copy
13	Summary progress termyn ke 1 tertanggal 15 Februari 2016	13 lembar	Copy
14	Cek Bank BPD Bali no P344004 nilai Rp 73.920.591,-	1 lembar	Copy
15	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 Maret 2016 untuk pembayaran progress 2 (20,1352%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 14.865.000,-	1 lembar	Copy
16	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-047/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
17	Summary progress termyn ke II tertanggal 3 Maret 2016	12 lembar	Copy
18	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833411 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
19	Sertifikat pembayaran no 03/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
20	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 Maret 2016 untuk pembayaran progress 2 (20,1352%) Pengadaan Material Dan peralatan Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK	1 lembar	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 59.461.000,-		
21	Invoice progress ke 2 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-048/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
22	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833412 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
23	Sertifikat pembayaran no 03/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
24	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 April 2016 untuk pembayaran progress 3 (30,5334%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 26.171.000,-	1 lembar	Copy
25	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833419 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
26	Sertifikat pembayaran no 04/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/IV/16	1 lembar	Copy
27	Summary progress termyn ke 3 tertanggal 31 Maret 2016	12 lembar	Copy
28	Cek Bank BPD Bali no P344550 Rp 130.138.245,-	1 lembar	Copy
29	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy
30	Sertifikat pembayaran no 04/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/IV/16	1 lembar	Copy
31	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 April 2016 untuk pembayaran progress 3 (30,5334%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 104.681.000,-	1 lembar	Copy
32	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833421 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
33	Invoice progress 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-065/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy

Halaman 102 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



34	Summary progress sampai dengan 2 April 2016 tertanggal 31 Maret 2016	1 lembar	Copy
35	Invoice progress 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 4 April 2016	12 lembar	Copy
36	Cek Bank BPD Bali no P346633 Rp 44.362.700,-	1 lembar	Copy
37	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tertanggal 20 Mei 2016	1 lembar	Copy
38	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran progress ke 4 (34,4325%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 8.921.000,-	1 lembar	Copy
39	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833423 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
40	Sertifikat pembayaran no 05/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/V/16	1 lembar	Copy
41	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-067/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
42	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran progress ke 4 (34,4325%) Paket pekerjaan Pengadaan Material Dan peralatan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 35.685.000,-	1 lembar	Copy
43	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833424 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
44	Sertifikat pembayaran no 05/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/V/16	1 lembar	Copy
45	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
46	Summary progress sampai dengan tanggal 30 April 2016 tertanggal 30 April 2016	12 lembar	Copy
47	Cek Bank BPD Bali no P345339 Rp 109.117.000,-	1 lembar	Copy



48	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 6 Juni 2016 untuk pembayaran progress ke 5 (47,3951%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 109.117.000,-	1 lembar	Copy
49	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tertanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
50	Sertifikat pembayaran no 06-R/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VI/16	1 lembar	Copy
51	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833427 tanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
52	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-069/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
53	Summary progress sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 tertanggal 3 Juni 2016	12 lembar	Copy
54	Cek Bank BPD Bali no P345340 Rp 371.426.000,-	1 lembar	Copy
55	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 13 Juni 2016 untuk pembayaran progress 6 (86,9394%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 371.426.000,-	1 lembar	Copy
56	Invoice progress ke 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-070/JBS/IN-PRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
57	Sertifikat pembayaran no 07/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VI/16	1 lembar	Copy
58	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833429 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
59	Summary progress sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 tertanggal 10 Juni 2016	12 lembar	Copy
60	Daftar Main Unit siap kirim ke Yan Project tertanggal 11 Juni 2016	7 lembar	Copy
61	Cek Bank BPD Bali no P459295 Rp 134.297.072,-	1 lembar	Copy
62	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy



	tanggal 15 Agustus 2016		
63	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran progress 7 (89,4858%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 23.305.000,-	1 lembar	Copy
64	Copy Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833434 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
65	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VIII/16	1 lembar	Copy
66	Invoice progress ke 7 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-079/JBS/IN-PRG/VII/2016 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
67	Summary progress sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 tertanggal 8 Agustus 2016	12 lembar	Copy
68	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran progress 5 (84,3031%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 114.104.000,-	1 lembar	Copy
69	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833435 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
70	Sertifikat pembayaran no 06/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/VIII/16	1 lembar	Copy
71	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-080/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
72	Summary progress sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 tertanggal 9 Agustus 2016	12 lembar	Copy
73	Cek Bank BPD Bali no P459300 Rp 63.394.000,-	1 lembar	Copy
74	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 2 September 2016	1 lembar	Copy
75	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/IX/16	1 lembar	Copy
76	Copy Faktur Pajak nomor 010.031-	1 lembar	Copy



	16.02833436 tanggal 1 September 2016		
77	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 September 2016 untuk pembayaran progress ke 8 (96,4126%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 63.394.000,-	1 lembar	Copy
78	Invoice progress ke 8 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-082/JBS/IN-PRG/VIII/2016 tanggal 1 September 2016	1 lembar	Copy
79	Summary progress sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 tertanggal 29 Agustus 2016	12 lembar	Copy
80	Cek Bank BPD Bali no P460470 Rp 55.599.527,-	1 lembar	Copy
81	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 21 Oktober 2016	1 lembar	Copy
82	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/X/16	1 lembar	Copy
83	Invoice progress 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-088/JBS/IN-PRG/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
84	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833438 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
85	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran progress 6 (98,9901%) paket pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 33.604.000,-	1 lembar	Copy
86	Summary progress sampai dengan tanggal 30 September 2016 tertanggal 29 Agustus 2016	12 lembar	Copy
87	Sertifikat pembayaran no 09/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/X/16	1 lembar	Copy
88	Invoice progress ke 9 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-089/JBS/IN-PRG/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
89	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833439	1 lembar	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 3 Oktober 2016		
90	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran progress ke 9 (98,9751%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 22.912.000,-	1 lembar	Copy
91	Summary progress sampai dengan tanggal 30 September 2016 tertanggal 5 Oktober 2016	12 lembar	Copy
92	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran down payment Paket Pekerjaan Pengadaan ELEKTRONIKA Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 171.600.000,-	1 lembar	Copy
93	Cek Bank BPD Bali no P192159 Rp 171.600.000,-	1 lembar	Copy
94	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796566 tanggal 17 Desember 2015	1 lembar	Copy
95	Invoice down payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 046/JBS/IN-DP/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015	1 lembar	Copy
96	Sertifikat pembayaran no 01/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/XII/15	1 lembar	Copy
97	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796567 tanggal 17 Desember 2015	1 lembar	Copy
98	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran down payment Paket Pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi ELEKTRONIKA Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 42.900.000,- beserta cek Bank BPD Bali no P194071 Rp 41.730.000,-	1 lembar	Copy
99	Invoice down payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor	1 lembar	Copy

Halaman 107 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	045/JBS/IN-DP/XII/2015	tanggal 16		
	Desember 2015			
100	Sertifikat pembayaran	no	1 lembar	Copy
	01/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/XII/15			

Disita dari RINA, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740374 tanggal 1 Oktober 2014	1 lembar	Copy
2	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740375 tanggal 15 Oktober 2014	1 lembar	Copy
3	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740378 tanggal 21 November 2014	1 lembar	Copy
4	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740379 tanggal 21 November 2014	1 lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740381 tanggal 23 Desember 2014	1 lembar	Copy
6	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740382 tanggal 30 Desember 2014	1 lembar	Copy
7	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740383 tanggal 30 Desember 2014	1 lembar	Copy
8	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796538 tanggal 24 Februari 2015	1 lembar	Copy
9	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796540 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
10	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796543 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
11	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796544 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
12	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 102.135.540,-	1 lembar	Copy
13	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796549 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
14	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 973.719,-	1 lembar	Copy
15	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796550 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
16	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 1.240.785,-	1 lembar	Copy
17	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796551 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
18	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy

Halaman 108 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	dengan nominal Rp 72.614,-		
19	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796552 tanggal 16 Juni 2015	1 lembar	Copy
20	Invoice Progress 100% Nomor 1-011/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 23 Maret 2015	1 lembar	Copy
21	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 001/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
22	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 002/BAST-JBS/II/2015	1 lembar	Copy
23	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 003/BAST-JBS/II/2015	5 lembar	Copy
24	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 004/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
25	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 005/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
26	Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK-GUDANG GARAM KUPANG/VIII/14 senilai Rp 1.298.000.000,-	3 lembar	Copy
27	Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK-GUDANG GARAM MEP LT.2/X/14 senilai Rp 377.575.000,-	9 lembar	Copy
28	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 596.730.332,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 12 Mei 2015 nominal Rp 100.000.000,-	1 lembar	Copy
29	Bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 24 April 2015 nominal Rp 100.000.000,-	1 lembar	Copy
30	Bukti transfer ke ELFIN RUDIANTO SITORUS tanggal 31 Maret 2015 nominal Rp 146.730.332,-	1 lembar	Copy
31	Bukti transfer ke ELFIN RUDIANTO SITORUS tanggal 10 April 2015 nominal Rp 250.000.000,-	1 lembar	Copy
32	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 23.574.913,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 23.574.913,-	1 lembar	Copy
33	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 18.500.656,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 18.500.656,-	1 lembar	Copy
34	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN	1 lembar	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 1.379.674,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 1.379.674,-		
--	--	--	--

Disita dari GUNARDI, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	SPK No. 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 November 2014	2 lembar	Copy
2	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796542 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Asli
3	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 15 Mei 2015 Nominal Rp 130.403.519,-	1 lembar	Asli
4	Kwitansi bermaterai Progress ke-1 tanggal 2 Maret 2015 Nominal Rp 147.880.279,-	1 lembar	Asli
5	Invoice Progress 1 Nominal Rp 147.880.279,-	1 lembar	Asli
6	Final Summary	1 lembar	Asli
7	Laporan Progress Periode Januari 2015	9 lembar	Asli
8	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796545 tanggal 23 April 2015	1 lembar	Asli
9	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 183.050.215,-	1 lembar	Asli
10	Kwitansi bermaterai Termin II tanggal 23 April 2015 Nominal Rp 207.582.718,-	1 lembar	Asli
11	Invoice Progress 2 Nominal Rp 207.582.718,-	1 lembar	Asli
12	Draft Interim Payment Valuation for Certificate No. 2	1 lembar	Asli
13	Final Summary Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
14	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
15	Variation Order Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
16	Laporan Progress Periode Februari 2015	58 lembar	Copy
17	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
18	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796547 tanggal 20 Mei 2015	1 lembar	Asli
19	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 165.638.235,-	1 lembar	Asli
20	Kwitansi bermaterai Progress ke-3 tanggal 20 Mei 2015 Nominal Rp 187.837.174,-	1 lembar	Asli

Halaman 110 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Invoice Progress 3 Nominal Rp 187.837.174,-	1 lembar	Asli
22	Draft Interim Payment Valuation for Certificate No. 3	1 lembar	Asli
23	Final Summary Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
24	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
25	Variation Order Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
26	Laporan Progress Periode Maret 2015	48 lembar	Copy
27	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
28	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796553 tanggal 25 Juni 2015	1 lembar	Asli
29	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 22 September 2015 Nominal Rp 149.011.054,-	1 lembar	Asli
30	Kwitansi bermaterai Progress ke-4 tanggal 25 Juni 2015 Nominal Rp 168.981.607,-	1 lembar	Asli
31	Invoice Progress 4 Nominal Rp 168.981.607,-	1 lembar	Asli
32	BAP Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan	1 lembar	Asli
33	Draft Interim Payment Valuation for Certificate No. 4	1 lembar	Asli
34	Final Summary Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
35	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
36	Variation Order Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
37	Laporan Progress Periode April 2015	47 lembar	Copy
38	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
39	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796554 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Asli
40	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 22 September 2015 Nominal Rp 107.286.705,-	1 lembar	Asli
41	Kwitansi bermaterai Progress ke-5 tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 121.665.336,-	1 lembar	Asli
42	Invoice Progress 5 Nominal Rp 121.665.336,-	1 lembar	Asli
43	BAP Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan	1 lembar	Asli
44	Draft Interim Payment Valuation for Certificate No. 5	1 lembar	Asli
45	Final Summary Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
46	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli

Halaman 111 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Variation Order Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
48	Laporan Progress Periode Mei 2015	46 lembar	Copy
49	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
50	Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-5939/PP/WPJ.17/2016 tanggal 11 Oktober 2016	1 lembar	Copy

Disita dari LESTINA INDAH RAMASI SITORUS, Karyawan Swasta, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Pengalaman Kerja dari PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor : 08/SPK-JBS/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 a.n. LESTINA INDAH RAMASI SITORUS	1 lembar	Copy

Disita dari ARIEF BUDIMAN, SE.MM, Aparatur Sipil Negara, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara a.n. Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS	1 set	Asli
2	Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara a.n. Terdakwa I MADE SUDARIS	1 set	Asli

Disita dari ELFIN RUDIANTO SITORUS, Direktur PT. Jaya Bali Sejahtera, dengan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No, 1085 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgabaya Desa Labuhan Lombok yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak ELFIN RUDIANTO SITORUS.	1 set	Asli
2	1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No, 1603 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgabaya Desa Labuhan Lombok yang dikeluarkan	1 set	Asli

Halaman 112 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak ELFIN RUDIANTO SITORUS.		
--	---	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera didirikan berdasarkan akte notaris Ida Monica E. Sidjabat, S.H. Nomor 15 tanggal 19 Februari 2014 di Denpasar dengan susunan Pengurus yaitu Direktur adalah Elfin Rudianto Sitorus, Komisaris Utama adalah I Made Sudaris dan Komisaris adalah Hartoyo;
- Bahwa PT JAYA BALI SEJAHTERA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada tanggal 19 Maret 2014 dengan NPWP. 66.689.043.9-906.000 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera adalah wajib pajak sehingga memiliki kewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban perpajakan PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP. 66.689.043.9-906.000 meliputi PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPN;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 PT Jaya Bali Sejahtera telah melakukan transaksi dengan beberapa perusahaan yaitu PT Graha Gemilang, PT Bali Sun Rise Beach, PT Bali Nusa Dewata Village, PT Amerta, PT Alkindo Selaksa Anugerah, PT Bina Bangun Perkasa, PT Garuda Adi Matra Indonesia dimana setiap transaksi tersebut telah diterbitkan faktur pajak yang rinciannya sebagai berikut:

- Tahun 2015

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796538 24 Februari 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	542.482.120	54.248.212
2	0100011513796540 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	21.431.739	2.143.174

Halaman 113 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0100011513796543 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	16.818.778	1.681.878
4	0100011513796544 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	1.254.249	125.425
5	0100011513796549 17 Juni 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	92.850.491	9.285.049
6	0100011513796550 17 Juni 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	885.199	88.520
7	0100011513796551 17 Juni 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	1.127.986	112.799
8	0100011513796552 16 Juni 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	66.013	6.601
9	0100011513796539 16 Maret 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.854.545.45 5	185.454.54 6
10	0100011513796546 29 April 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.987.794.54 5	198.779.45 5
11	0100011513796548 26 Mei 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.779.714.54 5	177.971.45 5
12	0100011513796555 29 Juni 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.379.318.18 2	137.931.81 8
13	0110011513796556 01 September 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.040.400.00 0	104.040.00 0
14	0110011513796557 30 September 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.559.023.63 6	155.902.36 3
15	0110011513796558 01 Oktober 2015	PT. GRAHA GEMILANG	64.036.364	6.403.636
16	0100011513796559 02 November 2015	PT. GRAHA GEMILANG	30.000.000	3.000.000
17	010001151379656 1 12 November 2015	PT. GRAHA GEMILANG	30.000.000	3.000.000
18	0100011513796556 2 13 November 2015	PT. GRAHA GEMILANG	1.683.871.63 6	168.387.16 3
19	0110011513796568 23 Desember 2015	PT. GRAHA GEMILANG	974.287.309	97.428.730
20	0100011513796564 1 Desember 2015	PT. BALI NUSA DEWATA VILLAGE	25.000.000	2.500.000
21	0100011513796565 1 Desember 2015	PT. BALI NUSA DEWATA	3.300.000	330.000

Halaman 114 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VILLAGE		
22	0100011513796569 15 Desember 2015	PT. BALI NUSA DEWATA VILLAGE	10.450.000	1.045.000
23	0100011513796567 17 Desember 2015	PT. AMERTHA	39.000.000	3.900.000
24	0110011513796566 17 Desember 2015	PT. AMERTHA	156.000.000	15.600.000
25	0100011513796541 2 April 2015	PT. BALI SUNRISE BEACH	29.250.000	2.925.000
26	0100011513796542 02 April 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	134.436.617	13.443.662
27	0100011513796545 23 April 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	188.711.562	18.871.156
28	0100011513796547 20 Mei 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	170.761.067	17.076.107
29	0100011513796 25 Juni 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	153.619.643	15.361.964
30	0100011513796554 29 Juni 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	110.604.851	11.060.485

- Tahun 2016

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100311602833408 02 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	1.794.075.218	179,407,521
2	0100311602833416 31 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	149.418.182	14,941,818
3	0100311602833422 12 April 2016	PT GRAHA GEMILANG	861.120.164	86,112,016
4	0100311602833430 10 Juni 2016	PT GRAHA GEMILANG	223.500.000	22,350,000
5	0100311602833413 08 Maret 2016	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	22.500.000	2,250,000
6	0100311602833414 08 Maret 2016	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	7.150.000	715,000
7	0100311602833431	PT BALI NUSADEWATA	550.000	55,000

Halaman 115 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Juni 2016	VILLAGE		
8	0100311602833432	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	2.500.000	250,000
	15 Juni 2016			
9	0100311602833425	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	43.500.000	4,350,000
	31 Mei 2016			
10	0100311602833433	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	43.500.000	4,350,000
	24 Juni 2016			
11	0100311602833409	PT AMERTHA	113.469.091	11,346,909
	02 Maret 2016			
12	0100311602833410	PT AMERTHA	28.367.456	2,836,745
	02 Maret 2016			
13	0100311602833411	PT AMERTHA	13.513.636	1,351,364
	04 Maret 2016			
14	0100311602833412	PT AMERTHA	54.055.773	5,405,577
	04 Maret 2016			
15	0100311602833419	PT AMERTHA	23.791.919	2,379,192
	04 April 2016			
16	0100311602833421	PT AMERTHA	95.164.677	9,516,468
	04 April 2016			
17	0100311602833423	PT AMERTHA	8.110.509	811,051
	16 Mei 2016			
18	0100311602833424	PT AMERTHA	32.441.127	3,244,113
	16 Mei 2016			
19	0100311602833427	PT AMERTHA	99.197.716	9,919,772
	06 Juni 2016			
20	0100311602833429	PT AMERTHA	337.660.353	33,766,035
	13 Juni 2016			
21	0100311602833434	PT AMERTHA	21.186.364	2,118,636
	09 Agustus 2016			
22	0100311602833435	PT AMERTHA	103.730.909	10,373,091
	09 Agustus 2016			
23	0100311602833436	PT AMERTHA	57.631.014	5,763,101
	01 September 2016			
24	0100311602833438	PT AMERTHA	30.549.091	3,054,909
	03 Oktober 2016			
25	0100311602833439	PT AMERTHA	20.829.091	2,082,909
	03 Oktober 2016			

- Bahwa SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera pada tahun pajak 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:
 - Tahun pajak 2015 :

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-01005179/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	11/02/2015

Halaman 116 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



2	Januari	Pembetulan Ke-1	S-01014303/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	(1.218.220)	15/04/2015
3	Februari	Normal	S-01010040/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	13/03/2015
4	Maret	Normal	S-01014302/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	15/04/2015
5	April	Normal	S-01000273/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
6	Mei	Normal	S-01000272/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
7	Juni	Normal	S-01000271/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
8	Nopember	Normal	S-01008488/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	11.262.035	01/03/2016
9	Desember	Normal	S-01008487/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	100.314.030	01/03/2016

- Tahun 2016 :

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-01008506/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	(84.569.636)	01/03/2016

- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera wajib menyampaikan SPT Masa PPN namun WP tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa masa pajak September sampai dengan Oktober 2015, dan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa dari SPT Masa yang telah dilaporkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera isinya tidak benar karena PT Jaya Bali Sejahtera melaporkan penyerahan dan PPN kurang bayar nihil padahal ada data dari lawan transaksi yang sudah melaporkan pembelian atau pajak masukan yang diperoleh dari PT Jaya Bali Sejahtera pada masa pajak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015;
- Bahwa PT Jaya Bali Sejahtera ada menerbitkan Faktur Pajak yang telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi namun tidak dilaporkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera sebagai penyerahan atau pajak keluaran dalam SPT Masa PPN nya di masa pajak Februari 2015 sampai dengan Juni 2015, September 2015 sampai dengan Oktober 2015, Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 dan Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016;

Halaman 117 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara karena tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau tidak menyetorkan PPN yang dipungut PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000 kurun waktu Masa Pajak/Tahun Pajak Februari 2015 s.d. Juni 2015, September 2015 dan Oktober 2015, Maret 2016 s.d. Juni 2016, serta Agustus 2016 s.d. Oktober 2016 adalah Rp. 1.445.876.676,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS melalui PT JAYA BALI SEJAHTERA adalah sebesar jumlah yang tertuang pada Faktur Pajak yang penerimaan uangnya diterima langsung oleh Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS atau melalui rekening ELFIN RUDIANTO SITORUS dan dikurangi dengan nilai Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak dari masa sebelumnya sebesar Rp 85.787.856,-. Sehingga Kerugian Negara yang dimaksud sebesar **Rp. 1.344.553.713,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Adapun perincian Faktur Pajak nya sebagai berikut :

No.	Nama Lawan Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	Nilai DPP	Nilai PPN
1	PT BINA BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796538	24 Februari 2015	542,482,120	54,248,212
2	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796540	02 April 2015	21,431,739	2,143,174
3	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796543	02 April 2015	16,818,778	1,681,878
4	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796544	02 April 2015	1,254,249	125,425
5	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796549	17 Juni 2015	92,850,491	9,285,049
6	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796550	17 Juni 2015	885,199	88,520
7	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796551	17 Juni 2015	1,127,986	112,799
8	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796552	16 Juni 2015	66,013	6,601
9	PT GRAHA	100011513796539	16 Maret 2015	1,854,545,455	185,454,546

Halaman 118 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	GEMILANG PT GRAHA	100011513796546	29 April 2015	1,987,794,545	198,779,455
11	GEMILANG PT GRAHA	100011513796548	26 Mei 2015	1,779,714,545	177,971,455
12	GEMILANG PT GRAHA	100011513796555	29 Juni 2015	1,379,318,182	137,931,818
13	GEMILANG PT GRAHA	110011513796556	01 September 2015	1,040,400,000	104,040,000
14	GEMILANG PT GRAHA	110011513796557	30 September 2015	1,559,023,636	155,902,363
15	GEMILANG PT GRAHA	110011513796558	01 Oktober 2015	64,036,364	6,403,636
16	GEMILANG PT BALI				
16	SUNRISE	100011513796541	02 April 2015	29,250,000	2,925,000
17	BEACH PT GRAHA	100311602833408	02 Maret 2016	1,794,075,218	79,407,521
18	GEMILANG PT GRAHA	100311602833416	31 Maret 2016	149,418,182	14,941,818
19	GEMILANG PT GRAHA	100311602833422	12 April 2016	861,120,164	86,112,016
20	GEMILANG PT GRAHA	100311602833430	10 Juni 2016	223,500,000	22,350,000
21	GEMILANG PT BALI				
21	NUSADEWAT	100311602833413	08 Maret 2016	22,500,000	2,250,000
	A VILLAGE PT BALI				
22	NUSADEWAT	100311602833414	08 Maret 2016	7,150,000	715,000
	A VILLAGE PT BALI				
23	NUSADEWAT	100311602833431	15 Juni 2016	550,000	55,000
	A VILLAGE PT BALI				
24	NUSADEWAT	100311602833432	15 Juni 2016	2,500,000	250,000
	A VILLAGE				
25	PT AMERTHA	100311602833409	02 Maret 2016	113,469,091	11,346,909
	PT GARUDA				
26	ADHIMATRA	100011513796554	29 Juni 2015	110,604,851	11,060,485
	INDONESIA PT GARUDA				
27	ADHIMATRA	100011513796542	02 April 2015	134,436,617	13,443,662
	INDONESIA PT GARUDA				
28	ADHIMATRA	100011513796553	25 Juni 2015	153,619,643	15,361,964
	INDONESIA PT GARUDA				
29	ADHIMATRA	100011513796547	20 Mei 2015	170,761,067	17,076,107
	INDONESIA PT GARUDA				
30	ADHIMATRA	100011513796545	23 April 2015	188,711,562	18,871,156

Halaman 119 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA				
--	-----------	--	--	--	--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
6. Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
7. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Elfin Rudianto Sitorus**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UUKUP menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh Pengurus, wakil disini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

Halaman 120 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Jaya Bali Sejahtera sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini yang telah melakukan kegiatan kepengurusan perusahaan seperti menentukan kebijakan, mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan seperti menandatangani kontrak dengan pihak ketiga maka Terdakwa merupakan pengurus dari PT Jaya Bali Sejahtera yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atas nama PT Jaya Bali Sejahtera selaku wajib pajak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Elfin Rudianto Sitorus** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja artinya pelaku harus menyadari akan perbuatannya dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan yang mengikutinya, oleh karena itu makna dengan sengaja adalah pelaku harus sengaja untuk melakukan perbuatan dalam unsur berikutnya berupa: Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Menimbang, bahwa Dalam teori ilmu hukum pidana ada tiga gradasi tentang kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagaimana maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), pada kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu detik yang telah terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat yang pasti/harus terjadi;

Halaman 121 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) atau sering juga disebut kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama dari PT Jaya Bali Sejahtera, sebagai pengurus perusahaan Terdakwa adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan di perusahaan misalnya menandatangani kontrak dengan pihak lain dan melakukan kegiatan lain dalam rangka melakukan kegiatan kepengurusan;

Menimbang, bahwa PT Jaya Bali Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Konstruksi Bangunan Elektrikal dan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah melakukan transaksi dengan berbagai perusahaan diantaranya PT PT Amertha, PT Garuda Adhimatra Indonesia, PT Bali Sunrise Beach, PT Graha Gemilang, PT Bina Bangun Perkasa, PT Bali Nusa Dewata Village, PT Talkindo Selaksa Anugrah;

Menimbang, bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Jaya Bali Sejahtera dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016 dengan perusahaan-perusahaan tersebut telah dikenakan PPN sebesar 10% namun SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, November dan Desember 2015 serta bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoaman Dananhadi diperoleh fakta bahwa sebagai wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera wajib menyampaikan SPT Masa PPN namun PT Jaya Bali Sejahtera tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak September sampai dengan Oktober 2015, dan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dari SPT Masa PPN pada bulan Januari, Februari, Maret, April Mei, Juni dan November 2015, PT Jaya Bali Sejahtera melaporkan penyerahan sebesar Rp.0 atau nihil namun pada kenyataannya berdasarkan data yang ada di KPP Pratama Badung Utara terdapat faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera pada masa tahun 2015 bulan Februari sampai dengan Juni 2015,

Halaman 122 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dan Oktober 2015 dengan total nilai yang belum dilapor mencapai Rp.1.112.913.305;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Jaya Bali Sejahtera pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah menerima PPN dari lawan transaksi namun tidak namun PT Jaya Bali Sejahtera tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak September sampai dengan Oktober 2015, dan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016 dan telah menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar pada masa tahun 2015 bulan Februari sampai dengan Juni 2015, September dan Oktober 2015, berarti PT Jaya Bali Sejahtera telah memungut PPN pada masa pajak tersebut namun tidak disetorkan kepada kantor pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Jaya Bali Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka KPP Pratama Badung Utara melalui Account Representative sebagai pengawas telah melakukan himbauan kepada PT Jaya Bali Sejahtera secara tertulis sebanyak dua kali, kunjungan sebanyak 1 kali dan konseling 1 kali;

Menimbang, bahwa kunjungan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 dan respon yang diberikan oleh Hartoyo selaku komisaris adalah PT Jaya Bali Sejahtera adanaiat untuk membayar dan akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN sebelum tanggal 31 Maret 2017 namun sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran pajak terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Lestina Indah Ramasi Sitorus dan Hartoyo yang tidak lain adalah mantan pegawai PT Jaya Bali Sejahtera menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh mereka melaporkan nihil untuk masa pajak yang seharusnya tidak nihil dan pada saat mereka meminta uang untuk menyetor PPN, Terdakwa tidak memberikannya dan hanya mengatakan "iya nanti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa menghendaki PT Jaya Bali Sejahtera untuk tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan pajak sehingga bentuk kesengajaan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan, adalah betu-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 11 KUP, pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

Halaman 123 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Jaya Bali yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada tanggal 19 Maret 2014 dengan NPWP. 66.689.043.9-906.000 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa PT Jaya Bali Sejahtera adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Harmanto Darmali, Sumarjianto, Djoko Purnomo, S.E, Ir. Latief Jailani, Eni, Rina, Gunardi menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan diantaranya PT Bina Bangun Perkasa, PT Graha Gemilang, PT Bali Nusa Dewata Village, PT Amertha, PT Bali Sunrise Beach, PT Garuda Adhimatra Indonesia dan PT Talkindo Selaksa Anugrah dalam kurun waktu antara Tahun 2015 sampai Dengan 2016 telah bekerja sama dengan PT Jaya Bali Sejahtera dan untuk kerjasama tersebut diterbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN oleh PT Jaya Bali Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

No	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796538 24 Februari 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	542.482.120	54.248.212
2	0100011513796540 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	21.431.739	2.143.174
3	0100011513796543 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	16.818.778	1.681.878
4	0100011513796544 02 April 2015	PT. BINA BANGUN PERKASA	1.254.249	125.425
5	0100011513796549	PT. BINA BANGUN	92.850.491	9.285.049

Halaman 124 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2015	PERKASA		
6	0100011513796550	PT. BINA BANGUN	885.199	88.520
	17 Juni 2015	PERKASA		
7	0100011513796551	PT. BINA BANGUN	1.127.986	112.799
	17 Juni 2015	PERKASA		
8	0100011513796552	PT. BINA BANGUN	66.013	6.601
	16 Juni 2015	PERKASA		
9	0100011513796539	PT. GRAHA GEMILANG	1.854.545.455	185.454.546
	16 Maret 2015			
10	0100011513796546	PT. GRAHA GEMILANG	1.987.794.545	198.779.455
	29 April 2015			
11	0100011513796548	PT. GRAHA GEMILANG	1.779.714.545	177.971.455
	26 Mei 2015			
12	0100011513796555	PT. GRAHA GEMILANG	1.379.318.182	137.931.818
	29 Juni 2015			
13	0110011513796556	PT. GRAHA GEMILANG	1.040.400.000	104.040.000
	01 September 2015			
14	0110011513796557	PT. GRAHA GEMILANG	1.559.023.636	155.902.363
	30 September 2015			
15	0110011513796558	PT. GRAHA GEMILANG	64.036.364	6.403.636
	01 Oktober 2015			
16	0100011513796559	PT. GRAHA GEMILANG	30.000.000	3.000.000
	02 November 2015			
17	0100011513796556	PT. GRAHA GEMILANG	30.000.000	3.000.000
	1			
	12 November 2015			
18	0100011513796556	PT. GRAHA GEMILANG	1.683.871.636	168.387.163
	2 13 November 2015			
19	0110011513796568	PT. GRAHA GEMILANG	974.287.309	97.428.730
	23 Desember 2015			
20	0100011513796564	PT. BALI NUSA	25.000.000	2.500.000
	1 Desember 2015	DEWATA VILLAGE		
21	0100011513796565	PT. BALI NUSA	3.300.000	330.000
	1 Desember 2015	DEWATA VILLAGE		
22	0100011513796569	PT. BALI NUSA	10.450.000	1.045.000
	15 Desember 2015	DEWATA VILLAGE		
23	0100011513796567	PT. AMERTHA	39.000.000	3.900.000
	17 Desember 2015			
24	0110011513796566	PT. AMERTHA	156.000.000	15.600.000
	17 Desember 2015			
25	0100011513796541	PT. BALI SUNRISE	29.250.000	2.925.000
	2 April 2015	BEACH		
26	0100011513796542	PT. GARUDA	134.436.617	13.443.662
	02 April 2015	ADHIMATRA		
		INDONESIA		
27	0100011513796545	PT. GARUDA	188.711.562	18.871.156
	23 April 2015	ADHIMATRA		

Halaman 125 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INDONESIA		
28	0100011513796547 20 Mei 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	170.761.067	17.076.107
29	0100011513796 25 Juni 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	153.619.643	15.361.964
30	0100011513796554 29 Juni 2015	PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	110.604.851	11.060.485

Tahun 2016

No	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100311602833408 02 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	1.794.075.218	179,407,521
2	0100311602833416 31 Maret 2016	PT GRAHA GEMILANG	149.418.182	14,941,818
3	0100311602833422 12 April 2016	PT GRAHA GEMILANG	861.120.164	86,112,016
4	0100311602833430 10 Juni 2016	PT GRAHA GEMILANG	223.500.000	22,350,000
5	0100311602833413 08 Maret 2016	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	22.500.000	2,250,000
6	0100311602833414 08 Maret 2016	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	7.150.000	715,000
7	0100311602833431 15 Juni 2016	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	550.000	55,000
8	0100311602833432 15 Juni 2016	PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	2.500.000	250,000
9	0100311602833425 31 Mei 2016	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	43.500.000	4,350,000
10	0100311602833433 24 Juni 2016	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	43.500.000	4,350,000
11	0100311602833409 02 Maret 2016	PT AMERTHA	113.469.091	11,346,909
12	0100311602833410 02 Maret 2016	PT AMERTHA	28.367.456	2,836,745
13	0100311602833411 04 Maret 2016	PT AMERTHA	13.513.636	1,351,364
14	0100311602833412	PT AMERTHA	54.055.773	5,405,577

Halaman 126 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04 Maret 2016			
15	0100311602833419	PT AMERTHA	23.791.919	2,379,192
	04 April 2016			
16	0100311602833421	PT AMERTHA	95.164.677	9,516,468
	04 April 2016			
17	0100311602833423	PT AMERTHA	8.110.509	811,051
	16 Mei 2016			
18	0100311602833424	PT AMERTHA	32.441.127	3,244,113
	16 Mei 2016			
19	0100311602833427	PT AMERTHA	99.197.716	9,919,772
	06 Juni 2016			
20	0100311602833429	PT AMERTHA	337.660.353	33,766,035
	13 Juni 2016			
21	0100311602833434	PT AMERTHA	21.186.364	2,118,636
	09 Agustus 2016			
22	0100311602833435	PT AMERTHA	103.730.909	10,373,091
	09 Agustus 2016			
23	0100311602833436	PT AMERTHA	57.631.014	5,763,101
	01 September 2016			
24	0100311602833438	PT AMERTHA	30.549.091	3,054,909
	03 Oktober 2016			
25	0100311602833439	PT AMERTHA	20.829.091	2,082,909
	03 Oktober 2016			

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut terlihat bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan dan telah menarik PPN sebesar 10% dari setiap transaksi tersebut yakni pada masa Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2015 serta pada masa Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Dananhadi yang menjabat sebagai *Account Representative* KPP Pratama Badung Utara, dijelaskan dipersidangan bahwa PT Jaya Bali Sejahtera untuk tahun pajak 2015 dan 2016 melaporkan pada tahun 2015 PT Jaya Bali Sejahtera sudah melaporkan PPN yaitu SPT PPN masa Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Oktober dan Desember 2015 serta untuk tahun 2016 yang dilaporkan hanya masa Januari 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun pajak 2015 :

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-01005179/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	11/02/2015
2	Januari	Pembetulan Ke-1	S-01014303/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	(1.218.220)	15/04/2015
3	Februari	Normal	S-01010040/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	13/03/2015

Halaman 127 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Maret	Normal	S-01014302/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2015	Nihil	15/04/2015
5	April	Normal	S-01000273/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
6	Mei	Normal	S-01000272/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
7	Juni	Normal	S-01000271/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	Nihil	06/01/2016
8	Nopember	Normal	S-01008488/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	11.262.035	01/03/2016
9	Desember	Normal	S-01008487/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	100.314.030	01/03/2016

Tahun pajak 2016 :

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-01008506/PPN1111/ WPJ.17/KP.0603/2016	(84.569.636)	01/03/2016

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Dananhadi juga diperoleh fakta bahwa data-data tersebut diatas diperoleh dari tiga aplikasi yang berbeda, yang pertama bernama Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak sebagai awal analisis berkitan dengan SPT yang pernah dilaporkan oleh Wajib Pajak, kemudian aplikasi Konfirmasi Pajak Pengeluaran dan Pajak Pemasukan, disana terlihat yang sudah dilaporkan atau yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan yang sudah ataupun yang belum oleh lawan transaksi kemudian Aplikasi E-Faktur adalah aplikasi yang menampilkan faktur yang pernah dibuat oleh wajib pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap fakta bahwa PT Jaya Bali Sejahtera tidak melaporkan seluruh PPN yang telah dipungut dari lawan transaksinya yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016 padahal kenyataannya di masa tersebut PT Jaya Bali Sejahtera telah menarik PPN dari lawan transaksinya seperti perusahaan PT. Bina Bangun Perkasa, PT. Graha Gemilang, PT. Bali Nusa Dewata Village, PT. Amertha, PT. Bali Sunrise Beach, PT. Garuda Adhimatra Indonesia, dan PT Talkindo Selaksa Anugrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tidak menyampaikan surat pemberitahuan telah terpenuhi;

Halaman 128 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 3 ayat (1) KUP setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada tanggal 19 Maret 2014 dengan NPWP. 66.689.043.9-906.000 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagai Pengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungut pajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiban PT Jaya Bali Sejahtera yaitu memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Syahrul Misbah yang merupakan kepada seksi KPP Pratama Badung Utara terungkap fakta bahwa PT Jaya Bali Sejahtera pada tahun 2015 melapor dibulan Januari, dibulan yang sama ada pembetulan kesatu dari yang tadinya nihil menjadi lebih bayar sebesar Rp.1.218.280,- sedangkan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan pada KPP Pratama Badung Utara untuk Masa Pajak Februari 2015 melaporkan penyerahan sebesar Rp.0., atau nihil, Masa Pajak Maret 2015 melaporkan penyerahan sebesar Rp 0,- atau nihil, Masa Pajak April 2015 melaporkan penyerahan sebesar Rp 0,- atau nihil, Masa Pajak Mei 2015 melaporkan penyerahan sebesar Rp 0,- atau nihil, Masa Pajak Juni 2015 melaporkan penyerahan sebesar Rp 0,- atau nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Dananhadi, Harmanto Darmali, Djoko Purnama, S.E., Rina dan Gunardi telah terungkap fakta bahwa PT Jaya Bali Sejahtera telah menarik pajak PPN dari lawan transaksinya di SPT Masa PPN Februari sampai dengan Masa Pajak Juni 2015, dengan rincian faktur pajak sebagai berikut:

Februari 2015 :

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796538	PT BINA BANGUN	542.482.120	54,248,212

Halaman 129 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Februari 2015	PERKASA		
--	------------------	---------	--	--

Maret 2015 :

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796539 16 Maret 2015	PT GRAHA GEMILANG	1.854.545.455	185,454,546

April 2015 :

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796541 2 April 2015	PT BALI SUNRISE BEACH	29.250.000	2,925,000
2	0100011513796542 02 April 2015	PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	134.436.617	13,443,662
3	0100011513796540 02 April 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	21.431.739	2,143,174
4	0100011513796543 02 April 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	16.818.778	1,681,878
5	0100011513796544 02 April 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	1.254.249	125,425
6	0100011513796545 23 April 2015	PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	188.711.562	18,871,156
7	0100011513796546 29 April 2015	PT GRAHA GEMILANG	1.987.794.545	198,779,455
	JUMLAH		2.379.697.490	237.969.750

Mei 2015 :

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
1	0100011513796547 20 Mei 2015	PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	170.761.067	17,076,107
2	0100011513796548 26 Mei 2015	PT GRAHA GEMILANG	1.779.714.545	177,971,455
	JUMLAH		1.950.475.612	195.047.562

Juni 2015 :

No.	Nomor dan Tanggal	Nama Lawan Transaksi	Nilai DPP	Nilai PPN
-----	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Halaman 130 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	Faktur			
1	0100011513796552 16 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	66.013	6,601
2	0100011513796549 17 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	92.850.491	9,285,049
3	0100011513796550 17 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	885.199	88,520
4	0100011513796551 17 Juni 2015	PT BINA BANGUN PERKASA	1.127.986	112,799
5	0100011513796555 29 Juni 2015	PT GRAHA GEMILANG	1.379.318.182	137,931,818
6	0100011513796554 29 Juni 2015	PT GARUDA ADHIMATRA INDONESIA	110.604.851	11,060,485
	JUMLAH		1.738.472.365	173.847.236

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jika dikaitkan dengan keterangan saksi Syahrul Misbah, maka terlihat ketidaksesuaian antara SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT Jaya Bali Sejahtera kepada KPP Pratama Badung Utara pada bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2015 dengan PPN kurang bayar nihil karena pada masa pajak tersebut kenyataannya PT Jaya Bali Sejahtera telah melakukan transaksi dan memungut PPN perusahaan-perusahaan lawan transaksinya seperti PT Bina Bangun Perkasa, PT Graha Gemilang, PT Bali Sunrise Beach dan PT Garuda Adhimatra Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, telah terpenuhi;

Ad.5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa PT Jaya Bali Sejahtera tidak melaporkan secara keseluruhan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksinya yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016 padahal kenyataannya di masa tersebut PT Jaya Bali Sejahtera telah menarik PPN dari lawan transaksinya seperti perusahaan PT. Bina Bangun Perkasa, PT. Graha Gemilang, PT. Bali Nusa Dewata Village, PT. Amertha, PT. Bali Sunrise Beach,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Garuda Adhimatra Indonesia, dan PT Talkindo Selaksa Anugrah, selain itu PT Jaya Bali Sejahtera juga telah terbukti telah menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar pada bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2015 dengan PPN kurang bayar nihil;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaporkannya PPN yang telah dipungut dan dibuatnya SPT Masa PPN yang tidak benar maka PT Jaya Bali Sejahtera telah menerima PPN dari lawan transaksinya namun tidak disetorkan kepada negara melalui KPP Pratama Negara yakni SPT Masa PPN nya di masa pajak Februari 2015 sampai dengan Juni 2015, September 2015 sampai dengan Oktober 2015, Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 dan Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, telah terpenuhi;

Ad.6. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berarti kerugian negara baik yang sudah terjadi ataupun berpotensi terjadinya kerugian pada pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Arief Budiman, S.E., M.M., kerugian dari pendapatan negara akibat tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang dipungut oleh PT Jaya Bali Sejahtera dalam masa pajak Februari 2015 sampai dengan Juni 2015, september 2015 dan Oktober 2015, Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016 oleh PT Jaya Bali Sejahtera, adalah sebagai berikut:

Masa Pajak Februari 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	542.482.120
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	54.248.212
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	1.218.220
PPN Kurang (Lebih) Bayar	53.029.992
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	53.029.992

Masa Pajak Maret 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.854.545.455

Halaman 132 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	185.454.546
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	185.454.546
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	185.454.546

Masa Pajak April 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	2.379.697.490
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	237.969.750
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	237.969.750
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	237.969.750

Masa Pajak Mei 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.950.475.612
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	195.047.562
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	195.047.562
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	195.047.562

Masa Pajak Juni 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.738.472.365
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	173.847.236
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	173.847.236
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	173.847.236

Masa Pajak September 2015

Halaman 133 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	2.599.423.636
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	259.942.363
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	259.942.363
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	259.942.363

Masa Pajak Oktober 2015

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	64.036.364
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	6.403.636
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	6.403.636
Dikompensasikan	
Kerugian pada pendapatan negara	6.403.636

Masa Pajak Maret 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	2.182.549.356
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	218.254.934
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	84.569.636
PPN Kurang (Lebih) Bayar	133.685.298
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	133.685.298

Masa Pajak April 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	980.076.760
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	98.007.676
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	98.007.676

Halaman 134 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	98.007.676

Masa Pajak Mei 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	84.051.636
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	8.405.164
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	8.405.164
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	8.405.164

Masa Pajak Juni 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	706.908.069
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	70.690.807
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	70.690.807
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	70.690.807

Masa Pajak Agustus 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	124.917.273
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	12.491.727
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	12.491.727
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	12.491.727

Masa Pajak September 2016

Halaman 135 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	57.631.014
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	5.763.101
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	5.763.101
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	5.763.101

Masa Pajak Oktober 2016

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	51.378.182
Pajak Keluaran yang harus di pungut sendiri	5.137.818
Pajak Masukan	0
PPN di setor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	5.137.818
Dikompensasikan	0
Kerugian pada pendapatan negara	5.137.818

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas akibat tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang dipungut oleh PT Jaya Bali Sejahtera dalam masa pajak Februari 2015 sampai dengan Juni 2015, september 2015 dan Oktober 2015, Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 serta Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016, menimbulkan kerugian negara dengan total Rp. 1.445.876.676,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dapat menimbulkan kerugian negara telah pula terpenuhi;

Ad.7. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Penuntut Umum mendakwakan ketentuan tersebut, karena menurut Penuntut Umum peristiwa pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai ajaran penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama, disyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa pidana itu, yang diantara mereka terdapat pelaku yang dikwalifisir sebagai orang yang melakukan, pelaku ang menyuruh melakukan dan terdapat pula pelaku yang dikwalifisir sebagai orang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur diatas, PT Jaya Bali Sejahtera dalam menjalankan kegiatan usahanya dikendalikan oleh pengurus Elfin Rudianto Sitorus sebagai Direktur Utama dan I Made Sudari sebagai Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Elfin Rudianto Sitorus telah mewakili perusahaan PT Jaya Bali Sejahtera dengan menandatangani kontrak untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti PT. Graha Gemilang, PT. Bali Sunrice Beach, PT. Bali Nusa Dewata Village, PT. Talkindo Selaksa Anugrah, PT. Bina Bangun Perkasa dan PT. Garuda Adhimatra serta telah menerima pembayaran PPN dari lawan transaksi tersebut dan I Made Sudari selaku Komisaris Utama PT Jaya Bali Sejahtera, juga telah menandatangani kontrak dengan PT Amertha dan telah menerima PPN untuk transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa Elfin Rudianto Sitorus bersama-sama dengan I Made Sudari sebagai pengurus perusahaan yang senyatanya telah mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha perusahaan adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab atas perbuatan PT Jaya Bali Sejahtera yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar dan tidak menyetor PPN yang telah dipungutnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian negara tidak terpenuhi karena Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudari sebagai pengurus telah menyerahkan dua buah Sertifikat Hak Milik No.1085 dan No.1603 kepada penyidik pada Kantor Wilayah DJP Bali menurut Majelis Hakim penyerahan kedua sertifikat

Halaman 137 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat membuat tidak terpenuhinya unsur kerugian negara dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas unsur dapat menimbulkan kerugian negara telah terpenuhi dan penyerahan dua buah sertifikat tersebut dipandang sebagai itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya tetapi bukan menghilangkan sifat melawan hukum;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pendapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan karenanya haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 39 UU KUP mencantumkan ketentuan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka penjatuhan pidana denda dalam perkara a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 UU KUP disebutkan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Arief Budiman, S.E., M.M., bahwa kerugian negara akibat PT Jaya Bali Sejahtera yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak menyetorkan PPN yang dipungut adalah adalah Rp. 1.445.876.676,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Elfin Rudianto Sitorus dan I Made Sudaris sebagai pengurus perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jumlah faktur pajak yang penerimaan uangnya diterima langsung oleh Elfin Rudianto Sitorus adalah sebagai berikut:

No.	Nama Lawan Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	Nilai DPP	Nilai PPN
1	PT BINA BANGUN PERKASA	100011513796538	24 Februari 2015	542,482,120	54,248,212
2	PT BINA	100011513796540	02 April 2015	21,431,739	2,143,174

Halaman 138 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUN PERKASA PT BINA				
3	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796543	02 April 2015	16,818,778	1,681,878
4	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796544	02 April 2015	1,254,249	125,425
5	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796549	17 Juni 2015	92,850,491	9,285,049
6	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796550	17 Juni 2015	885,199	88,520
7	BANGUN PERKASA PT BINA	100011513796551	17 Juni 2015	1,127,986	112,799
8	BANGUN PERKASA PT GRAHA	100011513796552	16 Juni 2015	66,013	6,601
9	GEMILANG PT GRAHA	100011513796539	16 Maret 2015	1,854,545,455	185,454,546
10	GEMILANG PT GRAHA	100011513796546	29 April 2015	1,987,794,545	198,779,455
11	GEMILANG PT GRAHA	100011513796548	26 Mei 2015	1,779,714,545	177,971,455
12	GEMILANG PT GRAHA	100011513796555	29 Juni 2015	1,379,318,182	137,931,818
13	GEMILANG PT GRAHA	110011513796556	01 September 2015	1,040,400,000	104,040,000
14	GEMILANG PT GRAHA	110011513796557	30 September 2015	1,559,023,636	155,902,363
15	GEMILANG PT BALI	110011513796558	01 Oktober 2015	64,036,364	6,403,636
16	SUNRISE BEACH PT GRAHA	100011513796541	02 April 2015	29,250,000	2,925,000
17	GEMILANG PT GRAHA	100311602833408	02 Maret 2016	1,794,075,218	79,407,521
18	GEMILANG PT GRAHA	100311602833416	31 Maret 2016	149,418,182	14,941,818
19	GEMILANG PT GRAHA	100311602833422	12 April 2016	861,120,164	86,112,016
20	GEMILANG PT BALI	100311602833430	10 Juni 2016	223,500,000	22,350,000
21	NUSADEWATA VILLAGE PT BALI	100311602833413	08 Maret 2016	22,500,000	2,250,000
22	NUSADEWATA	100311602833414	08 Maret 2016	7,150,000	715,000

Halaman 139 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	VILLAGE PT BALI NUSADEWATA	100311602833431	15 Juni 2016	550,000	55,000
24	VILLAGE PT BALI NUSADEWATA	100311602833432	15 Juni 2016	2,500,000	250,000
25	VILLAGE PT AMERTHA PT GARUDA	100311602833409	02 Maret 2016	113,469,091	11,346,909
26	ADHIMATRA INDONESIA PT GARUDA	100011513796554	29 Juni 2015	110,604,851	11,060,485
27	ADHIMATRA INDONESIA PT GARUDA	100011513796542	02 April 2015	134,436,617	13,443,662
28	ADHIMATRA INDONESIA PT GARUDA	100011513796553	25 Juni 2015	153,619,643	15,361,964
29	ADHIMATRA INDONESIA PT GARUDA	100011513796547	20 Mei 2015	170,761,067	17,076,107
30	ADHIMATRA INDONESIA	100011513796545	23 April 2015	188,711,562	18,871,156

Menimbang, bahwa oleh karena itu kerugian negara yang dimaksud setelah dikurangi nilai kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari masa sebelumnya sehingga kerugian negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa dan harus disetorkan ke negara adalah Rp. 1.344.553.713,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) oleh karena itu pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa adalah dua kali dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan harus dikembalikan kepada orang yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 140 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah beritikad baik untuk melunasi pajak terutang PT Jaya Bali Sejahtera dengan menyerahkan 2 (dua) buah SHM yaitu SHM No.1603 dan SHM No.1085 milik Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELFIN RUDIANTO SITORUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp. 1.344.558.713,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), sehingga jumlah denda sebesar Rp. 2.689.117.426,- (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Invoice Progress 100% yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 002/JBS/IN-PRG/GRT-MBG/VI016 tanggal 24 Juni 2016	1 Lembar	Copy

Halaman 141 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran progress 100% Paket pekerjaan grease trap di Galeria Bali, banyaknya uang Rp 47.850.000,-	1 Lembar	Copy
3	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833433 tanggal 24 Juni 2016	1 Lembar	Copy
4	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 31 Mei 2016 untuk pembayaran down payment 50% Paket pekerjaan grease trap di Galeria Bali, banyaknya uang Rp 47.850.000,-	1 Lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833425 tanggal 31 Mei 2016	1 Lembar	Copy
6	Bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga PT Talkindo Selaksa Anugrah kepada BCA I Made Sudaris tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 46.541.500.	1 Lembar	Copy
7	Bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga PT Talkindo Selaksa Anugrah kepada BCA I Made Sudaris tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 46.541.500.	1 Lembar	Copy
8	Foto pengerjaan Panel, Pompa Grease Trap, dan Instalasi Kabel.	9 Lembar	Hasil Print Foto
9	SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016.	1 set	Copy
10	SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016	1 set	Copy
11	Perjanjian Kerja Kontrak ME Grease Trap Nomor 003/IE/ME/BT-GAL/V/16-PRJ	1 set	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **ENI**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keterangan Terdaftar nomor S-1555KT/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 19 Maret 2014 PT JAYA BALI SEJAHTERA beserta lampiran pendukung : Asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen saat pendaftaran, Copy KTP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy Kartu NPWP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Asli Formulir Pendaftaran NPWP, Copy SKTU, Copy Legalisir Akta Pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA no 15 tanggal 19 Februari 2014	18 lembar	Asli
2	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-50PKP/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014 PT JAYA BALI SEJAHTERA beserta lampiran pendukung : Asli SKT, Asli BA Perubahan Data WP dan/atau PKP nomor BA-44PD/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014, Asli Surat Pemberitahuan Perubahan Data S-46PD/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 24 September 2014, Asli Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan PKP Berdasarkan	35 lembar	Asli

Halaman 142 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



	Permohonan WP nomor LAP-520/WPJ.17/KP.06/2014 tanggal 23 September 2014, Asli Surat Tugas nomor ST-133V/WPJ.17/KP.0603/2014, Asli Screenshoot BPS Permohonan Pengukuhan PKP dari aplikasi e-reg nomor S-2683R/WPJ.17/KP.0603/2014 tanggal 18 September 2014, Copy LPAD Permohonan Pengukuhan PKP nomor S-2683R/WPJ.17/KP.0603/2014, Copy Formulir Pengukuhan PKP, Copy Kartu NPWP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy TDP JAYA BALI SEJAHTERA, Copy SIUP Menengah PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1928/22-08/BPPT/SIUP-M/IV/2014, Copy SKT PT JAYA BALI SEJAHTERA, Copy Surat dari KPP Pratama Badung Utara tentang Hak dan Kewajiban WP serta Sanksi bunga dan administrasi, Copy KTP ELFIN RUDIANTO SITORUS, Copy Akte Pendirian PT JAYA BALI SEJAHTERA, Copy Surat Keterangan Tempat Usaha No 4466/I/IX/2014, Copy Denah lokasi, Copy Surat Keterangan Rekomendasi No 102/TL/IX/2014		
3	Nota Dinas nomor ND-621/WPJ.17/KP.0604/2017 tanggal 23 November 2017 beserta Daftar Sisa Tagihan Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA	2 lembar	Asli
4	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01020585/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
5	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01020586/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
6	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01021914/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
7	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01026366/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
8	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01031169/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
9	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01034453/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
10	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01038832/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	6 lembar	Asli
11	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01044880/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014	5 lembar	Asli
12	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak	6 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01048702/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2014		
13	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01001764/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
14	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01005177/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
15	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01010038/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
16	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01014157/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	7 lembar	Asli
17	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000635/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
18	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000636/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
19	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000458/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2015	5 lembar	Asli
20	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000462/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
21	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000461/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
22	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000463/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
23	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000464/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
24	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak November 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000459/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
25	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000460/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
26	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 Normal beserta LPAD Nomor S-01008486/PPH2114/WPJ.17/KP.0603/2016	5 lembar	Asli
27	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004074/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
28	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051779/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015 beserta Lampiran SPT Normal copy 3 lembar	7 lembar	Asli
29	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004075/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli

Halaman 144 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-010051989/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	8 lembar	Asli
31	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004076/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
32	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051780/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
33	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 Normal beserta LPAD Nomor S-01004077/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
34	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01051781/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	6 lembar	Asli
35	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01005179/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
36	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S-01014303/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	4 lembar	Asli
37	SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01010040/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
38	SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01014302/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015	3 lembar	Asli
39	SPT Masa PPN Masa Pajak April 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000273/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
40	SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000272/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
41	SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01000271/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
42	SPT Masa PPN Masa Pajak November 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01008488/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	4 lembar	Asli
43	SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2015 Normal beserta LPAD Nomor S-01008487/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	4 lembar	Asli
44	SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 Normal beserta LPAD Nomor S-01008506/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2016	3 lembar	Asli
45	Permintaan Sertifikat Elektronik dengan LPAD Nomor PEM:01007676\906\sep\2015	6 lembar	Asli

Dikembalikan kepada Saksi **SYAHRUL MISBAH**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Printout profil Wajib Pajak PT JAYA BALI SEJAHTERA	13 lembar	Asli
2	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor	1 lembar	Asli

Halaman 145 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lap-1/WPJ.17/KP.0609/2017 tanggal 24 Januari 2017		
3	Laporan Pelaksanaan Kunjungan dan Pengamatan nomor Lap-1/WPJ.17/KP.0609/2017 tanggal 24 Januari 2017	2 lembar	Asli
4	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor BA-01/WPJ.17/KP.0609/2016 tanggal 6 Februari 2017	1 lembar	Asli
5	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-6/WPJ.17/KP.06/2017 tanggal 11 Januari 2017 beserta lampirannya	5 lembar	Asli
6	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2016 nomor S-41281/WPJ.17/KP.06/2017 tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya	3 lembar	Asli
7	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan nomor S-40632/WPJ.17/KP.06/2016 tanggal 27 September 2016 beserta lampirannya	2 lembar	Asli
8	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2015 nomor S-51435/WPJ.17/KP.06/2016 tanggal 10 November 2015	2 lembar	Asli
9	Printout Formulir 1771-V Lampiran - V SPT Tahunan PPh Badan PT JAYA BALI SEJAHTERA Tahun Pajak 2014	1 lembar	Asli
10	Printout Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2015 PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
11	Printout Formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
12	Screen Shoot google maps jalan Dalung Permai	2 lembar	Asli

Dikembalikan kepada Saksi **I NYOMAN DANANHADI**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Juni 2016 nominal Rp 122.615.000,-	1 lembar	Copy
2	Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Juni 2016 nominal Rp 99.995.000,-	1 lembar	Copy
3	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 10 Juni 2016 untuk pembayaran progress ke-10 (84,2642%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015 banyaknya uang Rp 245.850.000,-	1 lembar	Copy
4	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833430	1 lembar	Copy

Halaman 146 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 10 Juni 2016		
5	Invoice yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, ditandatangani tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
6	Risalah Pembayaran No. T10/JBS-GG/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
7	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan no. 010/GG-DC/BAPP- PK/VI/16 tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
8	Rekapitulasi Progress Proyek Drupadi Corner Seminyak Bali tanggal 10 Juni 2016	1 lembar	Copy
9	Bukti transfer Bank BCA tanggal 9 Mei 2016 nominal Rp 518.445.570,-	1 lembar	Copy
10	Bukti transfer Bank BCA tanggal 2 Mei 2016 nominal Rp 549.995.000,-	1 lembar	Copy
11	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 12 April 2016 untuk pembayaran termyn ke-9 (5,4627%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 947.232.180,-	1 lembar	Copy
12	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833422 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
13	Risalah Pembayaran No. T9-a/JBS-GG/IV/2016 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
14	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan no. 009-a/GG-DC/BAPP- PK/IV/16 tanggal 12 April 2016	1 lembar	Copy
15	Rekapitulasi Progress Proyek Drupadi Corner Seminyak Bali tanggal 11 April 2016	1 lembar	Copy
16	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 24 Maret 2016 untuk pembayaran Progress 100% Paket pekerjaan penyambungan listrik baru dengan daya 6.600 VA Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 024/LGL-GG/IX/2015, banyaknya uang Rp 164.360.000,-	1 lembar	Copy
17	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833416 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar	Copy
18	Invoice progress 100% yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-058/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
19	Risalah Pembayaran No. T1-PLN/JBS-GG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016	1 lembar	Copy
20	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 001/GG-DC/BAPP-PK/III/16 tanggal 24 Maret 2016	1 lembar	Copy
21	Progress Pengampurahan daya PLN 6.600 VA tanggal 28 Maret 2016	1 lembar	Copy
22	Bukti transfer Bank BCA tanggal 4 Maret 2016 nominal Rp 1.919.660.483,-	1 lembar	Copy

Halaman 147 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 2 Maret 2016 untuk pembayaran progress ke-8 (11,3811%) Kondisi progress saat ini 77,3837% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner di Seminyak Bali SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.973.482.740,-	1 lembar	Copy
24	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833408 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
25	Invoice progress ke 8 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-054/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
26	Risalah Pembayaran No. T8/JBS-GG/I/2016 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
27	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 008/GG-DC/BAPP-PK/I/16 tanggal 26 Januari 2016	1 lembar	Copy
28	Rekapitulasi Progress tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Copy
29	Bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Nov 2015 nominal Rp 1.736.669.200,-	1 lembar	Copy
30	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 30 September 2015 untuk pembayaran progress ke-5 (9,89%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.714.926.000,-	1 lembar	Copy
31	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796557 tanggal 30 September 2015	1 lembar	Copy
32	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-032/JBS/IN-PRG/IX/2015 tanggal 30 September 2015	1 lembar	Copy
33	Risalah Pembayaran No. T5/JBS-GG/IX/2015 tanggal 25 September 2015	1 lembar	Copy
34	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 005/GG-DC/BAPP-PK/IX/15 tanggal 25 September 2015	1 lembar	Copy
35	Rekapitulasi Progress tanggal 23 September 2015	1 lembar	Copy
36	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 Oktober 2015 untuk pembayaran DP 30% Penyambungan Listrik Baru Dengan Daya 6.600 VA Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 24/LGL-GG/IX/2015, banyaknya uang Rp 70.440.000,-	1 lembar	Copy
37	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796558 tanggal 1 Oktober 2015	1 lembar	Copy
38	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-033/JBS/IN-DP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015	1 lembar	Copy

Halaman 148 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 16 Okt 2015 nominal Rp 863.223.000,-	1 lembar	Copy
40	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 5 Okt 2015 nominal Rp 708.333.000,-	1 lembar	Copy
41	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 September 2015 untuk pembayaran progress ke-4 (6,6%) Kondisi progress saat ini 39,25% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.144.440.000,-	1 lembar	Copy
42	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796556 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
43	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-031/JBS/IN-PRG/IX/2015 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
44	Risalah Pembayaran No. T4/JBS-GG/VIII/2015 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
45	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 004/GG-DC/BAPP-PK/VIII/15 tanggal 1 September 2015	1 lembar	Copy
46	Rekapitulasi Progress tanggal 27 Agustus 2015	1 lembar	Copy
47	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2015 nominal Rp 317.537.455,-	1 lembar	Copy
48	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Agustus 2015 nominal Rp 200.000.000,-	1 lembar	Copy
49	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 Agust 2015 nominal Rp 499.993.000,-	1 lembar	Copy
50	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 29 Juni 2015 untuk pembayaran progress ke-3 (8,75%) Kondisi progress saat ini 32,65% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.517.250.000,-	1 lembar	Copy
51	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796555 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
52	Invoice progress ke 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-030/JBS/IN-PRG/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
53	Risalah Pembayaran No. T3/JBS-GG/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
54	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 003/GG-DC/BAPP-PK/VI/15 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Copy
55	Rekapitulasi Progress tanggal 27 Juni 2015	1 lembar	Copy
56	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 1 Juli 2015 nominal Rp 1.904.289.564,-	1 lembar	Copy
57	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 26 Mei 2015 untuk	1 lembar	Copy

Halaman 149 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran progress ke-2 (11,29%) Kondisi progress saat ini 23,90% Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Ruko Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 1.957.686.000,-		
58	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796548 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
59	Invoice progress ke 2 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-025/JBS/IN-PRG/V/2015 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
60	Risalah Pembayaran No. T2/JBS-GG/V/2015 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
61	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 002/GG-DC/BAPP-PK/V/15 tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
62	Rekapitulasi Progress tanggal 26 Mei 2015	1 lembar	Copy
63	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 22 Mei 2015 nominal Rp 2.126.935.164,-	1 lembar	Copy
64	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran progress ke-1 (12,61%) Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 2.186.574.000,-	1 lembar	Copy
65	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796546 tanggal 29 April 2015	1 lembar	Copy
66	Invoice progress ke 1 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-019/JBS/IN-PRG/IV/2015 tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
67	Risalah Pembayaran No. T1/JBS-GG/IV/2015 tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
68	Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 001/GG-DC/BAPP-PK/IV/15 tanggal 27 April 2015	1 lembar	Copy
69	Rekapitulasi Progress tanggal 25 April 2015	1 lembar	Copy
70	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 6 April 2015 nominal Rp 1.984.358.636,-	1 lembar	Copy
71	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran Down Payment Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur & MEP Project Drupadi Corner SPK No: 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015, banyaknya uang Rp 2.040.000.000,-	1 lembar	Copy
72	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796539 tanggal 16 Maret 2015	1 lembar	Copy
73	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-015/JBS/IN-DP/III/2015 tanggal 16 Maret 2015	1 lembar	Copy
74	Surat Perintah Kerja No. 160/SPK/TEK-GG/DRUPADI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015	10 lembar	Copy

Halaman 150 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Surat Perintah Kerja No. 24/LGL-GG/IX/2015 tanggal 15 September 2015	3 lembar	Copy
76	Kwitansi nomor 16-01-0005 tanggal 2 Februari 2016 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
77	Faktur Pajak nomor 010.001-16.05738514 tanggal 28 Januari 2016	1 lembar	Copy
78	Kwitansi nomor 16-01-0004 tanggal 2 Februari 2016 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
79	Faktur Pajak nomor 010.001-16.05738513 tanggal 26 Januari 2016	1 lembar	Copy
80	Kwitansi nomor 15-11-0002 tanggal 10 November 2015 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
81	Faktur Pajak nomor 010.003-15.95841700 tanggal 9 November 2015	1 lembar	Copy
82	Kwitansi nomor 15-11-0001 tanggal 3 Nopember 2015 nilai Rp 458.333.000,-	1 lembar	Copy
83	Faktur Pajak nomor 010.003-15.95841698 tanggal 2 November 2015	1 lembar	Copy
84	Rincian Bukti Permulaan Pemeriksaan PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Asli
85	Bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Januari 2016 nominal Rp 555.338.766,-	1 lembar	Copy
86	Bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2016 nominal Rp 487.138.655,-	1 lembar	Copy
87	Invoice Progress ke 7 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-045/JBS/IN-PRG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015	1 lembar	Copy
88	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796568 tanggal 23 Desember 2015	1 lembar	Copy
89	Bukti setoran Bank BCA tanggal 7 Desember 2015 nominal Rp 1.865.937.651,-	1 lembar	Copy
90	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-037/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015	1 lembar	Copy
91	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796559 tanggal 2 November 2015	1 lembar	Copy
92	Invoice Down Payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-038/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015	1 lembar	Copy
93	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796561 tanggal 12 November 2015	1 lembar	Copy
94	Invoice Progress ke 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 1-039/JBS/IN-PRG/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015	1 lembar	Copy
95	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796562 tanggal 13 November 2015	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **HARMANTO DARMALI**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
-----	-------------------	--------	------------

Halaman 151 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bilyet Giro Nomor AAZ 917574 nominal Rp 21.800.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
2	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000328 tanggal 11 April 2016	1 lembar	Asli
3	Journal Voucher nomor BNV 007839 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
4	Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
5	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 21.800.000,-	1 lembar	Asli
6	Kwitansi bermaterai Pembayaran Progress 100% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate 2, di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015 tanggal 8 Maret 2016, Nominal Rp 24.750.000,-	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833413 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
8	Berita Acara Serah Terima No 022/BAST/PCB-JBS/III/16 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
9	Invoice Progress 100% No I-050/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Asli
10	Perjanjian Kerjasama Untuk Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection No 019/BNV-BC/XI/2015	11 lembar	Copy
11	Interoffice Memorandum tanggal 16 Oktober 2015	3 lembar	Copy
12	Transaksi GL periode Desember 2015 PT BALI NUSADEWATA VILLAGE	1 lembar	Copy
13	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000624 tanggal 12 Juli 2016	1 lembar	Asli
14	Journal Voucher nomor BNV 008036 tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
15	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 3.294.000,-	1 lembar	Asli
16	Kwitansi bermaterai Retensi 5% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 605.000,-	1 lembar	Asli
17	Invoice Retensi 5% No 1-069/JBS/IN-RTS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Asli
18	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833431 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Copy
19	Berita Acara Serah Terima No 021/BAST/PCB-JBS/XII/15 tanggal 12 Desember 2015	1 lembar	Copy
20	Perjanjian Kerjasama Untuk Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing di Bali Collection No 020/BNV-BC/XI/2015	10 lembar	Copy
21	Purchase Request PT Bali Nusadewata Village No 044/PR-BNV/X/2015	3 lembar	Copy
22	Bilyet Giro Nomor ABB 390750 nominal Rp 7.722.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
23	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000293 tanggal 5 April 2016	1 lembar	Asli
24	Journal Voucher nomor BNV 007825 tanggal 24	1 lembar	Copy

Halaman 152 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2016		
25	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 7.722.000,-	1 lembar	Asli
26	Kwitansi bermaterai Pembayaran Progress 100% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 7.865.000,-	1 lembar	Asli
27	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833414 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
28	Invoice Progress 100% No 1-049/JBS/IN-PRG/III/2016 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Asli
29	Bilyet Giro Nomor ABB 396154 nominal Rp 3.294.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
30	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000625 tanggal 12 Juli 2016	1 lembar	Asli
31	Journal Voucher nomor BNV 008037 tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
32	Kwitansi bermaterai Retensi 5% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 yang berlokasi di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 2.750.000,-	1 lembar	Asli
33	Invoice Retensi 5% No 1-068/JBS/IN-RTS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Asli
34	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833432 tanggal 15 Juni 2016	1 lembar	Copy
35	Berita Acara Serah Terima No 022/BAST/PCB-JBS/III/16 tanggal 8 Maret 2016	1 lembar	Copy
36	Bilyet Giro Nomor AAZ 913430 nominal Rp 3.564.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
37	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000073 tanggal 25 Januari 2016	1 lembar	Asli
38	Journal Voucher nomor BNV 007689 tanggal 21 Januari 2016	1 lembar	Copy
39	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 3.564.000,-	1 lembar	Asli
40	Kwitansi bermaterai Pembayaran DP 30% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi Sistem Standing yang berlokasi di Bali Collection. SPK No 020/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 3.630.000,-	1 lembar	Asli
41	Invoice Down Payment 1-042/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Asli
42	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796565 tanggal 1 Desember 2015	1 lembar	Copy
43	Surat No S-286/PPN.NSFP/WPJ.17/KP.0603/2015 tanggal 20 Februari 2015 dari KPP Pratama Badung Utara kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy
44	Bilyet Giro Nomor AAZ 913412 nominal Rp 27.000.000,- an. Elfin Rudianto Sitorus	1 lembar	Copy
45	Bukti Pengeluaran Bank No 2016000028 tanggal 15 Januari 2016	1 lembar	Asli
46	Journal Voucher nomor BNV 007684 tanggal 14	1 lembar	Copy

Halaman 153 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2016		
47	Formulir transfer Bank CIMB Niaga Form Multiguna Rp 27.000.000,-	1 lembar	Asli
48	Journal Voucher JVD/018/12/2015 tanggal 31 Desember 2015	1 lembar	Copy
49	Kwitansi bermaterai Pembayaran DP 50% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection SPK No 019/BNV-BC/XI/2015, Nominal Rp 27.500.000,-	1 lembar	Asli
50	Invoice Down Payment 1-041/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Asli
51	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796564 tanggal 1 Desember 2015	1 lembar	Copy
52	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Januari 2016 Normal beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-01005782/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 29 Februari 2016	3 lembar	Copy
53	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Maret 2016 Pembetulan 1 beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-05012973/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2017 tanggal 30 Oktober 2017	3 lembar	Copy
54	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak April 2016 Normal beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-0105143/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 31 Mei 2016	3 lembar	Copy
55	SPT Masa PPN PT BALI NUSADEWATA VILLAGE Masa Pajak Juni 2016 Pembetulan 1 beserta Bukti Penerimaan Surat nomor S-01027580/PPN1111/WPJ.07/KP.0903/2016 tanggal 30 September 2016	3 lembar	Copy
56	Bukti transfer Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 20 Januari 2016 nilai Rp 27.000.000,-	1 lembar	Copy
57	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA atas pembayaran DP 50% Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2 di Bali Collection SPK No. 019/BNV-BC/XI/2015 nominal Rp 27.500.000,- dan Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
58	Invoice Down Payment dari PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1-041/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Copy
59	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 01/23/01/2016/BNV tanggal 14 Januari 2016	1 lembar	Copy
60	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 01/23/04/2016/BNV tanggal 04 April 2016	1 lembar	Copy
61	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 21/23/06/2016/BNV tanggal 21 Juni 2016	1 lembar	Copy
62	BILYET GIRO No. AAZ 913430 CIMB Niaga nominal Rp 3.564.000,-	1 lembar	Copy
63	Bukti Pengeluaran Bank PT Bali Nusadewata	1 lembar	Copy

Halaman 154 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Village yang dibayarkan kepada PT JAYA BALI SEJAHTERA no 2016000073 tanggal 25 Januari 2016		
64	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA atas pembayaran DP 30% Paket Pekerjaan Pembuatan Alat Pasang TV Promosi System Standing di Bali CollectionSPK No. 020/BNV-BC/XI/2015 nominal Rp 3.630.000,- dan Kartu NPWP PT JAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9-906.000	1 lembar	Copy
65	Invoice Down Payment dari PT JAYA BALI SEJAHTERA nomor 1-042/JBS/IN-DP/XI/2015 tanggal 30 November 2015	1 lembar	Copy
66	Surat dari KPP Pratama Badung Utara nomor S-286/PPN.NSFP/WPJ.17/KP.0603/2015 tanggal 20 Februari 2015 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak	1 lembar	Copy
67	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 42/23/12/2015/BNV tanggal 31 Desember 2015	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **SUMARJIANTO**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Copy kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 26 Februari 2015 untuk pembayaran progress 100% Paket Pekerjaan MEP External Restaurant BBQ dan Art Shop Komplek Area Bebek Bengil The Bay SPK No 017/SPK-TBB/XII/2014, banyaknya uang Rp 32.175.000,-	1 lembar	Copy
2	Copy invoice progress 100% No I-009/JBS/IN-PRG/II/2015 tanggal 26 Februari 2015	1 lembar	Copy
3	Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I No 001/BAST-RD/2015 tanggal 25 Februari 2015	1 lembar	Copy
4	Copy SPK No 017/SPK-TBB/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014	3 lembar	Copy
5	Copy Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796541 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **DJOKO PURNAMA, S.E.**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Material Dan peralatan Pekerjaan Elektronika no. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015 tanggal 7 Desember 2015	11 lembar	Copy
2	Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika no. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015 tanggal 7 Desember 2015	11 lembar	Copy
3	Sertifikat pembayaran no	1 lembar	Copy

Halaman 155 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/II/16		
4	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 19 Februari 2016 untuk pembayaran progress 1 (13,6382%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 124.816.000,-	1 lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833409 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
6	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 060/JBS/IN-PRG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016	1 lembar	Copy
7	Summary progress termyn ke 1 tertanggal 15 Februari 2016	12 lembar	Copy
8	Cek Bank BPD Bali no P343654 nilai Rp 155.168.982,-	1 lembar	Copy
9	Sertifikat pembayaran no 02/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/II/16	1 lembar	Copy
10	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 19 Februari 2016 untuk pembayaran progress 1 (13,6382%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 31.204.000,-	1 lembar	Copy
11	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833410 tanggal 2 Maret 2016	1 lembar	Copy
12	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 061/JBS/IN-PRG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016	1 lembar	Copy
13	Summary progress termyn ke 1 tertanggal 15 Februari 2016	13 lembar	Copy
14	Cek Bank BPD Bali no P344004 nilai Rp 73.920.591,-	1 lembar	Copy
15	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 Maret 2016 untuk pembayaran progress 2 (20,1352%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 14.865.000,-	1 lembar	Copy
16	Invoice progress yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-047/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
17	Summary progress termyn ke II tertanggal 3 Maret 2016	12 lembar	Copy
18	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833411 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy

Halaman 156 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Sertifikat pembayaran no 03/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
20	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 Maret 2016 untuk pembayaran progress 2 (20,1352%) Pengadaan Material Dan peralatan Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 59.461.000,-	1 lembar	Copy
21	Invoice progress ke 2 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-048/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
22	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833412 tanggal 4 Maret 2016	1 lembar	Copy
23	Sertifikat pembayaran no 03/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/III/16	1 lembar	Copy
24	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 April 2016 untuk pembayaran progress 3 (30,5334%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Pekerjaan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 26.171.000,-	1 lembar	Copy
25	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833419 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
26	Sertifikat pembayaran no 04/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/IV/16	1 lembar	Copy
27	Summary progress termyn ke 3 tertanggal 31 Maret 2016	12 lembar	Copy
28	Cek Bank BPD Bali no P344550 Rp 130.138.245,-	1 lembar	Copy
29	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA	1 lembar	Copy
30	Sertifikat pembayaran no 04/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/IV/16	1 lembar	Copy
31	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 4 April 2016 untuk pembayaran progress 3 (30,5334%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 104.681.000,-	1 lembar	Copy
32	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833421 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
33	Invoice progress 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-065/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 4 April 2016	1 lembar	Copy
34	Summary progress sampai dengan 2 April 2016 tertanggal 31 Maret 2016	1 lembar	Copy
35	Invoice progress 3 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-	12 lembar	Copy

Halaman 157 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRG/IV/2016 tanggal 4 April 2016		
36	Cek Bank BPD Bali no P346633 Rp 44.362.700,-	1 lembar	Copy
37	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tertanggal 20 Mei 2016	1 lembar	Copy
38	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran progress ke 4 (34,4325%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Dan Instalasi Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 8.921.000,-	1 lembar	Copy
39	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833423 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
40	Sertifikat pembayaran no 05/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/V/16	1 lembar	Copy
41	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-067/JBS/IN-PRG/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
42	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran progress ke 4 (34,4325%) Paket pekerjaan Pengadaan Material Dan peralatan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 35.685.000,-	1 lembar	Copy
43	Faktur Pajak nomor 011.031-16.02833424 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
44	Sertifikat pembayaran no 05/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/V/16	1 lembar	Copy
45	Invoice progress ke 4 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-066/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 16 Mei 2016	1 lembar	Copy
46	Summary progress sampai dengan tanggal 30 April 2016 tertanggal 30 April 2016	12 lembar	Copy
47	Cek Bank BPD Bali no P345339 Rp 109.117.000,-	1 lembar	Copy
48	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 6 Juni 2016 untuk pembayaran progress ke 5 (47,3951%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 109.117.000,-	1 lembar	Copy
49	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tertanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
50	Sertifikat pembayaran no 06-R/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VI/16	1 lembar	Copy
51	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833427 tanggal 6 Juni 2016	1 lembar	Copy
52	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT	1 lembar	Copy

Halaman 158 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-069/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 6 Juni 2016		
53	Summary progress sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 tertanggal 3 Juni 2016	12 lembar	Copy
54	Cek Bank BPD Bali no P345340 Rp 371.426.000,-	1 lembar	Copy
55	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 13 Juni 2016 untuk pembayaran progress 6 (86,9394%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 371.426.000,-	1 lembar	Copy
56	Invoice progress ke 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-070/JBS/IN-PRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
57	Sertifikat pembayaran no 07/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VI/16	1 lembar	Copy
58	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833429 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar	Copy
59	Summary progress sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 tertanggal 10 Juni 2016	12 lembar	Copy
60	Daftar Main Unit siap kirim ke Yan Project tertanggal 11 Juni 2016	7 lembar	Copy
61	Cek Bank BPD Bali no P459295 Rp 134.297.072,-	1 lembar	Copy
62	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 15 Agustus 2016	1 lembar	Copy
63	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran progress 7 (89,4858%) paket pekerjaan pengadaan elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 23.305.000,-	1 lembar	Copy
64	Copy Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833434 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
65	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/VIII/16	1 lembar	Copy
66	Invoice progress ke 7 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-079/JBS/IN-PRG/VII/2016 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
67	Summary progress sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 tertanggal 8 Agustus 2016	12 lembar	Copy
68	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran progress 5 (84,3031%) paket pekerjaan Upah Pemasangan Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 114.104.000,-	1 lembar	Copy

Halaman 159 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833435 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
70	Sertifikat pembayaran no 06/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/VIII/16	1 lembar	Copy
71	Invoice progress ke 5 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-080/JBS/IN-PRG/V/2016 tanggal 9 Agustus 2016	1 lembar	Copy
72	Summary progress sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 tertanggal 9 Agustus 2016	12 lembar	Copy
73	Cek Bank BPD Bali no P459300 Rp 63.394.000,-	1 lembar	Copy
74	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 2 September 2016	1 lembar	Copy
75	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/IX/16	1 lembar	Copy
76	Copy Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833436 tanggal 1 September 2016	1 lembar	Copy
77	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 1 September 2016 untuk pembayaran progress ke 8 (96,4126%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 63.394.000,-	1 lembar	Copy
78	Invoice progress ke 8 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-082/JBS/IN-PRG/VIII/2016 tanggal 1 September 2016	1 lembar	Copy
79	Summary progress sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 tertanggal 29 Agustus 2016	12 lembar	Copy
80	Cek Bank BPD Bali no P460470 Rp 55.599.527,-	1 lembar	Copy
81	Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 21 Oktober 2016	1 lembar	Copy
82	Sertifikat pembayaran no 08/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/X/16	1 lembar	Copy
83	Invoice progress 6 yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-088/JBS/IN-PRG/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
84	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833438 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
85	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran progress 6 (98,9901%) paket pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi Elektronika Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 33.604.000,-	1 lembar	Copy
86	Summary progress sampai dengan tanggal 30 September 2016 tertanggal 29 Agustus 2016	12 lembar	Copy
87	Sertifikat pembayaran no 09/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/X/16	1 lembar	Copy
88	Invoice progress ke 9 yang dikeluarkan oleh PT	1 lembar	Copy

Halaman 160 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYA BALI SEJAHTERA Nomor I-089/JBS/IN-PRG/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016		
89	Faktur Pajak nomor 010.031-16.02833439 tanggal 3 Oktober 2016	1 lembar	Copy
90	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran progress ke 9 (98,9751%) paket pekerjaan pengadaan material dan peralatan elektronika Project Yan's Hotel SPK No. 001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 22.912.000,-	1 lembar	Copy
91	Summary progress sampai dengan tanggal 30 September 2016 tertanggal 5 Oktober 2016	12 lembar	Copy
92	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran down payment Paket Pekerjaan Pengadaan ELEKTRONIKA Project Yan's House Hotel SPK No. 001/SPPP/ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 171.600.000,-	1 lembar	Copy
93	Cek Bank BPD Bali no P192159 Rp 171.600.000,-	1 lembar	Copy
94	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796566 tanggal 17 Desember 2015	1 lembar	Copy
95	Invoice down payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 046/JBS/IN-DP/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015	1 lembar	Copy
96	Sertifikat pembayaran no 01/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/YHH/XII/15	1 lembar	Copy
97	Faktur Pajak nomor 011.001-15.13796567 tanggal 17 Desember 2015	1 lembar	Copy
98	Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran down payment Paket Pekerjaan Upah Pemasangan dan Instalasi ELEKTRONIKA Project Yan's House Hotel SPK No. 002/SPPP/ELEKTRONIKA/AM-JBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp 42.900.000,- beserta cek Bank BPD Bali no P194071 Rp 41.730.000,-	1 lembar	Copy
99	Invoice down payment yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI SEJAHTERA Nomor 045/JBS/IN-DP/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015	1 lembar	Copy
100	Sertifikat pembayaran no 01/SP/Up.ELEKTRONIK/MK/YHH/XII/15	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **Ir. LATIF JAILANI**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740374 tanggal 1 Oktober 2014	1 lembar	Copy

Halaman 161 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740375 tanggal 15 Oktober 2014	1 lembar	Copy
3	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740378 tanggal 21 November 2014	1 lembar	Copy
4	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740379 tanggal 21 November 2014	1 lembar	Copy
5	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740381 tanggal 23 Desember 2014	1 lembar	Copy
6	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740382 tanggal 30 Desember 2014	1 lembar	Copy
7	Faktur Pajak nomor 010.003-14.41740383 tanggal 30 Desember 2014	1 lembar	Copy
8	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796538 tanggal 24 Februari 2015	1 lembar	Copy
9	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796540 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
10	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796543 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
11	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796544 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Copy
12	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 102.135.540,-	1 lembar	Copy
13	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796549 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
14	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 973.719,-	1 lembar	Copy
15	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796550 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
16	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 1.240.785,-	1 lembar	Copy
17	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796551 tanggal 17 Juni 2015	1 lembar	Copy
18	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 72.614,-	1 lembar	Copy
19	Faktur Pajak nomor 010.001-15.13796552 tanggal 16 Juni 2015	1 lembar	Copy
20	Invoice Progress 100% Nomor 1-011/JBS/IN-PRG/III/2015 tanggal 23 Maret 2015	1 lembar	Copy
21	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 001/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
22	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 002/BAST-JBS/II/2015	1 lembar	Copy
23	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 003/BAST-JBS/II/2015	5 lembar	Copy
24	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 004/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
25	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I no 005/BAST-JBS/II/2015	2 lembar	Copy
26	Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK-GUDANG GARAM KUPANG/VIII/14 senilai Rp 1.298.000.000,-	3 lembar	Copy

Halaman 162 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK-GUDANG GARAM MEP LT.2/X/14 senilai Rp 377.575.000,-	9 lembar	Copy
28	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 596.730.332,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 12 Mei 2015 nominal Rp 100.000.000,-	1 lembar	Copy
29	Bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 24 April 2015 nominal Rp 100.000.000,-	1 lembar	Copy
30	Bukti transfer ke ELFIN RUDIANTO SITORUS tanggal 31 Maret 2015 nominal Rp 146.730.332,-	1 lembar	Copy
31	Bukti transfer ke ELFIN RUDIANTO SITORUS tanggal 10 April 2015 nominal Rp 250.000.000,-	1 lembar	Copy
32	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 23.574.913,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 23.574.913,-	1 lembar	Copy
33	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 18.500.656,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 18.500.656,-	1 lembar	Copy
34	Kwitansi pembayaran dari PT BINA BANGUN PERKASA ke PT JAYA BALI SEJAHTERA dengan nominal Rp 1.379.674,- dan bukti transfer dana ke rekening BCA tanggal 2 Juli 2015 nominal Rp 1.379.674,-	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **RINA**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	SPK No. 097/GAIN/XI/2014 tanggal 17 November 2014	2 lembar	Copy
2	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796542 tanggal 2 April 2015	1 lembar	Asli
3	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 15 Mei 2015 Nominal Rp 130.403.519,-	1 lembar	Asli
4	Kwitansi bermaterai Progress ke-1 tanggal 2 Maret 2015 Nominal Rp 147.880.279,-	1 lembar	Asli
5	Invoice Progress 1 Nominal Rp 147.880.279,-	1 lembar	Asli
6	Final Summary	1 lembar	Asli
7	Laporan Progress Periode Januari 2015	9 lembar	Asli
8	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796545 tanggal 23 April 2015	1 lembar	Asli
9	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 183.050.215,-	1 lembar	Asli
10	Kwitansi bermaterai Termin II tanggal 23 April 2015 Nominal Rp 207.582.718,-	1 lembar	Asli
11	Invoice Progress 2 Nominal Rp 207.582.718,-	1 lembar	Asli
12	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 2	1 lembar	Asli

Halaman 163 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Final Summary Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
14	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
15	Variation Order Interim Payment Certificate No. 2	1 lembar	Asli
16	Laporan Progress Periode Februari 2015	58 lembar	Copy
17	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
18	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796547 tanggal 20 Mei 2015	1 lembar	Asli
19	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 165.638.235,-	1 lembar	Asli
20	Kwitansi bermaterai Progress ke-3 tanggal 20 Mei 2015 Nominal Rp 187.837.174,-	1 lembar	Asli
21	Invoice Progress 3 Nominal Rp 187.837.174,-	1 lembar	Asli
22	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 3	1 lembar	Asli
23	Final Summary Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
24	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
25	Variation Order Interim Payment Certificate No. 3	1 lembar	Asli
26	Laporan Progress Periode Maret 2015	48 lembar	Copy
27	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
28	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796553 tanggal 25 Juni 2015	1 lembar	Asli
29	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 22 September 2015 Nominal Rp 149.011.054,-	1 lembar	Asli
30	Kwitansi bermaterai Progress ke-4 tanggal 25 Juni 2015 Nominal Rp 168.981.607,-	1 lembar	Asli
31	Invoice Progress 4 Nominal Rp 168.981.607,-	1 lembar	Asli
32	BAP Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan	1 lembar	Asli
33	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 4	1 lembar	Asli
34	Final Summary Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
35	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
36	Variation Order Interim Payment Certificate No. 4	1 lembar	Asli
37	Laporan Progress Periode April 2015	47 lembar	Copy
38	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
39	Faktur Pajak nomor 010.001.15.13796554 tanggal 29 Juni 2015	1 lembar	Asli
40	Bukti bayar CIMB Niaga (Form Multiguna) tanggal 22 September 2015 Nominal Rp 107.286.705,-	1 lembar	Asli
41	Kwitansi bermaterai Progress ke-5 tanggal 29 Juni 2015 Nominal Rp 121.665.336,-	1 lembar	Asli
42	Invoice Progress 5 Nominal Rp 121.665.336,-	1 lembar	Asli
43	BAP Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan	1 lembar	Asli
44	Draft Interim Payment Valuation fo Certificate No. 5	1 lembar	Asli
45	Final Summary Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
46	Schedule Payment Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
47	Variation Order Interim Payment Certificate No. 5	1 lembar	Asli
48	Laporan Progress Periode Mei 2015	46 lembar	Copy
49	Q.13/624 GWK Package: Acala Villa	5 lembar	Asli
50	Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-5939/PP/WPJ.17/2016 tanggal 11 Oktober 2016	1 lembar	Copy

Dikembalikan kepada Saksi **GUNARDI**.

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Pengalaman Kerja dari PT JAYA BALI	1 lembar	Copy

Halaman 164 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJAHTERA Nomor : 08/SPK-JBS/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 a.n. LESTINA INDAH RAMASI SITORUS		
--	--	--	--

Dikembalikan kepada Saksi **LESTINA INDAH RAMASI SITORUS**.

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara a.n. Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS	1 set	Asli
2	Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara a.n. Terdakwa I MADE SUDARIS	1 set	Asli

Dikembalikan kepada Saksi **ARIEF BUDIMAN, SE.MM**;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No, 1085 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgabaya Desa Labuhan Lombok yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak ELFIN RUDIANTO SITORUS.	1 set	Asli
2	1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No, 1603 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgabaya Desa Labuhan Lombok yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak ELFIN RUDIANTO SITORUS.	1 set	Asli

Diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian pada pendapatan negara (PPN terutang) akibat dari perbuatan Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS dan I MADE SUDARIS;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A Alit Rai Suastika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 165 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 166 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)